



Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Demak

BUKU KAJIAN

GRAND DESAIN PEMBANGUNAN INDUSTRI HIJAU

KABUPATEN DEMAK

2024



POLICY BRIEF

Judul: Kajian Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak

Permasalahan:

Perkembangan industri di Indonesia, termasuk di Kabupaten Demak, menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian, namun sering kali berdampak negatif pada lingkungan, seperti polusi dan pengelolaan limbah yang buruk. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah mendorong implementasi industri hijau melalui regulasi, adopsi teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan energi terbarukan, sejalan dengan komitmen terhadap SDGs dan Paris Agreement. Kabupaten Demak, sebagai kawasan prioritas industri di Jawa Tengah, memiliki potensi besar melalui industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan, UMKM, serta pengembangan energi hijau. Diperlukan "Grand Desain" sebagai panduan strategis untuk memastikan pembangunan industri yang berkelanjutan, mendukung visi Demak sebagai penumpu pangan dan industri hijau yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Tujuan Kebijakan:

Kebijakan Grand Design Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak bertujuan untuk:

1. Memetakan kondisi pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak secara komprehensif.
2. Mensinkronisasikan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan, perencanaan pelaksanaan pembangunan industri hijau baik pada tataran nasional, provinsi dan daerah.

3. Tersusunnya arah kebijakan serta strategi pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045.

Analisis Masalah:

Implementasi Pembangunan Industri Hijau di Kabupaten Demak menghadapi beberapa kendala permasalahan dan isu strategis antara lain :

1. Belum terpenuhinya Readines Criteria mendasar antara lain penyusunan Regulasi Daerah yang mengatur tata kelola industri hijau, termasuk kebijakan, prosedur teknis, dan indikator kinerja.
2. Belum terbentuknya tata Kelola industri hijau yang menyinergikan program dan kebijakan antar pemangku kepentingan.
3. Belum tersedianya panduan teknis untuk pelaku industri dalam menerapkan praktik hijau sesuai standar.
4. Belum terbangunnya sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau kepatuhan industri terhadap prinsip hijau.
5. Terdapat kesenjangan terhadap sumber daya manusia dan Teknologi untuk memperkuat implementasi tata kelola industri hijau.
6. Belum terciptanya koordinasi dan Kolaborasi untuk mencapai komitmen Industri Hijau di Kabupaten Demak. Belum adanya hubungan sinergis dengan lembaga sertifikasi, NGO, maupun Kementerian terkait (Dirjen IKMA)

Alternatif Solusi Kebijakan :

Roadmap ini bertujuan untuk memberikan panduan strategis pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak dalam periode 20 tahun, yang terbagi ke dalam lima tahapan lima tahunan.

1. TAHAP 1: FONDASI DAN KESADARAN (2025-2030)

- 1) Membangun kesadaran akan pentingnya industri hijau.
- 2) Memulai pengembangan regulasi dan infrastruktur dasar.



2. TAHAP 2: IMPLEMENTASI AWAL DAN PILOT PROJECT (2030-2035)

- 1) Mewujudkan proyek percontohan industri hijau.
- 2) Mendorong adopsi teknologi hijau oleh industri kecil dan menengah (IKM).

3. TAHAP 3: AKSELERASI DAN EKSPANSI (2035-2040)

- 1) Meningkatkan skala penerapan industri hijau.
- 2) Menjadikan Demak sebagai pusat inovasi industri hijau di Jawa Tengah.

4. TAHAP 4: PEMANTAPAN DAN INTEGRASI (2040-2045)

- 1) Mencapai keberlanjutan penuh dalam sektor industri hijau.
- 2) Integrasi industri hijau dengan ekonomi lokal dan regional.

Rekomendasi Kebijakan :

Implementasi dengan tata kelola sistematis, Kabupaten Demak memerlukan fondasi yang kuat untuk pembangunan industri hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan sesuai visi Grand Desain 2025–2045. Langkah-langkah berikut diperlukan:

1. Penyusunan Regulasi Daerah: Membuat peraturan daerah yang mengatur tata kelola industri hijau, termasuk kebijakan, prosedur teknis, dan indikator kinerja.
2. Pembentukan Lembaga Koordinasi: Mendirikan forum koordinasi untuk menyinergikan program dan kebijakan antar pemangku kepentingan.
3. Penyediaan Panduan Teknis: Menyusun panduan teknis untuk pelaku industri dalam menerapkan praktik hijau sesuai standar.
4. Pembangunan Sistem Pengawasan: Membangun sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau kepatuhan industri terhadap prinsip hijau.



5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi: Menyediakan pelatihan dan akses teknologi hijau untuk memperkuat implementasi tata kelola industri hijau.
6. Aspek penting lainnya dalam rekomendasi ini adalah Koordinasi dan Kolaborasi untuk mencapai komitmen Industri Hijau di Kabupaten Demak. Langkah strategis yang diperlukan mencakup membangun hubungan sinergis dengan lembaga sertifikasi, NGO, dan melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA).

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak Tahun 2024

Disusun Oleh:

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Demak

Alamat: Jl. Kyai Jebat No.30A, Petengan Selatan, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak

Telp/Fax: (0291) 685663

Website: sekretariatbappeda1@gmail.com

Kajian Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak dirangkum dalam Ringkasan Eksekutif yang disusun berdasarkan data dan informasi melalui tahapan seperti pengumpulan data, survei lapangan untuk memahami kondisi terkini, analisis potensi dan tantangan, hingga penyusunan rekomendasi strategis. Kajian ini dilakukan selama November hingga Desember 2024. Meskipun telah diupayakan untuk menyajikan informasi yang akurat dan relevan, data dalam laporan ini dapat memerlukan penyesuaian sesuai perkembangan di masa depan.

Laporan ini bersifat terbuka untuk diakses oleh berbagai pihak dan telah disebarluaskan ke sejumlah OPD terkait di Kabupaten Demak. Sebagai dokumen yang dimiliki oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Demak, penggunaan atau reproduksi lebih lanjut dapat dilakukan dengan menghubungi Kepala BAPPELITBANGDA selaku pihak pelaksana kegiatan.



PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Industri di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, memberikan kontribusi besar terhadap PDB dan membuka lapangan kerja. Namun, perkembangan ini sering menimbulkan masalah lingkungan serius, seperti polusi dan limbah yang tidak terkendali, sehingga memerlukan strategi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berkomitmen pada SDGs dan Paris Agreement, dengan target pengurangan emisi gas rumah kaca, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pengembangan energi terbarukan.

Kabupaten Demak, sebagai salah satu wilayah pesisir di Jawa Tengah, memiliki potensi besar dalam sektor industri, terutama industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan. Berdasarkan data PDRB 2023, sektor ini memberikan kontribusi ekonomi terbesar dengan dukungan dari UMKM yang berperan signifikan. Demak juga menjadi bagian dari kawasan Industri Terpadu bersama Semarang dan Kendal, yang difokuskan pada inovasi teknologi ramah lingkungan, seperti kimia hijau dan energi terbarukan.

Sebagai upaya mendukung pembangunan industri hijau, Pemerintah Kabupaten Demak merumuskan dokumen "Grand Desain" yang berisi arahan kebijakan dan strategi pembangunan industri berkelanjutan. Dokumen ini menjadi landasan dalam mendukung visi "Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan," sekaligus memastikan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud



Maksud dari penyusunan Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak ini adalah tersusunnya rencana komprehensif pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak yang sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui kondisi pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak secara komprehensif.
- 2) Mensinkronisasikan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan, perencanaan pelaksanaan pembangunan industri hijau baik pada tataran nasional, provinsi dan daerah.
- 3) Menyusun arah kebijakan serta strategi pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045.

c. Sasaran

Berikut merupakan sasaran yang akan dicapai pada pelaksanaan penyusunan kajian ini:

- 1) Tersedianya gambaran pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak secara komprehensif.
- 2) Terciptanya perencanaan pelaksanaan pembangunan industri hijau yang sinkron, terintegrasi dan selaras baik pada tataran nasional, provinsi dan daerah.
- 3) Tersusunnya arah kebijakan serta strategi pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak Tahun 2025-2045.

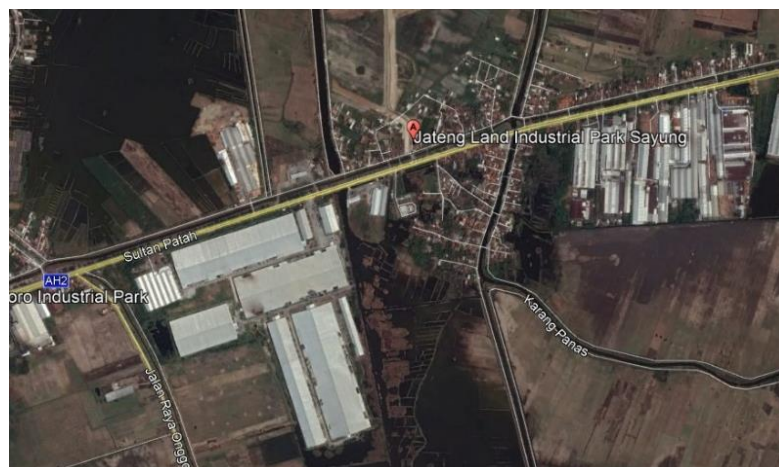
INDUSTRI KABUPATEN DEMAK

Kawasan Industri yang terdapat di Kabupaten Demak saat ini berjumlah 4 kawasan. Dimana 1 kawasan berupa Kawasan Industri eksisting, dan 3 kawasan lainnya masih dalam tahap rencana yang artinya kegiatan industrinya belum berjalan. Satu Kawasan Industri eksisting itu bernama Kawasan Industri Sayung



atau yang lebih dikenal dengan Jatengland, dimana itu merupakan nama dari pengelola Kawasan Industri tersebut. Sedangkan 3 Kawasan Industri yang masih dalam tahap rencana dikelola oleh PT. Buana Cipta Megah, PT. Jasa Mas Graha Utama, dan PT Mitra Bumi Dadi Mukti. Permasalahan yang dihadapi Kawasan Industri di Kabupaten Demak diantaranya ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih, dan pengelolaan persampahan.

Kawasan Industri eksisting yang berada di Kabupaten Demak ialah Kawasan Industri Sayung. Kawasan Industri sayung berlokasi di Desa Batu, Kecamatan Karang Tengah. Kawasan Industri ini diperuntukkan untuk industri menengah dan industri besar. Lokasi Kawasan Industri ini berada dekat dengan Jalan Nasional (jalan raya Semarang – Surabaya), dan berjarak ± 2 km dari jalan tol Semarang – Demak. Kawasan Industri sayung berdekatan dengan beberapa infrastruktur diantaranya berjarak ± 15 km dengan Pelabuhan Tanjung Emas, berjarak ± 25 km dengan Bandara Ahmad Yani dan berjarak ± 20 km dari Stasiun Tawang.

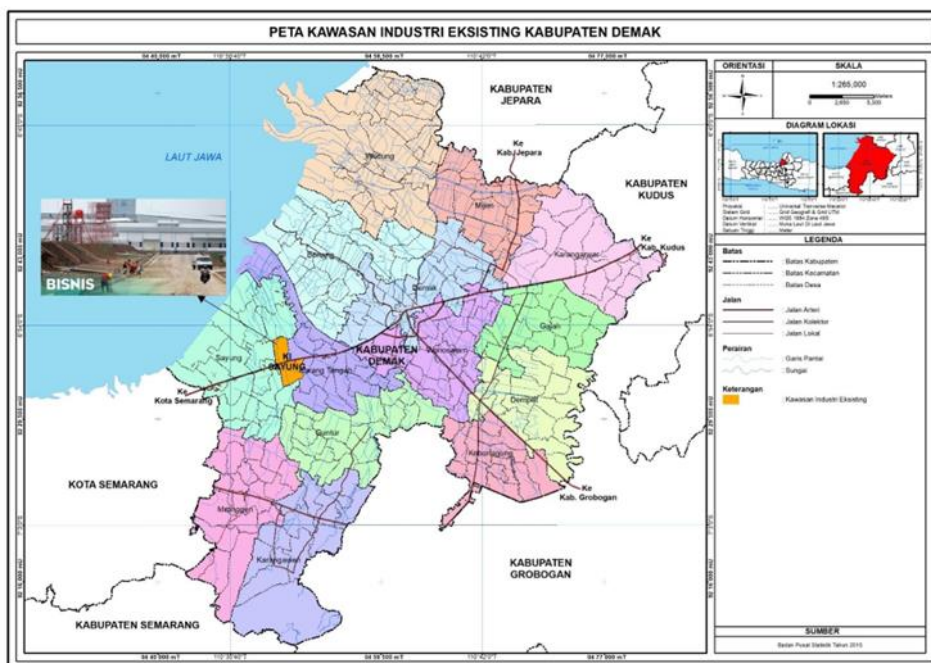


Gambar 1 Kawasan Industri Eksisting Kabupaten Demak

Adanya infrastruktur tersebut di sekitar Kawasan Industri tentu sangat membantu kegiatan operasional industri menjadi lebih mudah dan efektif selain hanya mengandalkan distribusi melalui transportasi darat, khususnya proses ekspor – impor.

Tabel 1 Kawasan Industri Eksisiting di Jawa Tengah

No	Kawasan Industri	Pengelola	Alamat	Luas lahan	Jumlah Tenant existing
1	KI Wijayakusuma	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Jl. Raya Semarang Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang	250	45
2	KI Bukit Semarang Baru	PT. Karyadeka Alam Lestari	Jl. RM. Hadisubroto KM.16 Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang	250	13
3	KI Sinar Centra Cipta	PT. SINAR CENTRA CIPTA	Komplek Jalur Lingkar Tanjung Mas, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	95	10
4	KI Tanjung Mas	PT. Lamicitra Nusantara	Jl. Coaster No.8, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	101	10
5	KI LIK Bugangan	PT. TANAH MAKMUR	Jl. Raya Kaligawe KM. 4, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang	100	219
6	KI Tambak Aji	PT. GUNA MEKAR INDUSTRI	Jl. Tambak Aji No.7, Kel. Tambak Aji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	130	43
7	KI Cilacap	Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap	Jl. MT. Haryono No. 167 Lomanis, Cilacap 53211	154	19
8	KI Kendal	PT. Kawasan Industri Kendal	Jl. Semarang – Kendal, Arteri Km. 19 Kel. Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal	2200	44
9	KI Terboyo Megah	PT. Merdeka Wirastama Imam	Jl. Kaligawe KM.6, Kel Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang	300	53
10	KI Terboyo Park	PT. Merdeka Wirastama Imam	Jl. Kaligawe KM.6, Kel Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang	300	106
11	KI Candi	PT. Indo Perkasa Usahatama	Jl. Gatot Subroto, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	300	186
12	KI Sayung	PT. Jatengland	Jl. Raya Semarang- Demak, KM 14,7, Desa Batu Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	300	23



Gambar 2 Peta Kawasan Industri Eksisting Kabupaten Demak

Selain Kawasan Industri eksisting, di wilayah Kabupaten Demak juga akan direncanakan kawasan industri baru. Kabupaten Demak sendiri melalui perencanaan tata ruang terpadu telah merencanakan tiga lokasi yang terletak di Kecamatan Sayung, Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Bonang. Kawasan Industri rencana ini sudah ditentukan lokasinya, bahkan ada beberapa Kawasan Industri yang sudah memiliki pengelola.

Ketiga perusahaan yang mengajukan rencana pembangunan Kawasan Industri tersebut terkendala dari izin usaha yang diberikan pemerintah. Terkendalanya izin usaha tersebut dikarenakan beberapa perusahaan tidak memenuhi syarat pembangunan usaha dan lokasi pembangunan yang dipilih tidak diperuntukkan untuk Kawasan Industri.

Tabel 2 Kawasan Industri Rencana Kabupaten Demak

No	Kawasan Industri	Pengelola	Lokasi	Rencana Luasan
1	PT. Jasa Mas Graha Utama	PT. Jasa Mas Graha Utama	Kabupaten Demak	300
2	PT. Mitra Bumi Dadi Mukti	PT. Mitra Bumi Dadi Mukti	Kabupaten Demak	300
3	PT. Buana Cipta Megah	PT. Buana Cipta Megah	Kabupaten Demak	300

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. INDUSTRI HIJAU

Industri hijau, yang diperkenalkan pada Konferensi Internasional tentang Industri Hijau di Manila 2009, bertujuan menangani masalah lingkungan melalui efisiensi sumber daya dan pengurangan emisi karbon, terutama di sektor industri. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian bekerja sama dalam menciptakan industri hijau melalui peraturan yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan. UU Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa industri hijau mengutamakan efisiensi sumber daya untuk mendukung pembangunan yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

Prinsip industri hijau mencakup pengelolaan yang ramah lingkungan dalam setiap tahap produksi. Penerapannya membawa manfaat seperti peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, peningkatan citra perusahaan, serta membuka peluang pasar baru dan akses pendanaan. Desain industri hijau mencakup perancangan produk dan pabrik yang mengikuti standar lingkungan.

Setiap tahapan proses dalam industri diperlukan indikator-indikator yang terukur untuk memenuhi persyaratan sebagai industri hijau. Persyaratan dan indikator tersebut bisa dituangkan dalam bentuk nilai batas atau standar, seperti "ISO 14000 (*Environmental Management System*), ISO 26000 (*Social Responsibility*) EU (*Restriction Hazardous Substance/RoHS & Waste Electrical and Electronic Equipment /WEEE toward reuse & recycle*), British Standard (*Publicly Available Specification/PAS toward lifecycle GHG Emission*); *Green Label : Green seal, energy star*, ATIS, EURO; USA & Eropa (*California proposition 65*), dan lainnya. Di Indonesia, standarisasi dampak lingkungan ada yang bersifat wajib seperti PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan SIH (Sertifikasi Industri Hijau).

Standar Industri Hijau (SIH) yang telah ditetapkan maka akan menjadi pedoman bagi perusahaan industri dan perusahaan industri wajib memenuhi



ketentuan standar industri hijau yang telah diberlakukan secara wajib. Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dilakukan sebagai berikut:

1. Memperhatikan sistem Standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan
2. Berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan teknologi, bidang Standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan lembaga terkait.
3. Untuk mewujudkan Industri Hijau, perusahaan industri secara bertahap:
4. membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau;
5. menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau;
6. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan
7. mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

Untuk pedoman secara lengkap dan teknis dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 51/M-Ind/Per/6/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau. Dalam pedoman tersebut, Standar Industri Hijau atau SIH adalah standar industri yang terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang dibakukan dan disusun secara konsensus oleh semua pihak terkait yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Selain itu dalam pedoman tersebut dibahas juga mengenai ketentuan standar industri hijau mulai dari perencanaan, prinsip, penyusunan, metode dan jenis verifikasi, tim teknis, hingga penetapan. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2014, perusahaan industri dikategorikan sebagai "Industri Hijau" apabila telah memenuhi Standar Industri Hijau. Selanjutnya, perusahaan industri yang telah



memenuhi Standar Industri Hijau dapat diberikan 'sertifikat industri hijau' yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.

2. IDENTIFIKASI PROFIL INDUSTRI KABUPATEN DEMAK

Kabupaten Demak memiliki potensi besar di sektor industri seperti tekstil, furniture, dan makanan olahan, yang terus berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan pasar lokal dan regional. Kombinasi antara industri berbasis kearifan lokal dan sektor modern menciptakan dinamika ekonomi yang beragam, dengan industri kecil dan menengah (IKM) berperan signifikan dalam menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam mendukung penyusunan Grand Desain Industri Hijau, analisis mendalam dilakukan dengan mempertimbangkan data kependudukan, sumber daya alam, infrastruktur, dan kebutuhan pasar. Proses ini juga merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020, yang menjadi dasar klasifikasi jenis industri di Kabupaten Demak untuk memastikan arah pembangunan industri yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan visi daerah.

Klasifikasi industri berdasarkan regulasi tersebut mencakup sektor-sektor utama seperti tekstil, hasil laut, makanan olahan, serta produk berbasis kayu dan furniture. Industri besar difokuskan pada produksi berskala besar dengan potensi ekspor, sementara industri kecil dan menengah diarahkan pada penguatan inovasi lokal dan pengembangan nilai tambah produk agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Identifikasi ini membantu merumuskan prioritas kebijakan dan program strategis untuk setiap sektor.

Berikut adalah pembagian jenis industri berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020.

Tabel 3 Jenis Industri Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020

Direktorat	Jenis Industri
	Industri Kimia Hulu

Direktorat	Jenis Industri
Jenis Industri Binaan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, Dan Tekstil	Industri Kimia Hilir Dan Farmasi
	Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam
	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki
Jenis Industri Binaan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika	Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan
	Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
	Industri Elektronika Dan Telematika
	Industri Logam
Jenis Industri Binaan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, Dan Aneka	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur
	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka
	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut
Jenis Industri Binaan Direktorat Jenderal Industri Agro	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan
	Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020

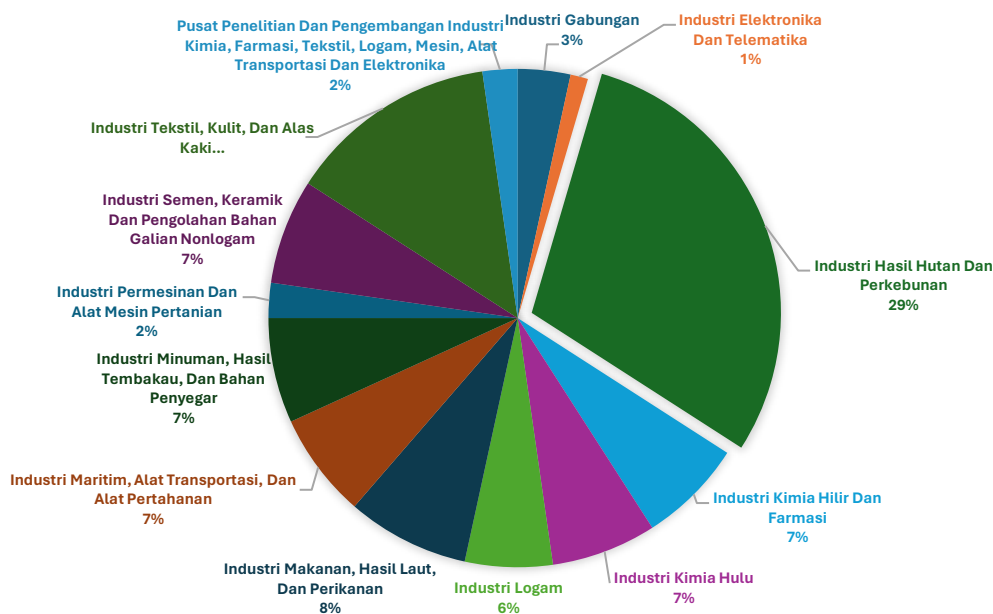
A. Industri Besar

Berikut adalah ringkasan industri besar di Kabupaten Demak hingga 2024, mencakup sektor unggulan seperti hasil hutan, tekstil, alas kaki, serta pengolahan makanan dan hasil laut. Data ini menjadi panduan strategis dalam merencanakan dan mengembangkan sektor industri di masa depan.

Dengan total 88 unit industri, sektor hasil hutan dan perkebunan mendominasi dengan 26 unit (29,55%), mencerminkan potensi alam Demak yang kuat. Industri tekstil, kulit, dan alas kaki menempati posisi kedua dengan 12 unit (13,64%), menunjukkan keunggulan manufaktur berbasis bahan lokal. Sektor makanan, hasil laut, dan perikanan, yang memiliki 7 unit (7,95%), juga memainkan peran penting, didukung oleh letak geografis Demak di pesisir utara Jawa.

Sektor kimia hulu, kimia hilir, farmasi, serta industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar masing-masing memiliki 6 unit (6,82%), memberikan kontribusi signifikan terhadap pengolahan dan manufaktur. Meskipun jumlahnya kecil, sektor logam (5,68%), elektronika dan telematika (1,14%), serta pusat penelitian dan pengembangan (2 unit atau 2,27%) mencerminkan perhatian terhadap inovasi dan diversifikasi. Dengan keberagaman ini, Kabupaten Demak memiliki potensi besar untuk meningkatkan

daya saing lokal, nasional, dan internasional melalui pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan.



Gambar 3 Jenis Industri Skala Besar di Kabupaten Demak Per Tahun 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

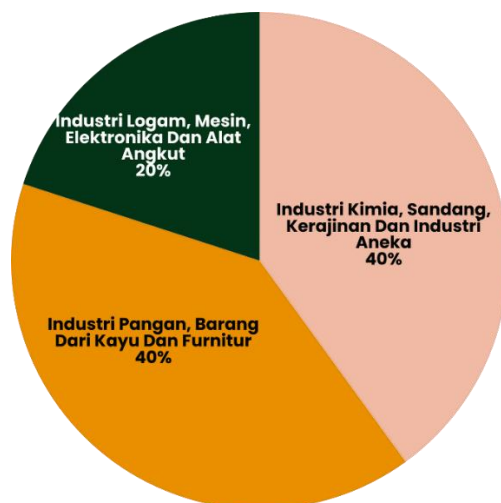
B. Industri Menengah

Berikut adalah rekapitulasi industri menengah di Kabupaten Demak hingga 2024, yang dikelompokkan berdasarkan jenis dan klasifikasi. Industri menengah memiliki peran strategis dalam mendorong perekonomian daerah, menyediakan lapangan kerja, dan menjembatani industri kecil serta besar dengan menekankan peningkatan kapasitas produksi dan daya saing.

Data menunjukkan tiga kelompok utama industri menengah yang signifikan. Industri kimia, sandang, kerajinan, dan aneka, serta industri pangan, barang dari kayu, dan furnitur menjadi sektor dominan, masing-masing mencakup 12 unit atau 40% dari total. Kedua sektor ini mencerminkan potensi lokal, mulai dari pengolahan bahan kimia hingga produk kreatif dan barang berbasis kayu serta makanan olahan.

Selain itu, sektor logam, mesin, elektronika, dan alat angkut menyumbang 6 unit atau 20% dari total industri. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, sektor ini memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas industri lainnya,

hususnya sebagai penyedia barang modal dan alat transportasi. Hal ini menunjukkan Kabupaten Demak mulai mengembangkan sektor berbasis teknologi dan manufaktur modern di samping sektor tradisional.



Gambar 4 Jenis Industri Skala Menengah di Kabupaten Demak Per Tahun 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

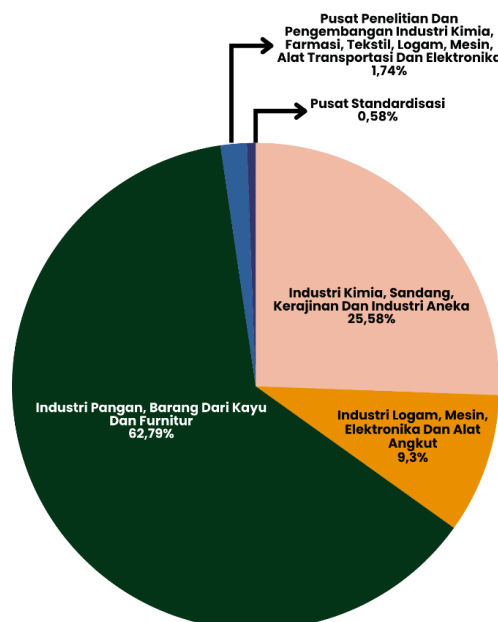
C. Industri Kecil

Industri kecil di Kabupaten Demak memiliki peran vital dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Ragam jenis usaha yang ada menunjukkan potensi besar yang dapat terus dikembangkan dengan dukungan dari pemerintah dan pihak terkait. Berikut adalah rekapitulasi industri kecil di Kabupaten Demak hingga 2024, yang dikelompokkan berdasarkan jenis dan klasifikasi, mencerminkan keberagaman sektor serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Data klasifikasi industri kecil dan menengah di Kabupaten Demak menunjukkan variasi sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Industri kecil dan menengah di sektor pangan, barang dari kayu, dan furnitur mendominasi dengan 108 unit usaha, atau 62,79% dari total industri. Dominasi sektor ini menandakan potensi besar yang dapat terus dikembangkan, mengingat tingginya permintaan pasar.

Sektor industri kecil dan menengah lainnya, seperti kimia, sandang, kerajinan, dan aneka, berjumlah 44 unit usaha, berkontribusi sebesar 25,58%.

Sementara sektor logam, mesin, elektronika, dan alat angkut mencatatkan 16 unit usaha atau 9,30%, yang menunjukkan perkembangan industri berbasis teknologi dan manufaktur. Selain itu, terdapat pusat penelitian dan pengembangan dengan 3 unit usaha (1,74%) serta pusat standardisasi dengan 1 unit usaha (0,58%).



Gambar 5 Jenis Industri Skala Kecil di Kabupaten Demak Per Tahun 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

D. Profil Industri Kabupaten Demak

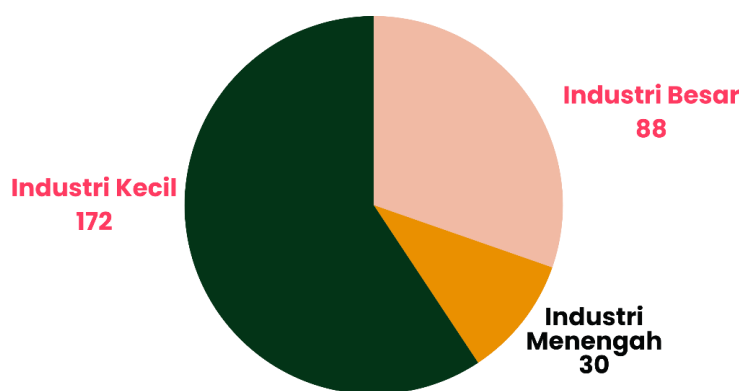
Data ini memberikan gambaran lengkap tentang keragaman dan distribusi industri di berbagai skala usaha, termasuk industri besar, menengah, dan kecil. Dengan data ini, pihak berwenang dan pengambil kebijakan dapat lebih memahami kebutuhan sektor-sektor tersebut dan merancang kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi industri pada setiap skala usaha. Dukungan dalam akses pembiayaan, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia dapat disesuaikan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Data ini juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh skala industri di daerah ini.

Total industri di Kabupaten Demak pada 2024 mencapai 290 unit usaha, yang terbagi dalam industri besar, menengah, dan kecil. Angka ini mencakup berbagai sektor yang berperan dalam mendukung perekonomian daerah. Di sektor industri besar, terdapat 88 unit usaha yang meliputi industri hasil hutan, kimia, logam, dan hasil laut. Industri besar ini penting untuk penyediaan lapangan kerja dan pengolahan sumber daya alam.

Sektor industri kecil dan menengah mencatatkan jumlah yang lebih besar, yaitu 172 unit usaha untuk industri kecil dan 30 unit usaha untuk industri menengah. Industri kecil dan menengah beragam, meliputi sektor kimia, sandang, kerajinan, logam, mesin, elektronik, serta makanan dan furnitur. Industri kimia, sandang, kerajinan, dan aneka mendominasi dengan 44 unit usaha di sektor kecil dan 12 unit di sektor menengah. Sektor makanan, kayu, dan furnitur juga berkembang pesat dengan 120 unit usaha di berbagai skala.

Pusat penelitian dan pengembangan dalam bidang kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, dan elektronik menyumbang 5 unit usaha, sementara pusat standardisasi memiliki 1 unit usaha yang fokus pada penerapan standar industri hijau di Kabupaten Demak.



Gambar 6 Pembagian Jenis Industri Kabupaten Demak

Sumber: Tim Penyusun, 2024

3. ANALISIS KESESUAIAN PARAMETER INDUSTRI HIJAU KABUPATEN DEMAK

Parameter industri hijau adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan praktik keberlanjutan dan pengurangan dampak

lingkungan dalam industri. Indikator ini mencakup dua aspek utama: teknis dan manajemen, yang bekerja bersama untuk menciptakan ekosistem industri berkelanjutan.

Pada aspek teknis, parameter industri hijau meliputi pengelolaan energi, sumber daya, dan limbah, seperti penggunaan teknologi bersih untuk efisiensi energi, serta pemanfaatan bahan baku terbarukan dan daur ulang limbah. Standar teknis seperti efisiensi proses produksi dan pemantauan kualitas lingkungan juga menjadi bagian dari aspek ini.

Pada aspek manajemen, parameter industri hijau mencakup integrasi keberlanjutan dalam kebijakan perusahaan, audit lingkungan, pelatihan karyawan tentang praktik ramah lingkungan, serta pengelolaan risiko dan transparansi pelaporan kinerja lingkungan. Berdasarkan identifikasi sebelumnya, telah ditentukan klasifikasi sertifikasi untuk industri di Kabupaten Demak.

A. Standar Industri Hijau untuk Industri atau Kantong Tas Belanja Plastik dan Bioplastik

Di wilayah Kabupaten Demak, terdapat banyak industri yang masuk pada kategori Standar Industri Hijau untuk Industri atau Kantong Tas Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020). Kebijakan klasifikasi ini didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3065 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3398 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau.

Standar Industri Hijau (SIH 22220.1:2020) untuk industri tas atau kantong belanja plastik dan bioplastik mencakup dua aspek utama, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan manajemen, yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan operasional industri sesuai dengan prinsip industri hijau. Ruang lingkup standar ini mencakup pengelolaan bahan baku, energi, air, proses produksi, produk, kemasan, limbah, dan emisi gas rumah kaca, serta tata kelola manajemen yang mendukung penerapan industri hijau secara menyeluruh.



Pada aspek persyaratan teknis, standar ini menetapkan berbagai parameter yang harus dipenuhi industri dalam menjalankan operasionalnya. Pengelolaan bahan baku menjadi perhatian utama, termasuk sumber, spesifikasi, penanganan bahan baku, serta rasio produk terhadap penggunaan bahan baku. Selain itu, pengelolaan bahan penolong dan/atau aditif, efisiensi konsumsi energi per ton produk, serta penggunaan air bersih untuk proses produksi plastik berbahan polimer, daur ulang, dan biopolimer juga menjadi indikator penting. Proses produksi dievaluasi berdasarkan kinerja peralatan yang dinyatakan dalam OEE (Overall Equipment Effectiveness) untuk setiap jenis bahan baku. Standar ini juga mengatur spesifikasi mutu produk, penggunaan bahan kemasan tertentu, dan pengelolaan limbah, baik cair, padat, maupun limbah B3. Selain itu, emisi gas rumah kaca, terutama emisi CO₂ spesifik, juga menjadi bagian dari evaluasi teknis.

Sementara itu, persyaratan manajemen mencakup aspek kebijakan, perencanaan strategis, pelaksanaan, dan tinjauan manajemen untuk mendukung keberlanjutan operasional industri. Kebijakan dan organisasi industri hijau harus jelas, termasuk adanya sosialisasi kepada seluruh pihak terkait. Industri juga diwajibkan untuk memiliki perencanaan strategis yang mencakup tujuan, sasaran, dan program industri hijau. Pelaksanaan dan pemantauan program harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan keberhasilannya. Tinjauan manajemen menjadi elemen penting untuk mengevaluasi konsistensi perusahaan dalam memenuhi persyaratan teknis dan manajemen sesuai standar yang berlaku.

Standar ini juga menyoroti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bagian integral dari industri hijau. Perusahaan diharapkan memiliki kontribusi nyata terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Selain itu, aspek ketenagakerjaan juga diatur, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung kesejahteraan tenaga kerja.



B. Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat

Industri lain yang banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Demak adalah jenis industri yang masuk dalam kategori Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2023). Standar Industri Hijau (SIH 20122.1:2023) untuk industri amonia, pupuk urea, pupuk SP-36, dan pupuk amonium sulfat dirancang untuk memastikan keberlanjutan proses produksi serta meminimalkan dampak lingkungan. Standar ini meliputi dua aspek utama, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan manajemen, yang mencakup berbagai parameter operasional dan kebijakan.

Pada persyaratan teknis, standar ini menetapkan pengelolaan bahan baku sebagai salah satu elemen utama. Industri diwajibkan memastikan sumber, spesifikasi, dan penanganan bahan baku yang sesuai. Rasio penggunaan bahan baku terhadap produk per plant juga menjadi indikator penting untuk masing-masing jenis produksi, seperti amonia, pupuk urea, pupuk SP-36, dan pupuk amonium sulfat. Selain itu, efisiensi energi menjadi perhatian besar, dengan penekanan pada konsumsi energi total spesifik untuk setiap proses produksi, pemanfaatan kembali panas gas buang, dan efisiensi penggunaan air bersih (make-up fresh water) per plant.

Proses produksi dievaluasi berdasarkan kinerja peralatan yang dinyatakan dalam Overall Equipment Effectiveness (OEE). Produk yang dihasilkan harus memenuhi standar mutu tertentu, sedangkan kemasan harus sesuai dengan spesifikasi mutu yang ditetapkan untuk pupuk urea, SP-36, dan ZA. Limbah menjadi fokus lainnya, dengan standar yang mengatur sarana pengelolaan limbah cair, emisi gas buang, dan limbah B3 maupun non-B3, serta pemenuhan parameter lingkungan terkait. Emisi gas rumah kaca, termasuk CO₂ spesifik dan ekuivalen, juga dipantau secara ketat untuk setiap jenis produk.



Dalam persyaratan manajemen, standar ini mengharuskan industri memiliki kebijakan dan organisasi yang mendukung prinsip industri hijau, termasuk sosialisasi kebijakan tersebut kepada seluruh pihak terkait. Perencanaan strategis dengan tujuan dan sasaran yang jelas menjadi dasar pelaksanaan program industri hijau. Pemantauan dan audit internal dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Tinjauan manajemen diperlukan guna menjaga konsistensi penerapan persyaratan teknis dan manajemen sesuai dengan standar yang berlaku.

Standar ini juga mengintegrasikan aspek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan ketenagakerjaan. Industri diharapkan aktif berkontribusi pada lingkungan sosial di sekitar operasinya, serta menyediakan fasilitas dan program untuk mendukung kesejahteraan tenaga kerja.

C. Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis

Industri yang berlokasi di Kabupaten Demak juga termasuk dalam kategori Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023). Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023) mencakup persyaratan teknis dan manajemen untuk mendukung prinsip keberlanjutan. Persyaratan teknis meliputi pengelolaan bahan baku, mulai dari sumber, spesifikasi, hingga rasio penggunaan bahan baku terhadap total produk. Selain itu, bahan penolong juga diatur terkait sumber, spesifikasi, dan penanganannya. Dalam aspek energi, standar ini menetapkan konsumsi energi spesifik per lini produksi serta mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Untuk pengelolaan air, konsumsi air baru (make-up fresh water) juga diukur secara spesifik per lini produksi. Proses produksi harus didukung dengan peralatan yang memiliki kinerja optimal, yang dinyatakan melalui Overall Equipment Effectiveness (OEE). Produk yang dihasilkan wajib memenuhi standar mutu, sementara kemasan diutamakan yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau terurai secara alami. Dalam pengelolaan limbah, sarana untuk limbah



cair, emisi gas buang, dan udara harus memenuhi parameter baku mutu lingkungan, termasuk pengelolaan limbah B3 dan non-B3 serta tingkat daur ulang limbah padat. Standar ini juga menetapkan batasan emisi gas rumah kaca, khususnya emisi CO₂ ekuivalen spesifik.

Dari sisi manajemen, perusahaan diharuskan memiliki kebijakan industri hijau yang disosialisasikan secara efektif, serta membangun organisasi yang mendukung pelaksanaan prinsip ini. Perencanaan strategis meliputi tujuan, sasaran, dan program yang terukur, diikuti dengan pelaksanaan, pemantauan, serta audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Selain itu, perusahaan juga diharapkan berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial melalui program CSR yang relevan dengan lingkungan sosial, serta menyediakan fasilitas dan program untuk mendukung ketenagakerjaan. Semua ketentuan ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan operasional industri baja lembaran lapis sesuai prinsip industri hijau.

D. Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing

Di Kabupaten Demak, terdapat sejumlah industri hasil peternakan yang termasuk dalam kategori Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing (SIH 15112.1:2019). Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing (SIH 15112.1:2019) mencakup persyaratan teknis dan manajemen yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan operasional industri. Dalam hal bahan baku, standar ini mengatur penggunaan kulit sebagai bahan utama, termasuk spesifikasinya, penanganannya, kadar air dan garam, serta rasio produk terhadap bahan baku. Selain itu, bahan kimia untuk pengolahan kulit diatur terkait jenis, spesifikasi, penanganan, efisiensi penyerapan krom dalam proses *wet blue*, dan kandungannya. Energi yang digunakan harus memenuhi efisiensi tertentu



berdasarkan konsumsi per produk kulit jadi, sementara air juga diukur penggunaannya per produk jadi.

Proses produksi harus didukung oleh SOP yang jelas, serta diagram proses seperti PFD atau BFD. Produk akhir wajib memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, dan kemasan yang digunakan berupa pelat kayu atau plastik PP. Pengelolaan limbah meliputi pengolahan limbah cair, emisi gas buang, udara, limbah B3, dan limbah padat, dengan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan. Emisi gas rumah kaca, khususnya CO₂, juga diatur dalam standar ini.

Dari sisi manajemen, perusahaan diharapkan memiliki kebijakan industri hijau yang disosialisasikan secara efektif dan didukung oleh organisasi yang terstruktur. Perencanaan strategis meliputi tujuan, sasaran, dan program yang dirancang dengan baik, serta pelaksanaan dan pemantauan yang konsisten. Tinjauan manajemen dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar teknis dan manajemen yang berlaku. Selain itu, perusahaan diharapkan berperan dalam tanggung jawab sosial melalui program CSR yang mendukung lingkungan sosial serta menyediakan fasilitas yang mendukung ketenagakerjaan. Semua aspek ini dirancang untuk memastikan industri penyamakan kulit beroperasi secara berkelanjutan sesuai prinsip industri hijau.

4. READINESS CRITERIA KABUPATEN DEMAK

Penetapan kriteria kesiapan (readiness criteria) bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dan penerapan prinsip industri hijau di Kabupaten Demak. Kriteria ini memastikan kesiapan daerah untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pengelolaan industri ramah lingkungan. Fokus utama kriteria kesiapan di Kabupaten Demak adalah keberlanjutan sumber daya lokal, termasuk pengelolaan bahan baku, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah sesuai standar nasional. Industri di daerah ini, seperti baja, tekstil, dan penyamakan kulit, diwajibkan mematuhi Standar Industri Hijau (SIH) yang mencakup aspek teknis dan manajemen.



Tabel 4 Hasil Analisis Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

Aspek Internal	Bobot	Rating	Nilai
Kekuatan (<i>Strength</i>)			
Ada Kebijakan dan Regulasi Pemprov (Oerda RPIP) dan Pemkab (Perda RPIK)	0,14	3	0,42
Ada program dan kegiatan OPD lintas sektoral terkait industri hijau	0,13	2	0,26
Ada laporan kegiatan terkait industri hijau	0,15	0	0
Ada lembaga sertifikasi industri hijau	0,14	4	0,56
Ada program penilaian kinerja industri hijau (PROPER)	0,13	0	0
Kelemahan (<i>Weakness</i>)			
Sinergitas kegiatan antar OPD dan industri belum optimal	0,08	2	0,16
Daya saing industri rendah	0,05	0	0
Pengetahuan dan kesadaran pentingnya industri hijau masih rendah	0,07	2	0,14
Tergantung pemerintah pusat	0,06	2	0,12
Dana intensif masih rendah	0,05	2	0,1

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Kekuatan utama dalam pengembangan industri hijau di Kabupaten Demak terletak pada kebijakan dan regulasi yang mendukung, dari tingkat provinsi hingga kabupaten, serta adanya program lintas sektoral yang dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lembaga sertifikasi industri hijau dan program penilaian kinerja seperti PROPER juga memberikan kontribusi signifikan, meskipun implementasinya belum optimal. Namun, absennya pelaporan konsisten terkait industri hijau dan kurangnya koordinasi lintas OPD menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Kelemahan utama adalah rendahnya daya saing industri lokal dan rendahnya pengetahuan serta kesadaran pelaku industri tentang pentingnya industri hijau. Ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat juga menghambat keberlanjutan industri hijau. Selain itu, rendahnya dana insentif menjadi hambatan krusial dalam mendukung inisiatif ini. Untuk itu, langkah strategis diperlukan untuk meningkatkan pendanaan dan kolaborasi dengan sektor swasta agar industri hijau dapat berkembang secara berkelanjutan.

Tabel 5 Hasil Analisis Matriks *External Factor Evaluation* (EFE)

Aspek Eksternal	Bobot	Rating	Nilai
Peluang (<i>Opportunities</i>)			
Komitmen Kepala Daerah besar terkait industri hijau	0,14	4	0,42
Ada regulasi industri hijau	0,13	0	0
Ada alokasi anggaran program industri hijau	0,11	(data blm terkonfirmasi)	-
Ada dukungan forum CSR	0,13	(data blm terkonfirmasi)	-
Ada juknis industri hijau bagi daerah	0,14	4	0,42

Aspek Eksternal	Bobot	Rating	Nilai
Tantangan (Threats)			
Pergantian pejabat/penanggung jawab program	0,08	(data blm terkonfirmasi)	-
Kesadaran masyarakat rendah terkait industri hijau	0,07	2	0,14
Kendala geografis dan akses informasi	0,06	(data blm terkonfirmasi)	-
Kebiasaan membuang sampah dan limbah sembarangan	0,07	(data blm terkonfirmasi)	-
Persoalan Kesehatan lingkungan	0,06	(data blm terkonfirmasi)	-

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Matriks *External Factor Evaluation* (EFE) digunakan untuk mengevaluasi pengaruh faktor eksternal terhadap program industri hijau. Matriks ini menilai peluang dan tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program. Peluang besar, seperti komitmen kepala daerah dan adanya petunjuk teknis industri hijau, mendapatkan nilai tinggi, sementara beberapa peluang seperti alokasi anggaran dan dukungan forum CSR belum terkonfirmasi.

Tantangan utama termasuk rendahnya kesadaran masyarakat terhadap industri hijau, dengan nilai rendah, serta kendala birokrasi, geografis, dan kebiasaan buruk dalam pengelolaan limbah. Matriks EFE menunjukkan bahwa meskipun peluang besar, tantangan yang terkait dengan faktor sosial, lingkungan, dan birokrasi perlu segera diatasi. Strategi yang tepat diperlukan untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan agar industri hijau dapat berkembang berkelanjutan.

5. **STAKEHOLDER MAPPING PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU KABUPATEN DEMAK**

Stakeholder mapping merupakan langkah penting dalam pengembangan Grand Design Industri Hijau di Kabupaten Demak untuk memastikan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak.

A. **Kuadran Stakeholder**

Berikut adalah penjelasan umum dari masing-masing kuadran dalam konteks pengembangan industri hijau:

1. **High Power - High Interest**

Stakeholder dalam kategori ini memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan industri hijau dan juga memiliki minat yang tinggi terhadap proyek tersebut. Mereka harus diutamakan dalam pengambilan keputusan dan dilibatkan secara intensif, misalnya melalui konsultasi rutin.

2. High Power - Low Interest

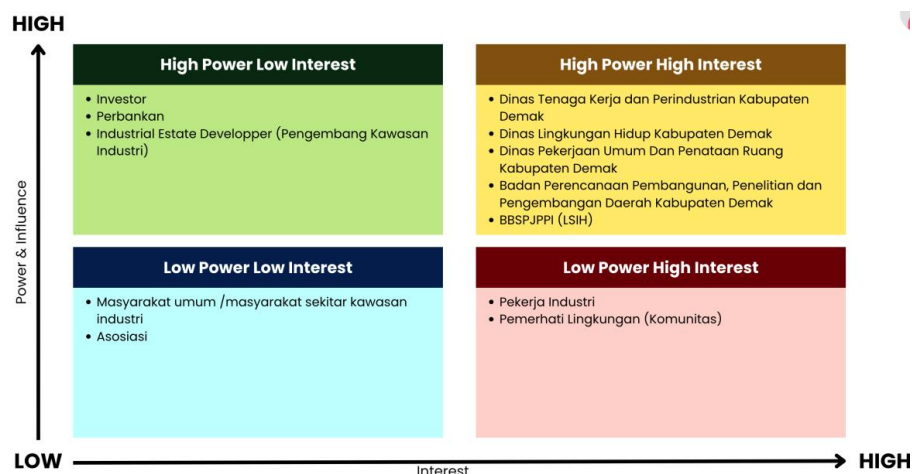
Stakeholder dengan pengaruh besar tetapi minat mereka terhadap proyek mungkin rendah. Upaya harus difokuskan pada menjaga hubungan baik dan memastikan mereka tetap mendukung proyek meski keterlibatan mereka minimal.

3. Low Power - High Interest

Stakeholder ini tidak memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi hasil, tetapi mereka sangat peduli terhadap keberhasilan proyek. Mereka dapat menjadi agen perubahan dan dikerahkan untuk mendukung implementasi proyek di tingkat masyarakat.

4. Low Power - Low Interest

Stakeholder ini memiliki pengaruh yang kecil dan tidak terlalu tertarik pada proyek. Fokus pada kategori ini dapat diminimalkan, tetapi mereka tetap perlu diperhatikan untuk menjaga kesinambungan.



Gambar 7 Stakeholder Kunci Iklim Industri Hijau Kabupaten Demak

Sumber: Tim Penyusun, 2024

B. Kesesuaian Program berbasis OPD

Setelah *Stakeholder Mapping* untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Industri Hijau di Kabupaten Demak, langkah selanjutnya adalah memperkuat dan memperluas peran masing-masing stakeholder, terutama di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan program-program OPD dengan tujuan pengembangan Industri Hijau, mengacu pada Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD. Beberapa OPD kunci yang terlibat adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU), dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (DINAKERIND), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam memastikan kriteria Industri Hijau terpenuhi.

Tabel 6 Matriks Program Pengembangan Industri Hijau Kabupaten Demak

No	Kesesuaian Parameter	Program / Kegiatan	Stakeholder (OPD internal)
Sumber Daya Alam			
1	Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat mengenai: a. Bahan Baku b. Bahan Penolong	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2		Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	
3		Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	
4		Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	
5		Konservasi sumber daya alam terbarukan	
6		Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	
7		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri	
8	Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat mengenai limbah	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>); dan pemulihan (<i>recovery</i>)	- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Dinas Lingkungan Hidup
9	Parameter Penunjang	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Pengelolaan Lingkungan			
1	Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat mengenai: a. Limbah b. Emisi Gas Rumah Kaca	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dinas Lingkungan Hidup
2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
3		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
4		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
5		Penyimpanan Sementara Limbah B3	
6		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	
7		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
8		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
9	Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat mengenai Proses Produksi	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Dinas Lingkungan Hidup
Energi			
1	Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat mengenai Energi	Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2		Pengembangan sumber energi yang terbarukan	
3		Diversifikasi dan konservasi energi	
4		Pengembangan industri pendukung pembangkit energi	

No	Kesesuaian Parameter	Program / Kegiatan	Stakeholder (OPD internal)
Infrastruktur			
1	Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat mengenai Air	Peningkatan jaringan air untuk industri	- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Parameter Penunjang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
4		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
Pengembangan Industri			
1	Berkenaan dengan keseluruhan proses bisnis industri hijau	Pembinaan Standar Industri Hijau	- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2		Pemberian fasilitas untuk Industri Hijau	
3	Parameter Penunjang	Koordinasi OPD terkait penyelesaian aspek aspek yang terkait pertanahan	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4		Memberikan kemudahan dalam pengadaan lahan industri	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5		Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra IKM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kesesuaian RTRW			
1	Parameter Penunjang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2		Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
3		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

C. Telaah Peran Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI)

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) memainkan peran kunci dalam mendukung industri berkelanjutan di Indonesia dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan industri dalam mengimplementasikan praktik ramah lingkungan. Sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, BBSPJPPI menawarkan layanan pengembangan standar, pelatihan, dan konsultasi teknis untuk memastikan efisiensi energi dan pengelolaan limbah di sektor industri. Selain itu, BBSPJPPI juga menyediakan layanan laboratorium untuk analisis kualitas lingkungan.

BBSPJPPI mendorong penerapan industri hijau dengan mengembangkan standar yang mencakup penggunaan bahan baku terbarukan, teknologi bersih, dan pengelolaan limbah. Mereka juga memberikan pelatihan, konsultasi, serta mendukung riset dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, BBSPJPPI berperan dalam transformasi industri menuju keberlanjutan dan meningkatkan daya saing global.

Dalam wawancara dengan pihak BBSPJPPI, terungkap peran mereka dalam sertifikasi industri hijau yang memastikan operasional industri memenuhi kriteria keberlanjutan. Sertifikasi ini membantu industri meningkatkan daya saing dan mendukung pencapaian tujuan pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri berkelanjutan. Wawancara juga membahas pandangan narasumber mengenai strategi, tantangan, dan rekomendasi untuk pengembangan industri hijau di Kabupaten Demak.

Sebagai Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH), BBSPJPPI bertanggung jawab untuk menerbitkan Sertifikat Industri Hijau (SIH), namun tanggung jawab ini juga melibatkan 12 balai besar lainnya sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3065 Tahun 2024. Sertifikasi ini bersifat sukarela, sehingga industri yang menginginkannya harus mengajukan secara mandiri tanpa kewajiban hukum. Saat ini, tidak ada industri di Kabupaten Demak yang memperoleh SIH, meski



BBSPJPPI memberikan pendampingan teknis untuk membantu industri memenuhi standar industri hijau. Namun, belum terjalin kerja sama formal antara Pemerintah Kabupaten Demak dan BBSPJPPI, meskipun ada kolaborasi dengan Dinperindag Jawa Tengah pada tingkat provinsi.

Kendala utama dalam sertifikasi industri hijau adalah belum adanya mekanisme insentif dan disinsentif yang jelas. Saat ini, penghargaan untuk industri yang telah memperoleh SIH hanya berupa pengakuan, tanpa ada keuntungan materi atau fiskal. Kementerian Perindustrian sedang menyusun peraturan terkait pemberian insentif yang diharapkan dapat mendorong partisipasi industri. Selain itu, standar yang lebih menargetkan industri besar menyebabkan industri kecil dan menengah (IKM) belum sepenuhnya terakomodasi.

Tantangan lain yang dihadapi BBSPJPPI adalah rendahnya kesadaran pelaku industri terhadap manfaat dan urgensi sertifikasi. Karena sifatnya yang sukarela, banyak industri yang belum mengutamakan proses ini. Kurangnya aturan insentif yang jelas membuat industri enggan berinvestasi untuk memperoleh SIH. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan menyediakan insentif yang menarik menjadi langkah penting untuk mendorong implementasi industri hijau.

Untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam mendukung industri hijau, BBSPJPPI menyarankan pemetaan data yang menyeluruh. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk merancang program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan industri lokal, sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan lebih efektif dalam mendorong partisipasi pelaku industri dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor industri.



ROADMAP PEMBANGUNAN INDUSTRI HIJAU 2025-2045

Roadmap ini bertujuan untuk memberikan panduan strategis pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak dalam periode 20 tahun, yang terbagi ke dalam lima tahapan lima tahunan.

5. TAHAP 1: FONDASI DAN KESADARAN (2025-2030)

A. Tujuan Utama:

- 3) Membangun kesadaran akan pentingnya industri hijau.
- 4) Memulai pengembangan regulasi dan infrastruktur dasar.

B. Strategi:

- 1) Kebijakan dan Regulasi:
 - a) Penyusunan peraturan daerah tentang industri hijau sekaligus pengesahan terhadap Regulasi Peraturan Rencana Industri Kabupaten Demak
 - b) Insentif untuk pelaku usaha yang beralih ke proses produksi ramah lingkungan.
- 2) Penguatan Kapasitas:
 - a) Pelatihan dan sosialisasi terkait teknologi ramah lingkungan.
 - b) Kerjasama dengan akademisi dan lembaga penelitian untuk inovasi teknologi hijau.
 - c) Melakukan Kerjasama dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dalam hal sertifikasi dan standardisasi
 - d) Melakukan Audit Energi dan evaluasi terhadap Dokumen PROPER Industri
 - e) Melakukan audiensi dan kolaborasi dengan ESDM dan KLHK terkait sistem produksi
 - f) Kolaborasi pendanaan dengan NGO
 - g) Ausiensi dan fasilitasi dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) bagi fasilitasi IKM Hijau
 - h) Kolaborasi dengan Bank Indonesia bagi fasilitasi IKM Hijau

- 3) Infrastruktur:
 - a) Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah industri.
 - b) Penyediaan energi terbarukan skala kecil, seperti PLTS untuk kawasan industri.
- 4) Partisipasi Masyarakat berupa kampanye edukasi publik tentang pentingnya produk ramah lingkungan.

6. TAHAP 2: IMPLEMENTASI AWAL DAN PILOT PROJECT (2030-2035)

A. Tujuan Utama:

- 3) Mewujudkan proyek percontohan industri hijau.
- 4) Mendorong adopsi teknologi hijau oleh industri kecil dan menengah (IKM).

B. Strategi:

- 1) Pilot Project:
 - a) Peluncuran kawasan industri hijau percontohan di Kabupaten Demak.
 - b) Pendampingan untuk IKM dalam penerapan standar industri hijau.
- 2) Infrastruktur dan Teknologi:
 - a) Peningkatan kapasitas PLTS, biogas, dan sumber energi terbarukan lainnya.
 - b) Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu untuk kawasan industri.
- 3) Kerjasama:
 - a) Bermitra dengan sektor swasta dan investor untuk pembiayaan teknologi hijau.
 - b) Membangun kolaborasi internasional untuk transfer teknologi.

7. TAHAP 3: AKSELERASI DAN EKSPANSI (2035-2040)

A. Tujuan Utama:

- 3) Meningkatkan skala penerapan industri hijau.

- 4) Menjadikan Demak sebagai pusat inovasi industri hijau di Jawa Tengah.

B. Strategi:

- 1) Ekspansi:
 - a) Perluasan kawasan industri hijau.
 - b) Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan teknologi hijau.
- 2) Riset dan Pengembangan:
 - a) Pendirian pusat penelitian dan inovasi industri hijau.
 - b) Insentif untuk riset terkait bahan baku lokal yang ramah lingkungan.
- 3) Digitalisasi:
 - a) Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi proses produksi dan distribusi.
 - b) Sistem monitoring online untuk kepatuhan lingkungan oleh industri.

8. TAHAP 4: PEMANTAPAN DAN INTEGRASI (2040-2045)

A. Tujuan Utama:

- 3) **Mencapai keberlanjutan penuh dalam sektor industri hijau.**
- 4) **Integrasi industri hijau dengan ekonomi lokal dan regional.**

B. Strategi:

- 1) Keberlanjutan:
 - a) Standarisasi semua proses industri di Kabupaten Demak sesuai dengan standar hijau nasional dan internasional.
 - b) Implementasi ekonomi sirkular di seluruh sektor industri.
- 2) Integrasi Ekonomi:
 - a) Meningkatkan ekspor produk industri hijau.
 - b) Membangun ekosistem industri hijau yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan pariwisata.
- 3) Evaluasi dan Adaptasi:
 - a) Evaluasi menyeluruh terhadap capaian roadmap.
 - b) Penyesuaian strategi berdasarkan tantangan dan peluang baru.

9. INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk memastikan pencapaian pembangunan Industri Hijau yang berkelanjutan di Kabupaten Demak, diperlukan indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan relevan. *Key Performance Indicator* (KPI) disusun agar dapat digunakan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi kinerja dan keberhasilan program pada jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. KPI ini dirancang agar mampu menjawab target pembangunan Industri Hijau secara holistik, meliputi aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola.

A. Indikator Jangka Pendek (2025–2030):

Fokus pada pembangunan fondasi dan kesadaran industri hijau. Indikatornya meliputi:

- 1) Regulasi dan Kebijakan: Perda tentang Industri Hijau dan penerapan insentif fiskal.
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan dan sertifikasi teknologi hijau, serta peningkatan tenaga kerja terlatih sebesar 15%.
- 3) Infrastruktur Hijau: Fasilitas pengelolaan limbah terpadu dan penggunaan energi terbarukan 20%.

B. Indikator Jangka Menengah (2031–2038):

Fokus pada percepatan implementasi dan penguatan ekosistem industri hijau. Indikatornya meliputi:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi Hijau: Peningkatan kontribusi industri hijau terhadap PDRB 10% per tahun, dan investasi sektor hijau 25%.
- 2) Teknologi dan Inovasi: 50% IKM mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan produksi barang ramah lingkungan 30%.
- 3) Efisiensi Sumber Daya: Penurunan penggunaan energi konvensional 25% dan pengurangan emisi karbon 30%.

C. Indikator Jangka Panjang (2039–2045):

Fokus pada keberlanjutan penuh penerapan industri hijau. Indikatornya meliputi:



- 1) Keberlanjutan Lingkungan: IKLH Kabupaten Demak skor 85+, dan 100% energi terbarukan di kawasan industri prioritas.
- 2) Dampak Sosial: Pengurangan pengangguran 50% dan peningkatan IPM mencapai 80.
- 3) Tata Kelola Berkelanjutan: Digital monitoring untuk kepatuhan industri dan Demak diakui sebagai model pengelolaan industri hijau.

D. Evaluasi dan Monitoring:

- 1) Jangka Pendek: Evaluasi tahunan.
- 2) Jangka Menengah: Evaluasi lima tahunan.
- 3) Jangka Panjang: Evaluasi akhir untuk menilai pencapaian Grand Desain 2045.

Indikator ini membantu memastikan keberhasilan pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak.

KESIMPULAN

Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak 2025–2045 mengarah pada pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada prinsip ramah lingkungan. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa Kabupaten Demak masih menghadapi tantangan terkait kesiapan mendasar yang belum sepenuhnya terpenuhi. Beberapa poin penting dari kesimpulan ini adalah:

1. Ketersediaan Infrastruktur Dasar: Infrastruktur untuk industri hijau, seperti energi bersih dan pengelolaan limbah, perlu dikembangkan lebih lanjut untuk menarik investasi.
2. Regulasi dan Kebijakan Penunjang: Kabupaten Demak belum memiliki regulasi lokal yang mendukung industri hijau, mengurangi daya tarik investasi di teknologi ramah lingkungan.
3. Kurangnya Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan: Tidak ada mekanisme koordinasi sistematis antara pemerintah, industri,



masyarakat, dan lembaga terkait, sehingga program berjalan tidak terkoordinasi.

4. Minimnya Panduan Teknis: Panduan teknis tentang industri hijau, seperti pengelolaan limbah dan efisiensi energi, belum jelas, menyulitkan pelaku industri.
5. Belum Optimalnya Pengawasan dan Evaluasi: Sistem monitoring dan evaluasi untuk industri hijau belum terbentuk, sehingga capaian program tidak terukur.
6. Keterbatasan Pendukung Tata Kelola: Kurangnya kapasitas SDM, teknologi, dan infrastruktur mendukung pembentukan tata kelola industri hijau yang sistematis.
7. Kesadaran dan Dukungan Sosial: Kesadaran terhadap industri hijau perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi untuk mendorong partisipasi.
8. Akses Pendanaan Hijau: Akses terbatas ke pendanaan hijau menghambat akselerasi pembangunan industri berkelanjutan.

Langkah strategis yang perlu diambil mencakup penguatan data profil industri, pengembangan infrastruktur hijau, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan regulasi yang mendukung, serta peningkatan kolaborasi dengan swasta dan lembaga pendanaan.

REKOMENDASI

Dengan tata kelola sistematis, Kabupaten Demak akan memiliki fondasi yang kuat untuk pembangunan industri hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan sesuai visi Grand Desain 2025–2045. Untuk mengatasi kendala, langkah-langkah berikut diperlukan:

7. Penyusunan Regulasi Daerah: Membuat peraturan daerah yang mengatur tata kelola industri hijau, termasuk kebijakan, prosedur teknis, dan indikator kinerja.



8. Pembentukan Lembaga Koordinasi: Mendirikan forum koordinasi untuk menyinergikan program dan kebijakan antar pemangku kepentingan.
9. Penyediaan Panduan Teknis: Menyusun panduan teknis untuk pelaku industri dalam menerapkan praktik hijau sesuai standar.
10. Pembangunan Sistem Pengawasan: Membangun sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau kepatuhan industri terhadap prinsip hijau.
11. Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi: Menyediakan pelatihan dan akses teknologi hijau untuk memperkuat implementasi tata kelola industri hijau.

Aspek penting lainnya dalam rekomendasi ini adalah Koordinasi dan Kolaborasi untuk mencapai komitmen Industri Hijau di Kabupaten Demak. Langkah strategis yang diperlukan mencakup membangun hubungan sinergis dengan lembaga sertifikasi, NGO, dan melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen *Buku Kajian Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak* ini dapat disusun dan diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis untuk mendukung pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak, sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup.

Dalam era yang semakin menuntut keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, pembangunan industri hijau menjadi prioritas penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk:

1. **Merumuskan arah kebijakan** yang mendukung pengembangan industri berbasis teknologi ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya.
2. **Mendorong sinergi lintas sektor** untuk menciptakan ekosistem industri yang mendukung pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah yang baik, serta konservasi energi.
3. **Mengidentifikasi potensi lokal** Kabupaten Demak sebagai dasar pengembangan industri hijau berbasis komunitas dan sumber daya lokal.
4. **Menyusun peta jalan (roadmap)** pembangunan industri hijau yang berkelanjutan, termasuk integrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.

Kajian ini juga memberikan penekanan pada implementasi regulasi yang relevan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung transformasi menuju industri hijau.



Kami menyadari bahwa penyusunan kajian ini tidak terlepas dari dukungan dan masukan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, baik dari instansi pemerintah, akademisi, pelaku industri, maupun masyarakat yang telah memberikan kontribusi berarti selama proses penyusunan dokumen ini.

Kami berharap *Buku Kajian Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak* ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan global.

Demak, November 2024

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

POLICY BRIEF	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB - 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN.....	5
1.2.1 Maksud.....	5
1.2.2 Tujuan	5
1.2.3 Sasaran	6
1.3 RUANG LINGKUP	6
1.4 DASAR HUKUM.....	7
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN KAJIAN	8
BAB - 2 KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	9
2.1 KONSEP INDUSTRI	9
2.1.1 Industri.....	9
2.1.2 Kawasan Industri.....	11
2.2 INDUSTRI HIJAU	13
2.2.1 Industri Hijau.....	13
2.2.2 Standar Industri Hijau	15
2.2.3 Sertifikasi Industri Hijau	17
2.2.4 Penilaian Industri Hijau	18
2.3 KONDISI EMPIRIS KABUPATEN DEMAK.....	43
2.3.1 Kondisi Geografi	43
2.3.2 Kondisi Topografi	46

2.3.3	Kondisi Geologi dan Jenis Tanah	46
2.3.4	Kondisi Hidrologi.....	47
2.3.5	Kondisi Demografi	49
2.3.6	Kawasan Industri Kabupaten Demak.....	53
BAB - 3METODOLOGI		58
3.1	PENDEKATAN PEKERJAAN	58
3.2	KERANGKA PIKIR.....	59
3.3	TAHAP PERSIAPAN.....	60
3.4	TAHAP PENGUMPULAN DATA.....	62
3.4.1	Mekanisme Pengumpulan Data.....	62
3.4.2	Kebutuhan Data	63
3.5	KOMPONEN ANALISIS.....	63
3.5.1	Identifikasi Industri Kabupaten Demak.....	63
3.5.2	Analisis Kesesuaian Parameter Industri Hijau.....	64
3.5.3	Analisis Stakeholder Mapping.....	65
3.5.4	Analisis SWOT (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats</i>)	67
3.5.5	Analisis <i>Internal/Eksternal Factor Evaluation</i>	69
3.6	JADWAL PELAKSANAAN.....	71
BAB - 4ANALISIS DAN PEMBAHASAN		73
4.1	IDENTIFIKASI PROFIL INDUSTRI KABUPATEN DEMAK.....	73
4.1.1	Industri Besar.....	76
4.1.2	Industri Menengah.....	82
4.1.3	Industri Kecil	85
4.1.4	Profil Industri Kabupaten Demak	94
4.2	ANALISIS KESESUAIAN PARAMETER INDUSTRI HIJAU KABUPATEN DEMAK	97
4.2.1	Standar Industri Hijau untuk Industri atau Kantong Tas Belanja Plastik dan Bioplastik	98
4.2.2	Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat	103

4.2.3	Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis.....	107
4.2.4	Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing	111
4.2.5	Perbedaan Persyaratan Teknis Dan Manajemen pada Sertifikasi Industri Hijau.....	115
4.3	READINESS CRITERIA KABUPATEN DEMAK	117
4.4	STAKEHOLDER MAPPING PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU KABUPATEN DEMAK.....	121
4.4.1	Kuadran Stakeholder.....	121
4.4.2	Langkah Implementasi	123
4.4.3	Telaah Peran Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI)	126
4.4.4	Kesesuaian Program berbasis OPD	133
BAB - 5ROADMAP PEMBANGUNAN INDUSTRI HIJAU 2025-2045.....		136
5.1	TAHAP 1: FONDASI DAN KESADARAN (2025-2030)	136
5.1.1	Tujuan Utama:.....	136
5.1.2	Strategi:	136
5.2	TAHAP 2: IMPLEMENTASI AWAL DAN PILOT PROJECT (2030-2035)	137
5.2.1	Tujuan Utama:.....	137
5.2.2	Strategi:	137
5.3	TAHAP 3: AKSELERASI DAN EKSPANSI (2035-2040)	138
5.3.1	Tujuan Utama:.....	138
5.3.2	Strategi:	138
5.4	TAHAP 4: PEMANTAPAN DAN INTEGRASI (2040-2045)	139
5.4.1	Tujuan Utama:.....	139
5.4.2	Strategi:	139
5.5	INDIKATOR KEBERHASILAN.....	139
5.5.1	Indikator Jangka Pendek (2025–2030)	140
5.5.2	Indikator Jangka Menengah (2031–2038)	141
5.5.3	Indikator Jangka Panjang (2039–2045)	141

5.5.4	Evaluasi dan Monitoring	142
BAB - 6	PENUTUP	143
6.1	KESIMPULAN	143
6.2	REKOMENDASI.....	145

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengkategorian Industri	18
Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Industri Besar	19
Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Industri Sedang.....	27
Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Industri Kecil	35
Tabel 2.5 Skoring Industri Besar	40
Tabel 2.6 Skoring Industri Menengah.....	41
Tabel 2.7 Skoring Industri Kecil	42
Tabel 2.8 Klasifikasi Industri Hijau	42
Tabel 2.9 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Demak	44
Tabel 2.10 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak	49
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	52
Tabel 2.12 Kawasan Industri eksisiting di Jawa Tengah.....	54
Tabel 2.13 Kawasan Industri Rencana Kabupaten Demak.....	56
Tabel 3.1 Kebutuhan Data	63
Tabel 3.2 Matriks <i>Internal Factor Evaluation</i> (IFE)	70
Tabel 3.3 Matriks <i>External Factor Evaluation</i> (EFE).....	70
Tabel 3.4 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	71
Tabel 4.1 Jenis Industri Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020.....	75
Tabel 4.2 Daftar Industri Besar Kabupaten Demak Per Tahun 2024 Menurut Jenis dan Klasifikasi Industri	76
Tabel 4.3 Daftar Industri Menengah Kabupaten Demak Per Tahun 2024 Menurut Jenis dan Klasifikasi Industri	83

Tabel 4.4 Daftar Industri Kecil Kabupaten Demak Per Tahun 2024 Menurut Jenis dan Klasifikasi Industri	86
Tabel 4.5 Pembagian Jenis Industri Kabupaten Demak.....	95
Tabel 4.6 Standar Industri Hijau untuk Industri atau Kantong Tas Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020)	100
Tabel 4.7 Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2023).....	104
Tabel 4.8 Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023)	108
Tabel 4.9 Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing (SIH 15112.1:2019)	112
Tabel 4.10 Ilustrasi Perbedaan Aspek dan Kriteria Persyaratan Teknis dan Persyaratan Manajemen pada Sertifikasi Industri Hijau	115
Tabel 4.11 Hasil Analisis Matriks <i>Internal Factor Evaluation</i> (IFE)	118
Tabel 4.12 Hasil Analisis Matriks <i>External Factor Evaluation</i> (EFE).....	119
Tabel 4.13 Hasil Wawancara BBSPJPPI	129
Tabel 4.14 Matriks Program Pengembangan Industri Hijau Kabupaten Demak	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Dukungan terhadap Capaian Target Nasional	2
Gambar 2.1 Pedoman Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau	17
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Demak.....	44
Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Demak.....	45
Gambar 2.4 Wilayah Kecamatan dengan Jumlah Penduduk Terbanyak dan Terkecil	51
Gambar 2.5 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2023	51
Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	53
Gambar 2.7 Kawasan Industri Eksisting Kabupaten Demak.....	54
Gambar 2.8 Peta Kawasan Industri Eksisting Kabupaten Demak.....	56
Gambar 3.1 Kerangka Pikir Pekerjaan.....	59
Gambar 3.2 Lingkup Kegiatan Persiapan	60
Gambar 3.3 Standar Industri Hijau.....	65
Gambar 3.4 Stakeholder Mapping	66
Gambar 3.5 Ilustrasi Analisis SWOT	67
Gambar 4.1 Kerangka Alur Pemetaan Industri Kabupaten Demak	74
Gambar 4.2 Jenis Industri Skala Besar di Kabupaten Demak Per Tahun 2024	82
Gambar 4.3 Jenis Industri Skala Menengah di Kabupaten Demak Per Tahun 2024	85
Gambar 4.4 Jenis Industri Skala Kecil di Kabupaten Demak Per Tahun 2024	94
Gambar 4.5 Pembagian Jenis Industri Kabupaten Demak	97
Gambar 4.6 Stakeholder Kunci Iklim Industri Hijau Kabupaten Demak.....	123

BAB - 1

PENDAHULUAN

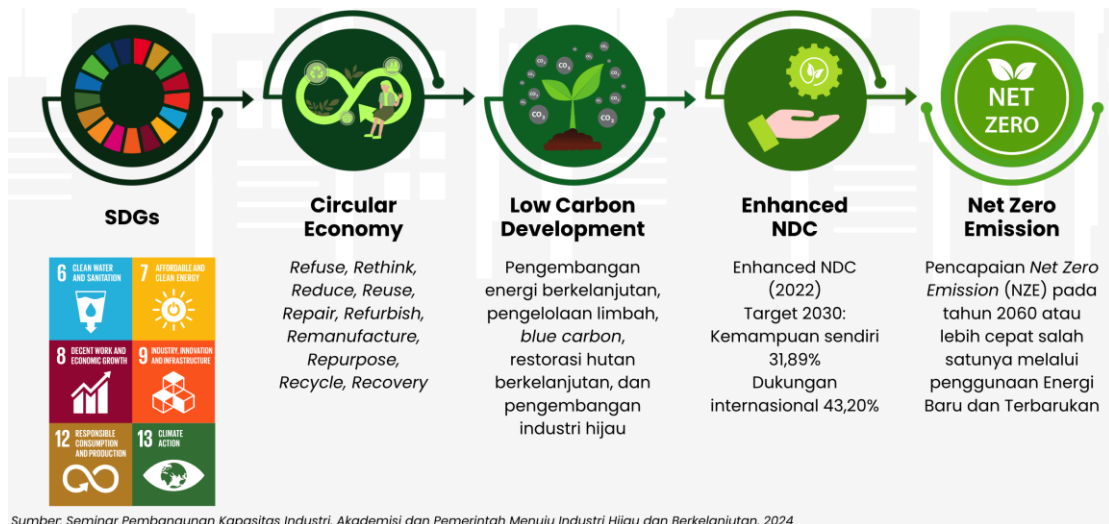
Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang kajian, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan hukum, serta sistematika penyusunan kajian

1.1 LATAR BELAKANG

Industri di Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir, memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Namun, perkembangan ini sering kali tidak memperhatikan dampak lingkungan, yang mengakibatkan masalah serius seperti polusi udara, pencemaran air, dan pengelolaan limbah yang buruk. Kondisi ini mendorong perlunya strategi pembangunan industri yang lebih berkelanjutan.

Dengan industrialisasi yang semakin meningkat, tantangan menjaga kelestarian lingkungan menjadi semakin mendesak. Banyak industri di Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca serta limbah yang mencemari air dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah berkomitmen mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Paris Agreement*, yang menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 29% pada tahun 2030. Selain itu, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pengelolaan lingkungan dan efisiensi energi terus didorong agar industri di Indonesia lebih ramah lingkungan.





Gambar 1.1 Dukungan terhadap Capaian Target Nasional

Sumber: Seminar Pembangunan Kapasitas Industri, Akademisi dan Pemerintah Menuju Industri Hijau dan Berkelanjutan, 2024

Sektor industri, sebagai salah satu kontributor terbesar emisi karbon, mulai mengadopsi teknologi yang lebih ramah lingkungan. Industri tekstil, otomotif, dan elektronik, misalnya, telah beralih ke teknologi yang lebih efisien dalam penggunaan energi dan air serta mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Beberapa perusahaan besar bahkan sudah berinvestasi dalam sistem energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sejalan dengan tuntutan global akan produk-produk yang lebih berkelanjutan.

Selain adopsi teknologi hijau, Indonesia juga mulai serius mengembangkan industri energi terbarukan, dengan fokus pada energi surya, angin, dan biomassa. Investasi dalam sektor ini tidak hanya bertujuan mengurangi emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin di beberapa daerah, menunjukkan komitmen Indonesia dalam memajukan energi hijau. Bahkan, sektor kelapa sawit mulai memanfaatkan limbah untuk menghasilkan biomassa dan biogas sebagai energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Upaya mengkonversikan aktivitas industri yang dalam proses produksinya menjadi lebih memperhatikan kelestarian fungsi- fungsi lingkungan hidup inilah yang selanjutnya disebut dengan industri hijau. Industri hijau juga mempunyai

manfaat di antaranya, mengurangi biaya operasi termasuk penghematan energi dan air, menghemat sumber daya alam yang terbatas, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menjaga keseimbangan ekosistem mendorong pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, dan memperbaiki kualitas hidup manusia mengurangi dampak negatif pembangunan industri terhadap lingkungan, masyarakat dan meningkatkan desain produk daripada industri di pasar global nantinya. Upaya konversi ini juga telah diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau.

Dukungan akan pembangunan iklim industri hijau juga telah dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Pembangunan Industri Hijau bertujuan untuk mewujudkan Industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Lingkup pembangunan industri hijau meliputi standardisasi industri hijau dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Telaah lebih lanjut dilakukan pada aspek perencanaan nasional yang terumuskan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 dimana wilayah Jawa diandalkan untuk mendorong pertumbuhan industri baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Pertumbuhan industri di wilayah Jawa ini juga diperkuat dengan penetapan koridor "Industri Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi" yang salah satunya diperkuat oleh Pengembangan industri hijau ramah lingkungan seperti pengembangan industri kimia hijau (*green chemistry*), dan teknologi nano hijau (*green nanotechnology*), didukung dengan pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*). Pengembangan industri hijau diarahkan pada lokasi pesisir dan pelabuhan.



Kabupaten Demak merupakan salah satu wilayah kabupaten di pesisir utara Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi besar dalam sektor industri. Berdasarkan data mengenai capaian PDRB ADHB Kabupaten Demak 2023, industri pengolahan menjadi sektor yang memiliki kontribusi perekonomian terbesar di wilayah kabupaten dengan capaian 31,73% dan kemudian diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Kabupaten Demak sebagai salah satu objek pengembangan kawasan industri prioritas Provinsi Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RTRW. Selain itu, di dalam perda tersebut disebutkan bahwa wilayah Kabupaten Demak menjadi bagian dari kawasan Industri Terpadu bersama dengan Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Demak dari sektor industri menunjukkan peran pentingnya sektor ini dalam perekonomian daerah. Berikut adalah gambaran umum kontribusi PDRB sektor industri Kabupaten Demak:

1. **Sektor Industri Pengolahan** menjadi salah penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Demak. Industri ini mencakup industri kecil hingga besar seperti pengolahan hasil pertanian, pengolahan kayu, tekstil, dan makanan dan minuman.
2. **Industri Berbasis Pertanian dan Perikanan.** Mengingat Kabupaten Demak memiliki lahan pertanian yang luas dan juga potensi perikanan yang besar. Industri pengolahan hasil pertanian, seperti pengolahan beras dan jagung, serta pengolahan ikan dan hasil laut lainnya menjadi salah satu motor perekonomian daerah.
3. **Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 36,92%.** Sektor industri selain menghasilkan nilai tambah yang tinggi namun juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja
4. **Peran UMKM dalam Sektor Industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)** di Kabupaten Demak yang bergerak di bidang

industri pengolahan (makanan ringan, kerajinan tangan, dan mebel) juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB. Dengan tingginya jumlah UMKM di sektor ini, sektor industri lokal mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi ekonomi daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 mengusung visi "Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan". Tema khusus Industri Hijau Jawa Tengah dapat dipahami sebagai inisiatif yang bertujuan untuk mengembangkan sektor industri yang ramah lingkungan

Melihat adanya potensi industri dan juga arahan pengembangan industri hijau di wilayah Kabupaten Demak, diperlukan adanya suatu acuan pengembangan industri hijau. Perumusan acuan ini akan dikemas dalam suatu dokumen "Grand Desain" dimana didalamnya akan termuat arahan kebijakan serta strategi pembangunan industri yang lebih berkelanjutan.

1.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak ini adalah tersusunnya rencana komprehensif pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak yang sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kondisi pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak secara komprehensif.
2. Mensinkronisasikan, menyelaraskan, dan mengintegrasikan, perencanaan pelaksanaan pembangunan industri hijau baik pada tataran nasional, provinsi dan daerah.



3. Menyusun arah kebijakan serta strategi pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak Tahun 2025 – 2045.

1.2.3 Sasaran

Berikut merupakan sasaran yang akan dicapai pada pelaksanaan penyusunan kajian ini:

1. Tersedianya gambaran pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak secara komprehensif.
2. Terciptanya perencanaan pelaksanaan pembangunan industri hijau yang sinkron, terintegrasi dan selaras baik pada tataran nasional, provinsi dan daerah.
3. Tersusunnya arah kebijakan serta strategi pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak Tahun 2025-2045.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pada penyusunan Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak terdiri atas:

1. Mensinkronisasikan, mengintegrasikan, dan menyelaraskan perencanaan pelaksanaan pembangunan industri hijau baik pada tataran nasional, provinsi dan daerah.
2. Mengidentifikasi jenis industri.
3. Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan penerapan industri hijau.
4. Melakukan analisis kesiapan daerah dalam penerapan industri hijau
5. Menyusun arah kebijakan serta strategi pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2045



1.4 DASAR HUKUM

Pedoman hukum yang menjadi dasar atas kegiatan penyusunan Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa tengah Tahun 2009-2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045.



1.5 SISTEMATIKA PENULISAN KAJIAN

Rangkaian dari kegiatan penyusunan Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak akan dirumuskan dalam sebuah dokumen dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang kajian, maksud, tujuan, sasaran, ruang lingkup, landasan hukum, serta sistematika penyusunan kajian

BAB 2 : KAJIAN TEORI DAN EMPIRIK

Bab ini akan membahas mengenai teori dasar pengembangan industri hijau berserta standar dan pedoman pengembangan industri hijau. Selain itu, akan dikaji pula mengenai kondisi empiris Kabupaten Demak berkaitan dengan pengembangan industri dan kawasan industri agar mampu mengimplementasikan rencana pengembangan industri hijau sesuai dengan kondisi lapangan.

BAB 3 : METODOLOGI

Bagian ini membahas mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penyelesaian kajian ini dimana terdiri atas kerangka pikir, pendekatan pekerjaan, tahapan penyelesaian, serta jadwal pelaksanaan

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisikan analisis serta pembahasan dalam topik grand desain pembangunan industri hijau di wilayah Kabupaten Demak

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dsri analisis yang telah dilakukan serta rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan industri hijau di Kabuapten Demak



BAB - 2

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

Bab ini akan membahas mengenai teori dasar pengembangan industri hijau beserta standar dan pedoman pengembangan industri hijau. Selain itu, akan dikaji pula mengenai kondisi empiris Kabupaten Demak berkaitan dengan pengembangan industri dan kawasan industri agar mampu mengimplementasikan rencana pengembangan industri hijau sesuai dengan kondisi lapangan.

2.1 KONSEP INDUSTRI

2.1.1 Industri

Industri merupakan suatu bentuk kegiatan masyarakat sebagai bagian dari sistem perekonomian atau sistem mata pencahariannya dan merupakan suatu usaha dari manusia dalam menggabungkan atau mengolah bahan-bahan dari sumber daya lingkungan menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia (Hendro, 2000:20-21). Kartasapoetra (1987:6), menyebutkan bahwa industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Alwi, et.al. (2001:431) menyebutkan industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misal mesin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri, Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku



dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri (Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian).

Wigjosoebroto (2004:1) mengklasifikasikan jenis-jenis industri berdasarkan pada aktifitas-aktifitas umum yang dilaksanakan, sebagai berikut:

1. Industri penghasil bahan baku (the primary row-material industri), yaitu industri yang aktifitas produksinya mengolah sumber daya alam guna menghasilkan bahan baku maupun bahan tambahan lainnya yang dibutuhkan oleh industri penghasil produk atau jasa. Industri tipe ini umum dikenal sebagai "ekstrative/ primary industry". Contoh: industri perminyakan, industri pengolah bijih besi, dan lain-lain.
2. Industri manufaktur (the manufacturing industries), adalah industri yang memproses bahan baku guna dijadikan bermacam-macam bentuk/model produk, baik yang berupa produk setengah jadi (semi manufactured) ataupun yang sudah berupa produk jadi (finished goods product). Disini akan terwujud suatu transformasi proses baik secara fisik ataupun kimiawi terhadap input material dan akan memberi nilai tambah yang lebih tinggi terhadap material tersebut. Contoh: industri permesinan, industri mobil, industri tekstil, dan lain-lainnya.
3. Industri penyalur (distribusution industries), adalah industri yang memiliki fungsi untuk melaksanakan proses distribusi baik untuk row material maupun finished goods product. Row materials maupun finished goods product (manufactured goods) akan didistribusikan dari produsen ke produsen yang lain dan dari produsen ke konsumen. Operasi kegiatan ini meliputi aktifitas-

aktivitas buying dan selling, storing, sorting, grading, packaging, dan moving goods (transportasi).

4. Industri pelayanan/jasa (service industries), adalah industri yang bergerak dibidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktivitas industri yang lain maupun langsung memberikan pelayanan/jasa kepada konsumen. Contoh: bank, jasa angkutan, rumah sakit, dan lain-lainnya.

2.1.2 Kawasan Industri

Menurut *National Industrial Zoning Committee's* (USA) 1967, yang dimaksud dengan kawasan industri atau Industrial Estate atau sering disebut dengan Industrial Park adalah suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, ketersediaan semua infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi.

Definisi lain, menurut *Industrial Development Handbook* dari ULI (*The Urban Land Institute*), Washington DC (1975), kawasan industri adalah suatu daerah atau kawasan yang biasanya didominasi oleh aktivitas industri. Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan-peralatan pabrik (industrial plants), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya.

Menurut Marsudi Djojodipuro , kawasan industri (industrial estate) merupakan sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah tersebut minimal dilengkapi dengan jalan



antar kavling, saluran pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.

Berdasarkan padabeberapa pengertian tentang kawasan industritersebut, dapat disimpulkan, bahwa kawasan industri adalah: kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri (Undang-Undang No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian)

Istilah kawasan industri di Indonesia masih relatif baru. Istilah tersebut digunakan untuk mengungkapkan suatu pengertian tempat pemusatan kelompok perusahaan industri dalam suatu areal tersendiri. Kawasan industri dimaksudkan sebagai padanan atas industrial estates. Sebelumnya, pengelompokan industri demikian disebut "lingkungan industri". Beberapa peraturan perundangan yang ada belum menggunakan istilah kawasan industri, seperti: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, belum mengenal istilah-istilah semacam Lingkungan, Zona atau Kawasan industri. Pasal 14 UUPA baru mengamanatkan pemerintah untuk menyusun rencana umum persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah dan baru menyebut sasaran peruntukan tanah yaitu untuk keperluan pengembangan industri, transmigrasi dan pertambangan ayat (1) huruf (e) Pasal 14 UUPA. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, juga belum mengenal istilah "kawasan Industri". Istilah yang digunakan UU No. 5/1984 dalam pengaturan untuk suatu pusat pertumbuhan industri adalah Wilayah Industri.

Di Indonesia pengertian kawasan industri pada awalnya dapat mengacu kepada keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1996. Menurut Keppres tersebut, yang dimaksud dengan kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi



dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri.

2.2 INDUSTRI HIJAU

2.2.1 Industri Hijau

Green industry atau industri hijau adalah sebuah istilah yang dikenal melalui International Conference on Green Industry in Asia di Manila, Filipina tahun 2009, atas kerjasama antara *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO), *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP), *United Nations Environment Programme* (UNEP), *International Labour Organization* (ILO), dan dihadiri 22 negara termasuk Indonesia. Salah satu *output* dari pertemuan tersebut adalah dokumen Manila Declaration on Green Industry in Asia. Dokumen ini merupakan komitmen bersama negara-negara di Asia dalam upaya penanganan masalah lingkungan hidup melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan emisi gas karbon utamanya di sektor industri (Handoko, 2020).

Di Indonesia, kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian bekerja sama dalam usaha menciptakan industri hijau di Indonesia dengan munculnya peraturan-peraturan yang berhubungan dengan industri dan dampak lingkungan. Dalam rapat kerja kementerian industri tahun 2014, dibahas mengenai adalah penataan perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Dalam UU Nomor 3 Tahun 2014, industri hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Industri hijau merupakan bagian



dari “perindustrian” yang disebutkan dalam Pasal 3 UU Nomor 3 Tahun 2014 yaitu *mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta **Industri Hijau***. Untuk mewujudkan Industri Hijau, Pemerintah melakukan:

1. Perumusan kebijakan.
2. Penguatan kapasitas kelembagaan yang meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pengujian;
 - c. sertifikasi; dan
 - d. promosi.
3. Standardisasi.
4. Pemberian fasilitas.

Prinsip penerapan industri hijau pada dasarnya adalah bagaimana suatu industri memulai, berproses dan mengakhiri secara *eco-friendly*/ramah lingkungan, termasuk melakukan pengolahan yang sesuai dengan Batas Mutu Lingkungan – BML dari emisi atau limbah yang dihasilkan. Penerapan industri hijau membawa manfaat bagi korporasi, pemerintah maupun masyarakat, antar lain meningkatkan profitabilitas melalui peningkatan efisiensi sehingga dapat mengurangi biaya operasi, pengurangan biaya pengelolaan limbah dan tambahan pendapatan dari produk hasil samping, meningkatkan image perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, mempermudah akses pendanaan, fleksibilitas dalam regulasi, terbukanya peluang pasar baru, menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Dalam perancangan industri hijau tidak lepas dari proses perancangan produk hingga perancangan pabrik yang disusun menggunakan standarisasi. Standarisasi ini disebut sebagai standar industri hijau (SIH) yang dibahas di bawah ini (Handoko, 2020).

2.2.2 Standar Industri Hijau

Setiap tahapan proses dalam industri diperlukan indikator-indikator yang terukur untuk memenuhi persyaratan sebagai industri hijau. Persyaratan dan indikator tersebut bisa dituangkan dalam bentuk nilai batas atau standar, seperti "ISO 14000 (*Environmental Management System*), ISO 26000 (*Social Responsibility*) EU (*Restriction Hazardous Substance/RoHS & Waste Electrical and Electronic Equipment /WEEE toward reuse & recycle*), British Standard (*Publicly Available Specification/PAS toward lifecycle GHG Emission*); Green Label : Green seal, energy star, ATIS, EURO; USA & Eropa (*California proposition 65*), dan lainnya. Di Indonesia, standarisasi dampak lingkungan ada yang bersifat wajib seperti PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan SIH (Sertifikasi Industri Hijau).

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2014, Standar Industri Hijau paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

1. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi;
2. Proses produksi;
3. Produk;
4. Manajemen perusahaan; dan
5. Pengelolaan limbah.

Standar Industri Hijau (SIH) yang telah ditetapkan maka akan menjadi pedoman bagi perusahaan industri dan perusahaan industri wajib memenuhi ketentuan standar industri hijau yang telah diberlakukan secara wajib. Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dilakukan sebagai berikut:

8. Memperhatikan sistem Standardisasi nasional dan/atau sistem standar lain yang berlaku; dan
9. Berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, bidang riset dan

teknologi, bidang Standardisasi, serta berkoordinasi dengan asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan lembaga terkait.

10. Untuk mewujudkan Industri Hijau, perusahaan industri secara bertahap:

11. membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan untuk pembangunan Industri Hijau;
12. menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau;
13. menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan; dan
14. mengembangkan jaringan bisnis dalam rangka memperoleh Bahan Baku, bahan penolong, dan teknologi ramah lingkungan.

Untuk pedoman secara lengkap dan teknis dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 51/M-Ind/Per/6/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau. Dalam pedoman tersebut, Standar Industri Hijau atau SIH adalah standar industri yang terkait dengan bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan, pengelolaan limbah dan/atau aspek lain yang dibakukan dan disusun secara konsesus oleh semua pihak terkait yang bertujuan untuk mewujudkan industri hijau. Selain itu dalam pedoman tersebut dibahas juga mengenai ketentuan standar industri hijau mulai dari perencanaan, prinsip, penyusunan, metode dan jenis verifikasi, tim teknis, hingga penetapan. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2014, perusahaan industri dikategorikan sebagai "Industri Hijau" apabila telah memenuhi Standar Industri Hijau. Selanjutnya, perusahaan industri yang telah memenuhi Standar Industri Hijau dapat diberikan 'sertifikat industri hijau' yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi industri hijau yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.

2.2.3 Sertifikasi Industri Hijau

Sertifikat industri hijau merupakan pengakuan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi industri hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan industri telah memenuhi SIH (Standar Industri Hijau). Sertifikat ini diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang merupakan lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi industri hijau. Aturan mengenai sertifikasi ini dimuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau.

PEDOMAN TATA CARA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU	
Bab 1	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Ruang Lingkup
1.3	Istilah dan definisi
Bab 2	TAHAPAN PROSES SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU
2.1	Persyaratan
2.2	Permohonan (Aplikasi)
2.3	Pemeriksaan Permohonan (Aplikasi)
2.4	Audit
2.5	Kesimpulan Sertifikasi Awal
2.6	Evaluasi
2.7	Keputusan Sertifikasi
2.8	Penerbitan Sertifikat
2.9	Penggunaan Logo Industri Hijau
2.10	Surveilans
2.11	Pemeliharaan Sertifikat
2.12	Perubahan yang mempengaruhi Sertifikasi Industri Hijau
2.13	Penghentian, Pembekuan atau Pencabutan Sertifikat
Bab 3	PANDUAN PENUNJUKAN LSIH
3.1	Penunjukan LSIH
3.2	Prinsip LSIH
3.3	Persyaratan Umum
3.4	Persyaratan Struktural
3.5	Persyaratan Sumber Daya
3.6	Informasi Publik

Gambar 2.1 Pedoman Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau

Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018

2.2.4 Penilaian Industri Hijau

Penilaian industri hijau merupakan salah satu proses dalam penghargaan industri hijau. Penghargaan industri hijau merupakan penghargaan yang diberikan kepada industri yang antara lain telah melakukan upaya penghematan penggunaan sumber daya alam, yang dilaksanakan melalui berbagai tahap seleksi dan verifikasi berdasarkan sistem penilaian yang akan dievaluasi secara berkala. Kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk insentif non fiskal bagi perusahaan industri dalam rangka mendorong transformasi industri nasional menuju Industri Hijau dengan menerapkan Standar Industri Hijau melalui proses sertifikasi industri hijau. Penilaian industri hijau yang ada dalam penghargaan industri hijau dapat menjadi indikator penilaian (assessment) atau sebagai pengukuran kinerja lingkungan. Tata cara penilaian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, meliputi:

1. Identifikasi kategori industri: besar, menengah dan kecil;

Tabel 2.1 Pengkategorian Industri

Tenaga Kerja \ Nilai Investasi			
	< Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000 – Rp 15.000.000.000	> Rp 15.000.000.000
1 – 19 orang	Industri Kecil	Industri Menengah	Industri Menengah
≥ 20 orang	Industri Menengah	Industri Menengah	Industri Besar

Sumber: Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau

2. Penilaian berdasarkan kategori industri;
3. Skoring hasil penilaian;
4. Perhitungan penilaian; dan
5. Klasifikasi level atau tingkat industri hijau.

Berikut merupakan aspek dan kriteria penilaian berdasarkan kategori industri besar, menengah dan kecil yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Industri Besar

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
A	PROSES PRODUKSI				70%
A.1	Program Efisiensi Produksi	A.1.1 Kebijakan perusahaan dalam penerapan efisiensi produksi	Ada Komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>), ada perencanaan (rencana kerja), dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dilakukan pemantauan/evaluasi	4	
			Ada Komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>), ada perencanaan (rencana kerja), dilaksanakan sesuai dengan rencana, tapi tidak dilakukan pemantauan/evaluasi	3	
			Ada Komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>), ada perencanaan (rencana kerja), tapi belum dilaksanakan	2	
			Ada Komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>) tapi belum tersedia program atau rencana kerja	1	
			Belum ada komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>)	0	
		A.1.2 Tingkat capaian penerapan program sesuai dengan komitmen perusahaan dalam meningkatkan efisiensi produksi	> 75% tercapai	4	
			$50\% < x \leq 75\%$ tercapai	3	
			$25\% < x \leq 50\%$ tercapai	2	
			$0\% < x \leq 25\%$ tercapai	1	
			Belum tercapai atau tidak ada program	0	
		A.2.1 Sertifikat/izin material <i>Input</i>	100% material <i>input</i> yang digunakan memiliki sertifikat/izin	4	
			$90\% < x < 100\%$ material <i>input</i> yang digunakan memiliki sertifikat/izin	3	
			$80\% < x \leq 90\%$ material <i>input</i> yang digunakan memiliki sertifikat/izin	2	
			$70\% < x \leq 80\%$ material <i>input</i> yang digunakan memiliki sertifikat/izin	1	
			$0\% < x \leq 70\%$ material <i>input</i> yang digunakan memiliki sertifikat/izin	0	
A.2	Material <i>Input</i>	A.2.2 Rasio produk terhadap material <i>input</i>	rata-rata pencapaiannya $97\% < x \leq 100\%$	4	
			rata-rata pencapaiannya $90\% < x \leq 97\%$	3	
			rata-rata pencapaiannya $80\% < x \leq 90\%$	2	
			rata-rata pencapaiannya $70\% < x \leq 80\%$	1	
			rata-rata pencapaiannya $0 < x \leq 70\%$	0	
		A.2.3 Upaya efisiensi Penggunaan material <i>Input</i>	Telah melakukan efisiensi penggunaan material <i>input</i> (<i>raw material index reduction</i>) $> 7,5\%$	4	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan material <i>input</i> (<i>raw material index reduction</i>) $5,0\% < x \leq 7,5\%$	3	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan material <i>input</i> (<i>raw material index reduction</i>) $2,5\% < x \leq 5,0\%$	2	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
			Telah melakukan efisiensi penggunaan material <i>input</i> (<i>raw material index reduction</i>) $0\% < x \leq 2,5\%$	1	
			Belum melakukan upaya efisiensi penggunaan material <i>input</i>	0	
		A.2.4 Substitusi material <i>input</i>	Telah melakukan substitusi 100%	4	
			Telah melakukan substitusi $60\% \leq x < 100\%$	3	
			Telah melakukan substitusi $20\% \leq x < 60\%$	2	
			Telah melakukan substitusi $0\% \leq x < 20\%$	1	
			Belum melakukan substitusi	0	
		A.2.5 Penanganan material <i>input</i>	Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk material <i>input</i> , dilakukan pemantauan mutu material, menerapkan prinsip FIFO (<i>first in first out</i>), dipisahkan berdasarkan jenis material	4	
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk material <i>input</i> , dilakukan pemantauan mutu material, menerapkan prinsip FIFO (<i>first in first out</i>)	3	
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk material <i>input</i> , dilakukan pemantauan mutu material	2	
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk material <i>input</i>	1	
			Belum ada upaya penanganan material <i>input</i>	0	
A.3	Energi	A.3.1 Upaya efisiensi energi	Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) $> 7,5\%$	4	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) $5,0\% < x \leq 7,5\%$	3	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) $2,5\% < x \leq 5,0\%$	2	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) $0\% < x \leq 2,5\%$	1	
			Belum ada upaya efisiensi energi	0	
		A.3.2 Upaya Penggunaan Energi Terbarukan	Rasio penggunaan energi terbarukan terhadap total penggunaan energi $> 3,0\%$	4	
			Rasio penggunaan energi terbarukan terhadap total penggunaan energi $2,0\% < x \leq 3,0\%$	3	
			Rasio penggunaan energi terbarukan terhadap total penggunaan energi $1,0\% < x \leq 2,0\%$	2	
			Rasio penggunaan energi terbarukan terhadap total penggunaan energi $0\% < x \leq 1,0\%$	1	
			Belum ada penggunaan energi terbarukan	0	
		A.3.3 Melakukan kegiatan manajemen energi yang dituangkan dalam bentuk laporan	Melakukan kegiatan manajemen energi setiap tahun	4	
			Melakukan kegiatan manajemen energi 2 tahun sekali	3	
			Melakukan kegiatan manajemen energi 3 tahun sekali	2	
			Melakukan kegiatan manajemen energi > 3 tahun sekali	1	
			Belum pernah melakukan kegiatan manajemen energi	0	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
A.4	Air	A.4.1 Upaya efisiensi air	Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) >15%	4	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) $10\% < x \leq 15\%$	3	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) $5, 0\% < x \leq 10\%$	2	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) $0\% < x \leq 5,0\%$	1	
			Belum ada upaya efisiensi air	0	
		A.4.2 Penggunaan air daur ulang untuk proses produksi dan /atau utilitas	> 30%	4	
			$20\% < x \leq 30\%$	3	
			$10\% < x \leq 20\%$	2	
			$0\% < x \leq 10\%$	1	
			Belum melakukan daur ulang air	0	
		A.4.3 Upaya konservasi sumber air	Upaya konservasi sumber air sudah berjalan	4	
			Sudah melakukan kajian, perencanaan teknis dan konstruksi	3	
			Sudah melakukan kajian dan perencanaan teknis	2	
			Sudah melakukan kajian	1	
			Belum melakukan upaya konservasi air	0	
		A.4.4 Melakukan kegiatan manajemen air yang dituangkan dalam bentuk laporan	Melakukan kegiatan manajemen air setiap tahun	4	
			Melakukan kegiatan manajemen air 2 tahun sekali	3	
			Melakukan kegiatan manajemen air 3 tahun sekali	2	
			Melakukan kegiatan manajemen air > 3 tahun sekali	1	
			Belum pernah melakukan kegiatan manajemen air	0	
A.5	Teknologi Proses	A.5.1 Penerapan <i>Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery</i> (4R)	Melakukan <i>Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i> (4R) dalam kegiatan proses produksi	4	
			Melakukan 3R dalam kegiatan proses produksi	3	
			Melakukan 2R dalam kegiatan proses produksi	2	
			Melakukan dalam 1R dalam kegiatan proses produksi	1	
			Belum melakukan 4R dalam kegiatan proses produksi	0	
		A.5.2 Segregasi air limbah dari proses produksi	Sudah melakukan segregasi air limbah dari proses produksi, air limbah domestik dan air hujan. Air limbah dari proses produksi diolah di IPAL terpisah dari air limbah domestik dan air hujan	4	
			Sudah melakukan segregasi air limbah dari proses produksi, air limbah domestik dan air hujan. Air limbah dari proses produksi diolah di IPAL bercampur dengan air limbah domestik sedangkan air hujan dialirkan ke badan air (selokan/parit/sungai/laut)	3	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot	
			Sudah melakukan segregasi air limbah dari proses produksi, air limbah domestik dan air hujan. Air limbah dari proses produksi diolah di IPAL bercampur dengan air hujan sedangkan air limbah domestik dialirkan ke badan air (selokan/parit/sungai/laut)	2		
			Sudah melakukan segregasi air limbah dari proses produksi, air limbah domestik dan air hujan. Pengolahan Air limbah dari proses produksi diolah di IPAL bercampur dengan air limbah domestik dan air hujan	1		
			Sudah ada perencanaan segregasi air limbah dari proses produksi, air limbah domestik dan air hujan	0		
		A.5.3 Inovasi Teknologi Proses Untuk Jangka Waktu 1 Tahun Terakhir	Melakukan modifikasi mesin/peralatan	4		
			Melakukan penggantian mesin/peralatan	3		
			Sudah ada perencanaan modifikasi mesin/peralatan	2		
			Sudah ada perencanaan penggantian mesin/peralatan	1		
			Belum modifikasi mesin/peralatan atau ada perencanaan penggantian	0		
		A.5.4 Kinerja Peralatan				
		1) Batch System	Overall Equipment Effectiveness $\geq 85\%$	4		
			Overall Equipment Effectiveness $60\% \leq x < 85\%$	3		
			Overall Equipment Effectiveness $40\% \leq x < 60\%$	2		
			Overall Equipment Effectiveness $20\% \leq x < 40\%$	1		
			Overall Equipment Effectiveness $< 20\%$	0		
		2) Continuous System	Overall Equipment Effectiveness $\geq 95\%$	4		
			Overall Equipment Effectiveness $70\% \leq x < 95\%$	3		
			Overall Equipment Effectiveness $50\% \leq x < 70\%$	2		
			Overall Equipment Effectiveness $30\% \leq x < 50\%$	1		
			Overall Equipment Effectiveness $0\% < x < 30\%$	0		
		A.5.5 Penerapan SOP penanganan material input, proses produksi, dan maintenance	Tersedia tiga SOP (penanganan material input, proses produksi dan maintenance); dilaksanakan	4		
			Tersedia dua SOP (penanganan material input dan/atau proses produksi dan/atau maintenance); dilaksanakan	3		
			Tersedia satu SOP (penanganan material input/proses produksi/maintenance); dilaksanakan	2		
			Tersedia minimal satu jenis SOP (penanganan material input/proses produksi/maintenance); tetapi tidak dilaksanakan	1		
			Belum memiliki SOP penanganan material input dan/atau proses produksi dan/atau maintenance	0		
		A.5.6 Inovasi produk	Dalam tahap sudah atau sedang memperoleh paten	4		

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
			Komersial	3	
			Sedang dalam tahap uji coba	2	
			Masih dalam tahap kajian	1	
			Belum ada inovasi	0	
		A.5.7 Tingkat produk reject terhadap total produk	$\leq 0,5\%$	4	
			$0,5\% < x \leq 1,0\%$	3	
			$1,0\% < x \leq 1,5\%$	2	
			$1,5\% < x \leq 2,0\%$	1	
			$> 2,0\%$	0	
A.6	Sumber Daya Manusia	A.6.1 Peningkatan kapasitas SDM proses produksi yang memenuhi persyaratan	Peningkatan kapasitas SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal 100%	4	
			Peningkatan kapasitas SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal $65\% < x \leq 100\%$	3	
			Peningkatan kapasitas SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal $35\% < x \leq 65\%$	2	
			Peningkatan kapasitas SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal $0\% < x \leq 35\%$	1	
			Belum ada upaya Peningkatan kapasitas SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal	0	
		A.6.2 Jumlah SDM yang sudah memperoleh pelatihan kompetensi	Jumlah SDM yang sudah memperoleh pelatihan kompetensi $> 15\%$	4	
			Jumlah SDM yang sudah memperoleh pelatihan kompetensi $10\% < x \leq 15\%$	3	
			Jumlah SDM yang sudah memperoleh pelatihan kompetensi $5,0\% < x \leq 10\%$	2	
			Jumlah SDM yang sudah memperoleh pelatihan kompetensi $0\% < x \leq 5,0\%$	1	
			Belum ada SDM yang memperoleh pelatihan kompetensi	0	
A.7	Lingkungan Kerja di Ruang Proses Produksi	A.7.1 Melakukan pemantauan dan penilaian kinerja K3L sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	Ada program, dijalankan secara berkala setiap 6 bulan sekali	4	
			Ada program, dijalankan secara berkala setiap 1 tahun sekali	3	
			Ada program, dijalankan secara berkala setiap 2 tahun sekali	2	
			Ada program, dijalankan secara berkala lebih dari 2 tahun sekali	1	
			Belum ada program pemantauan dan penilaian kinerja K3L	0	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
		A.7.2 Jumlah karyawan yang terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $75\% < x \leq 100\%$	4	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $50\% < x \leq 75\%$	3	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $25\% < x \leq 50\%$	2	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $0\% < x \leq 25\%$	1	
			Belum ada karyawan yang terdaftar	0	
B	KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH/EMISI				20%
B.1	Program Penurunan Emisi GRK	B.1.1 Penurunan emisi GRK	Memenuhi target penurunan emisi GRK $> 99\%$	4	
			Memenuhi target penurunan emisi GRK: $66\% < x \leq 99\%$	3	
			Memenuhi target penurunan emisi GRK: $33\% < x \leq 66\%$	2	
			Memenuhi target penurunan emisi GRK: $0\% < x \leq 33\%$	1	
			Belum memenuhi target penurunan emisi GRK	0	
B.2	Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan	8.2.1 Limbah Cair	100% memenuhi	4	
			$98\% < x \leq 100\%$ memenuhi	3	
			$95\% < x \leq 98\%$ memenuhi	2	
			$90\% < x \leq 95\%$ memenuhi	1	
			$\leq 90\%$ memenuhi	0	
		B.2.2 Limbah Gas dan Debu	100% memenuhi	4	
			$98\% < x \leq 100\%$ memenuhi	3	
			$95\% < x \leq 98\%$ memenuhi	2	
			$90\% < x \leq 95\%$ memenuhi	1	
			$\leq 90\%$ memenuhi	0	
B.3	Sarana Pengelolaan Limbah/Emisi	B.3.1 Operasional sarana pengelolaan limbah dan emisi (sesuai persyaratan yang berlaku)	Sarana lengkap dan seluruhnya beroperasi dengan baik	4	
			Sarana lengkap, tapi hanya beroperasi sebagian	3	
			Sarana tidak lengkap dan semua sarana beroperasi dengan baik	2	
			Sarana tidak lengkap dan tidak dioperasikan	1	
			Belum ada sarana pengelolaan limbah / emisi	0	
		B.3.2 Pengelolaan Limbah B3 (perizinan dan prasarana sesuai	Terdapat sarana, beroperasi serta memiliki izin	4	
			Terdapat sarana, beroperasi tapi tidak memiliki izin	3	
			Terdapat sarana, memiliki izin tidak beroperasi	2	
			Terdapat sarana, tapi tidak memiliki izin dan tidak beroperasi	1	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
		persyaratan yang berlaku)	Belum ada sarana pengelolaan limbah B3	0	
C	MANAJEMEN PERUSAHAAN				10%
C.1	Standar Operasional	C.1.1 Produk	75% < x ≤ 100% produk memiliki sertifikat	4	
			50% < x ≤ 75% produk memiliki sertifikat	3	
			25 % < x ≤ 50% produk memiliki sertifikat	2	
			0 % < x ≤ 25% produk memiliki sertifikat	1	
			Belum ada produk memiliki sertifikat	0	
		C.1.2 Sistem Manajemen yang dibuktikan dengan dokumen	Memiliki perencanaan, mengimplementasikan, melakukan monev dan melakukan rencana aksi sistem manajemen	4	
			Memiliki perencanaan, mengimplementasikan, dan melakukan monev	3	
			Memiliki perencanaan, dan sudah mengimplementasikan	2	
			Memiliki perencanaan sistem manajemen	1	
			Belum memiliki perencanaan sistem manajemen	0	
		C.1.3 Sertifikasi standar internasional organisasi	Memiliki sertifikat ISO 9001 (atau sertifikasi lain yang relevan), ISO 14001, OHSAS 18001, dan ISO 50001	4	
			Memiliki sertifikat ISO 9001 (atau sertifikasi lain yang relevan), ISO 14001, dan OHSAS 18001	3	
			Memiliki sertifikat ISO 9001 (atau sertifikasi lain yang relevan), dan ISO 14001, atau memiliki sertifikat ISO 9001 dan OHSAS 18001	2	
			Memiliki sertifikat ISO 9001 (atau sertifikasi lain yang relevan)	1	
			Belum memiliki sertifikat	0	
C.2	CSR	C.2.1 Penerapan CSR yang berkelanjutan	Ada kebijakan CSR yang berkelanjutan , dilaksanakan, dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ada pelaporan	4	
			Ada kebijakan CSR yang berkelanjutan, sudah dilaksanakan, dilakukan pemantauan dan evaluasi, tapi tidak ada pelaporan	3	
			Ada kebijakan CSR yang berkelanjutan, sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	2	
			Ada kebijakan CSR yang berkelanjutan namun belum dilaksanakan	1	
			Belum ada kebijakan CSR yang berkelanjutan	0	
		C.2.2 Program CSR yang berkelanjutan	Memiliki >3 Program CSR yang berkelanjutan	4	
			Memiliki 3 Program CSR yang berkelanjutan	3	
			Memiliki 2 Program CSR yang berkelanjutan	2	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
C.3	Penghargaan	C.3.1 Penghargaan terkait bidang produksi dan pengelolaan lingkungan industri yang pernah diterima dalam jangka waktu 1 tahun terakhir	Memiliki 1 Program CSR yang berkelanjutan	1	
			Tidak menerapkan CSR	0	
			> 3 penghargaan	4	
			3 penghargaan	3	
			2 penghargaan	2	
			1 penghargaan	1	
			Belum ada penghargaan	0	
C.4	Kesehatan Karyawan	C.4.1 Pemeriksaan kesehatan karyawan	Dilakukan <i>medical check up</i> secara periodik setiap 1 tahun sekali	4	
			Dilakukan <i>medical check up</i> secara periodik setiap 2 tahun sekali	3	
			Dilakukan <i>medical check up</i> secara periodik setiap 3 tahun sekali	2	
			Dilakukan <i>medical check up</i> secara periodik >3 tahun	1	
			Belum pernah dilakukan <i>medical check up</i>	0	
		C.4.2 Jumlah Karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan $75\% < x \leq 100\%$	4	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan $50\% < x \leq 75\%$	3	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan $25\% < x \leq 50\%$	2	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan $0\% < x \leq 25\%$	1	
			Tidak ada karyawan yang terdaftar	0	

Sumber: Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau

Tabel 2.3 Kriteria Penilaian Industri Sedang

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
A	PROSES PRODUKSI				70%
A.1	Program efisiensi produksi	A.1.1 Kebijakan perusahaan dalam penerapan efisiensi produksi	Ada Komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>), ada perencanaan (rencana kerja), dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dilakukan pemantauan/evaluasi	4	
			Ada Komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>), ada perencanaan (rencana kerja), dilaksanakan sesuai dengan rencana, tapi tidak dilakukan pemantauan/evaluasi	3	
			Ada Komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>), ada perencanaan (rencana kerja), tapi belum dilaksanakan	2	
			Ada Komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>) tapi belum tersedia program atau rencana kerja	1	
			Belum ada komitmen manajemen puncak (<i>top management</i>)	0	
		A.1.2 Tingkat capaian penerapan program sesuai dengan komitmen perusahaan dalam meningkatkan efisiensi produksi	> 75% tercapai	4	
			$50\% < x \leq 75\%$ tercapai	3	
			$25\% < x \leq 50\%$ tercapai	2	
			$0\% < x \leq 25\%$ tercapai	1	
			Belum tercapai atau tidak ada program	0	
A.2	Material Input	A.2.1 Sertifikat/izin material Input	100% material <i>input</i> yang digunakan memiliki sertifikat/izin	4	
			$90\% < x < 100\%$ material <i>input</i> yang digunakan memiliki sertifikat/izin	3	
			$80\% < x \leq 90\%$ material <i>input</i> yang digunakan memiliki sertifikat/izin	2	
			$70\% < x \leq 80\%$ material <i>input</i> yang digunakan memiliki sertifikat/izin	1	
			$0\% < x \leq 70\%$ material <i>input</i> yang digunakan memiliki sertifikat/izin	0	
		A.2.2 Rasio produk terhadap material <i>input</i>	rata-rata pencapaiannya $97\% < x \leq 100\%$	4	
			rata-rata pencapaiannya $90\% < x \leq 97\%$	3	
			rata-rata pencapaiannya $80\% < x \leq 90\%$	2	
			rata-rata pencapaiannya $70\% < x \leq 80\%$	1	
			rata-rata pencapaiannya $0 < x \leq 70\%$	0	
		A.2.3 Upaya efisiensi Penggunaan material <i>Input</i>	Telah melakukan efisiensi penggunaan material <i>input</i> (<i>raw material index reduction</i>) $> 7,5\%$	4	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan material <i>input</i> (<i>raw material index reduction</i>) $5,0\% < x \leq 7,5\%$	3	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
			Telah melakukan efisiensi penggunaan material <i>input</i> (<i>raw material index reduction</i>) $2,5\% < x \leq 5,0\%$	2	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan material <i>input</i> (<i>raw material index reduction</i>) $0\% < x \leq 2,5\%$	1	
			Belum melakukan upaya efisiensi penggunaan material <i>input</i>	0	
		A.2.4 Substitusi material <i>input</i>	Telah melakukan substitusi 100%	4	
			Telah melakukan substitusi $60\% \leq x < 100\%$	3	
			Telah melakukan substitusi $20\% \leq x < 60\%$	2	
			Telah melakukan substitusi $0\% \leq x < 20\%$	1	
			Belum melakukan substitusi	0	
		A.2.5 Penanganan material <i>input</i>	Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk material <i>input</i> , dilakukan pemantauan mutu material, menerapkan prinsip FIFO (<i>first in first out</i>), dipisahkan berdasarkan jenis material	4	
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk material <i>input</i> , dilakukan pemantauan mutu material, menerapkan prinsip FIFO (<i>first in first out</i>)	3	
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk material <i>input</i> , dilakukan pemantauan mutu material	2	
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk material <i>input</i>	1	
			Belum ada upaya penanganan material <i>input</i>	0	
A.3	Energi	A.3.1 Upaya efisiensi energi	Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) $> 7,5\%$	4	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) $5,0\% < x \leq 7,5\%$	3	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) $2,5\% < x \leq 5,0\%$	2	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) $0\% < x \leq 2,5\%$	1	
			Belum ada upaya efisiensi energi	0	
		A.3.2 Upaya Penggunaan Energi Terbarukan	Rasio penggunaan energi terbarukan terhadap total penggunaan energi $> 3,0\%$	4	
			Rasio penggunaan energi terbarukan terhadap total penggunaan energi $2,0\% < x \leq 3,0\%$	3	
			Rasio penggunaan energi terbarukan terhadap total penggunaan energi $1,0\% < x \leq 2,0\%$	2	
			Rasio penggunaan energi terbarukan terhadap total penggunaan energi $0\% < x \leq 1,0\%$	1	
			Belum ada penggunaan energi terbarukan	0	
		A.3.3 Melakukan kegiatan manajemen energi yang	Melakukan kegiatan manajemen energi setiap tahun	4	
			Melakukan kegiatan manajemen energi 2 tahun sekali	3	
			Melakukan kegiatan manajemen energi 3 tahun sekali	2	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
		dituangkan dalam bentuk laporan	Melakukan kegiatan manajemen energi > 3 tahun sekali	1	
			Belum pernah melakukan kegiatan manajemen energi	0	
A.4	Air	A.4.1 Upaya efisiensi air	Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) > 15%	4	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) 10% < x ≤ 15%	3	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) 5, 0 % < x ≤ 10 %	2	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) 0% < x ≤ 5,0 %	1	
			Belum ada upaya efisiensi air	0	
		A.4.2 Penggunaan air daur ulang untuk proses produksi dan/atau utilitas	> 30%	4	
			20 % < x ≤ 30%	3	
			10 % < x ≤ 20%	2	
			0 % < x ≤ 10%	1	
			Belum melakukan daur ulang air	0	
		A.4.3 Upaya konservasi sumber air	Upaya konservasi sumber air sudah berjalan	4	
			Sudah melakukan kajian, perencanaan teknis dan konstruksi	3	
			Sudah melakukan kajian dan perencanaan teknis	2	
			Sudah melakukan kajian	1	
			Belum melakukan upaya konservasi air	0	
		A.4.4 Melakukan kegiatan manajemen air yang dituangkan dalam bentuk laporan	Melakukan kegiatan manajemen air setiap tahun	4	
			Melakukan kegiatan manajemen air 2 tahun sekali	3	
			Melakukan kegiatan manajemen air 3 tahun sekali	2	
			Melakukan kegiatan manajemen air > 3 tahun sekali	1	
			Belum pernah melakukan kegiatan manajemen air	0	
A.5	Teknologi Proses	A.5.1 Penerapan <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> , dan <i>Recovery</i> (4R)	Melakukan <i>Reduce, Reuse, Recycle dan Recovery</i> (4R) dalam kegiatan proses produksi	4	
			Melakukan 3R dalam kegiatan proses produksi	3	
			Melakukan 2R dalam kegiatan proses produksi	2	
			Melakukan dalam 1R dalam kegiatan proses produksi	1	
			Belum melakukan 4R dalam kegiatan proses produksi	0	
		A.5.2 Segregasi air limbah dari proses produksi	Sudah melakukan segregasi air limbah dari proses produksi, air limbah domestik dan air hujan. Air limbah dari proses produksi diolah di IPAL terpisah dari air limbah domestik dan air hujan	4	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot	
			Sudah melakukan segregasi air limbah dari proses produksi, air limbah domestik dan air hujan. Air limbah dari proses produksi diolah di IPAL bercampur dengan air limbah domestik sedangkan air hujan dialirkan ke badan air (selokan/parit/sungai/laut)	3		
			Sudah melakukan segregasi air limbah dari proses produksi, air limbah domestik dan air hujan. Air limbah dari proses produksi diolah di IPAL bercampur dengan air hujan sedangkan air limbah domestik dialirkan ke badan air (selokan/parit/sungai/laut)	2		
			Sudah melakukan segregasi air limbah dari proses produksi, air limbah domestik dan air hujan. Pengolahan Air limbah dari proses produksi diolah di IPAL bercampur dengan air limbah domestik dan air hujan	1		
			Sudah ada perencanaan segregasi air limbah dari proses produksi, air limbah domestik dan air hujan	0		
		A.5.3 Inovasi Teknologi Proses Untuk Jangka Waktu 1 Tahun Terakhir	Melakukan modifikasi mesin/peralatan	4		
			Melakukan penggantian mesin/peralatan	3		
			Sudah ada perencanaan modifikasi mesin/peralatan	2		
			Sudah ada perencanaan penggantian mesin/peralatan	1		
			Belum modifikasi mesin/peralatan atau ada perencanaan penggantian	0		
		A.5.4 Kinerja Peralatan				
		1) Batch System	Overall Equipment Effectiveness $\geq 85\%$	4		
			Overall Equipment Effectiveness $60\% \leq x < 85\%$	3		
			Overall Equipment Effectiveness $40\% \leq x < 60\%$	2		
			Overall Equipment Effectiveness $20\% \leq x < 40\%$	1		
			Overall Equipment Effectiveness $< 20\%$	0		
		2) Continuous System	Overall Equipment Effectiveness $\geq 95\%$	4		
			Overall Equipment Effectiveness $70\% \leq x < 95\%$	3		
			Overall Equipment Effectiveness $50\% \leq x < 70\%$	2		
			Overall Equipment Effectiveness $30\% \leq x < 50\%$	1		
			Overall Equipment Effectiveness $0\% < x < 30\%$	0		
		A.5.5 Penerapan SOP penanganan material input, proses produksi, dan maintenance	Tersedia tiga SOP (penanganan material input, proses produksi dan maintenance); dilaksanakan	4		
			Tersedia dua SOP (penanganan material input dan/atau proses produksi dan/atau maintenance); dilaksanakan	3		

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
			Tersedia satu SOP (penanganan material input/proses produksi/ <i>maintenance</i>); dilaksanakan	2	
			Tersedia minimal satu jenis SOP (penanganan material input/proses produksi/ <i>maintenance</i>); tetapi tidak dilaksanakan	1	
			Belum memiliki SOP penanganan material input dan/atau proses produksi dan/atau <i>maintenance</i>	0	
		A.5.6 Inovasi produk	Dalam tahap sudah atau sedang memperoleh paten	4	
			Komersial	3	
			Sedang dalam tahap uji coba	2	
			Masih dalam tahap kajian	1	
			Belum ada inovasi	0	
		A.5.7 Tingkat produk <i>reject</i> terhadap total produk	$\leq 0,5\%$	4	
			$0,5\% < x \leq 1,0\%$	3	
			$1,0\% < x \leq 1,5\%$	2	
			$1,5\% < x \leq 2,0\%$	1	
			$> 2,0\%$	0	
A.6	Sumber Daya Manusia	A.6.1 Peningkatan kapasitas SDM proses produksi yang memenuhi persyaratan	Peningkatan kapasitas SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal 100%	4	
			Peningkatan kapasitas SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal $65\% < x \leq 100\%$	3	
			Peningkatan kapasitas SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal $35\% < x \leq 65\%$	2	
			Peningkatan kapasitas SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal $0\% < x \leq 35\%$	1	
			Belum ada upaya Peningkatan kapasitas SDM proses produksi memenuhi persyaratan eksternal dan internal	0	
		A.6.2 Jumlah SDM yang sudah memperoleh pelatihan kompetensi	Jumlah SDM yang sudah memperoleh pelatihan kompetensi $> 15\%$	4	
			Jumlah SDM yang sudah memperoleh pelatihan kompetensi $10\% < x \leq 15\%$	3	
			Jumlah SDM yang sudah memperoleh pelatihan kompetensi $5,0\% < x \leq 10\%$	2	
			Jumlah SDM yang sudah memperoleh pelatihan kompetensi $0\% < x \leq 5,0\%$	1	
			Belum ada SDM yang memperoleh pelatihan kompetensi	0	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
A.7	Lingkungan Kerja di Ruang Proses Produksi	A.7.1 Melakukan pemantauan dan penilaian kinerja K3L sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja	Ada program, dijalankan secara berkala setiap 6 bulan sekali	4	
			Ada program, dijalankan secara berkala setiap 1 tahun sekali	3	
			Ada program, dijalankan secara berkala setiap 2 tahun sekali	2	
			Ada program, dijalankan secara berkala lebih dari 2 tahun sekali	1	
			Belum ada program pemantauan dan penilaian kinerja K3L	0	
		A.7.2 Jumlah karyawan yang terdaftar dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $75\% < x \leq 100\%$	4	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $50\% < x \leq 75\%$	3	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $25\% < x \leq 50\%$	2	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $0\% < x \leq 25\%$	1	
			Belum ada karyawan yang terdaftar	0	
B	KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH/EMISI				20%
B.1	Program Penurunan Emisi GRK	B.1.1 Penurunan emisi GRK	Memenuhi target penurunan emisi GRK $> 99\%$	4	
			Memenuhi target penurunan emisi GRK: $66\% < x \leq 99\%$	3	
			Memenuhi target penurunan emisi GRK: $33\% < x \leq 66\%$	2	
			Memenuhi target penurunan emisi GRK: $0\% < x \leq 33\%$	1	
			Belum memenuhi target penurunan emisi GRK	0	
B.2	Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan	8.2.1 Limbah Cair	100% memenuhi	4	
			$98\% < x \leq 100\%$ memenuhi	3	
			$95\% < x \leq 98\%$ memenuhi	2	
			$90\% < x \leq 95\%$ memenuhi	1	
			$\leq 90\%$ memenuhi	0	
		B.2.2 Limbah Gas dan Debu	100% memenuhi	4	
			$98\% < x \leq 100\%$ memenuhi	3	
			$95\% < x \leq 98\%$ memenuhi	2	
			$90\% < x \leq 95\%$ memenuhi	1	
			$\leq 90\%$ memenuhi	0	
B.3	Sarana Pengelolaan Limbah/Emisi	B.3.1 Operasional sarana pengelolaan limbah dan	Sarana lengkap dan seluruhnya beroperasi dengan baik	4	
			Sarana lengkap, tapi hanya beroperasi sebagian	3	
			Sarana tidak lengkap dan semua sarana beroperasi dengan baik	2	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
		emisi (sesuai persyaratan yang berlaku)	Sarana tidak lengkap dan tidak dioperasikan	1	
			Belum ada sarana pengelolaan limbah / emisi	0	
		B.3.2 Pengelolaan Limbah B3 (perizinan dan prasarana sesuai persyaratan yang berlaku)	Terdapat sarana, beroperasi serta memiliki izin	4	
			Terdapat sarana, beroperasi tapi tidak memiliki izin	3	
			Terdapat sarana, memiliki izin tidak beroperasi	2	
			Terdapat sarana, tapi tidak memiliki izin dan tidak beroperasi	1	
			Belum ada sarana pengelolaan limbah B3	0	
C	MANAJEMEN PERUSAHAAN				10%
C.1	Standar Operasional	C.1.1 Produk	75% < x ≤ 100% produk memiliki sertifikat	4	
			50% < x ≤ 75% produk memiliki sertifikat	3	
			25 % < x ≤ 50% produk memiliki sertifikat	2	
			0 % < x ≤ 25% produk memiliki sertifikat	1	
			Belum ada produk memiliki sertifikat	0	
		C.1.2 Sistem Manajemen yang dibuktikan dengan dokumen	Memiliki perencanaan, mengimplementasikan, melakukan monev dan melakukan rencana aksi sistem manajemen	4	
			Memiliki perencanaan, mengimplementasikan, dan melakukan monev	3	
			Memiliki perencanaan, dan sudah mengimplementasikan	2	
			Memiliki perencanaan sistem manajemen	1	
			Belum memiliki perencanaan sistem manajemen	0	
		C.1.3 Sertifikasi standar internasional organisasi	Memiliki sertifikat ISO 9001 (atau sertifikasi lain yang relevan), ISO 14001, OHSAS 18001, dan ISO 50001	4	
			Memiliki sertifikat ISO 9001 (atau sertifikasi lain yang relevan), ISO 14001, dan OHSAS 18001	3	
			Memiliki sertifikat ISO 9001 (atau sertifikasi lain yang relevan), dan ISO 14001, atau memiliki sertifikat ISO 9001 dan OHSAS 18001	2	
			Memiliki sertifikat ISO 9001 (atau sertifikasi lain yang relevan)	1	
			Belum memiliki sertifikat	0	
C.2	CSR	C.2.1 Penerapan CSR yang berkelanjutan	Ada kebijakan CSR yang berkelanjutan , dilaksanakan, dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ada pelaporan	4	
			Ada kebijakan CSR yang berkelanjutan, sudah dilaksanakan, dilakukan pemantauan dan evaluasi, tapi tidak ada pelaporan	3	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
			Ada kebijakan CSR yang berkelanjutan, sudah dilaksanakan, namun belum dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan	2	
			Ada kebijakan CSR yang berkelanjutan namun belum dilaksanakan	1	
			Belum ada kebijakan CSR yang berkelanjutan	0	
		C.2.2 Program CSR yang berkelanjutan	Memiliki >3 Program CSR yang berkelanjutan	4	
			Memiliki 3 Program CSR yang berkelanjutan	3	
			Memiliki 2 Program CSR yang berkelanjutan	2	
			Memiliki 1 Program CSR yang berkelanjutan	1	
			Tidak menerapkan CSR	0	
C.3	Penghargaan	C.3.1 Penghargaan terkait bidang produksi dan pengelolaan lingkungan industri yang pernah diterima dalam jangka waktu 1 tahun terakhir	> 3 penghargaan	4	
			3 penghargaan	3	
			2 penghargaan	2	
			1 penghargaan	1	
			Belum ada penghargaan	0	
C.4	Kesehatan Karyawan	C.4.1 Pemeriksaan kesehatan karyawan	Dilakukan <i>medical check up</i> secara periodik setiap 1 tahun sekali	4	
			Dilakukan <i>medical check up</i> secara periodik setiap 2 tahun sekali	3	
			Dilakukan <i>medical check up</i> secara periodik setiap 3 tahun sekali	2	
			Dilakukan <i>medical check up</i> secara periodik >3 tahun	1	
			Belum pernah dilakukan <i>medical check up</i>	0	
		C.4.2 Jumlah Karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan $75\% < x \leq 100\%$	4	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan $50\% < x \leq 75\%$	3	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan $25\% < x \leq 50\%$	2	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan $0\% < x \leq 25\%$	1	
			Tidak ada karyawan yang terdaftar	0	

Sumber: Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau

Tabel 2.4 Kriteria Penilaian Industri Kecil

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
A	PROSES PRODUKSI				70%
A.1	Program efisiensi produksi	A.1.1 Kebijakan perusahaan dalam penerapan efisiensi produksi	Ada perencanaan (rencana kerja), ada komitmen, dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dilakukan pemantauan/evaluasi	4	
			Ada perencanaan (rencana kerja), ada komitmen, dilaksanakan sesuai dengan rencana tetapi tidak dilakukan evaluasi	3	
			Ada perencanaan (rencana kerja), ada komitmen, tetapi belum dilaksanakan	2	
			Ada perencanaan (rencana kerja), tetapi belum memiliki komitmen	1	
			Belum ada perencanaan	0	
		A.1.2 Tingkat capaian penerapan komitmen perusahaan dalam meningkatkan efisiensi produksi	> 45% tercapai	4	
			31% < x ≤ 45 % tercapai	3	
			15% < x ≤ 31 % tercapai	2	
			0% < x ≤ 15 % tercapai	1	
			Belum tercapai atau tidak ada program	0	
A.2	Material Input	A.2.1 Bukti pembelian material Input	> 45% material input yang digunakan memiliki bukti pembelian	4	
			30% < x ≤ 45 % material input yang digunakan memiliki bukti pembelian	3	
			15% < x ≤ 30 % material input yang digunakan memiliki bukti pembelian	2	
			0% < x ≤ 15 % material input yang digunakan memiliki bukti pembelian	1	
			Material input yang digunakan belum memiliki bukti pembelian	0	
		A.2.2 Rasio produk terhadap material input	Penggunaan material input menghasilkan per unit produk rata-rata >75%	4	
			Penggunaan material input menghasilkan per unit produk rata-rata 65% < x ≤ 75%	3	
			Penggunaan material input menghasilkan per unit produk rata-rata 55% < x ≤ 65%	2	
			Penggunaan material input menghasilkan per unit produk rata-rata 45% < x ≤ 55 %	1	
			Penggunaan material input menghasilkan per unit produk rata-rata 0% < x ≤ 45%	0	
		A.2.3 Upaya efisiensi Penggunaan material Input	Telah melakukan efisiensi penggunaan material input (raw material index reduction) > 5,0%	4	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan material input (raw material index reduction) 3,0% < x ≤ 5,0%	3	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan material input (raw material index reduction) 1,0% < x ≤ 3,0%	2	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan material input (raw material index reduction) 0% < x ≤ 1,0 %	1	
			Belum melakukan upaya efisiensi penggunaan material input	0	
		A.2.4 Substitusi material input	Telah melakukan substitusi material input >30 %	4	
			Telah melakukan substitusi material input 20% < x ≤ 30 %	3	
			Telah melakukan substitusi material input 10% < x ≤ 20 %	2	
			Telah melakukan substitusi material input 0% < x ≤ 10 %	1	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
A.3	Energi	A.2.5 Penanganan material <i>input</i>	Belum melakukan substitusi material input ramah lingkungan	0	
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk material <i>input</i> , dilakukan pemantauan mutu material, menerapkan prinsip FIFO (<i>first in first out</i>), dipisahkan berdasarkan jenis material	4	
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk material <i>input</i> , dilakukan pemantauan mutu material, menerapkan prinsip FIFO (<i>first in first out</i>)	3	
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk material <i>input</i> , dilakukan pemantauan mutu material	2	
			Ditempatkan di gudang/ruangan khusus untuk material <i>input</i>	1	
			Belum ada upaya penanganan material <i>input</i>	0	
	Energi	A.3.1 Upaya efisiensi energi	Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) > 7,5 %	4	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) 5, 0 % < x ≤ 7, 5 %	3	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) 2,5 % < x ≤ 5,0%	2	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan energi (<i>energy index reduction</i>) 0% < x ≤ 2,5 %	1	
			Belum ada upaya efisiensi energi	0	
		A.3.2 Upaya Penggunaan Energi Terbarukan	Rasio penggunaan energi terbarukan terhadap total penggunaan energi > 3,0%	4	
			Rasio penggunaan energi terbarukan terhadap total penggunaan energi 2,0 % < x ≤ 3,0%	3	
			Rasio penggunaan energi terbarukan terhadap total penggunaan energi 1,0 % < x ≤ 2,0 %	2	
			Rasio penggunaan energi terbarukan terhadap total penggunaan energi 0% < x ≤ 1,0 %	1	
			Belum ada penggunaan energi terbarukan	0	
		A.3.3 Melakukan kegiatan manajemen energi dibuktikan dengan adanya pencatatan	Sudah melakukan pencatatan dengan evaluasi secara rutin dan sudah ada tindak lanjut hasil evaluasi	4	
			Sudah melakukan pencatatan dengan evaluasi secara rutin	3	
			Sudah melakukan pencatatan dengan rutin	2	
			Sudah melakukan pencatatan tapi bersifat tidak rutin	1	
			Belum ada pencatatan konsumsi energi	0	
A.4	Air	A.4.1 Upaya efisiensi air	Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) > 10%	4	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) 6% < x ≤ 10%	3	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) 4 % < x ≤ 6 %	2	
			Telah melakukan efisiensi penggunaan air (<i>water index reduction</i>) 0% < x ≤ 4,0 %	1	
			Belum ada upaya efisiensi air	0	
		A.4.2 Melakukan kegiatan manajemen air dibuktikan dengan adanya catatan	Melakukan kegiatan manajemen air setiap tahun	4	
			Melakukan kegiatan manajemen air 2 tahun sekali	3	
			Melakukan kegiatan manajemen air 3 tahun sekali	2	
			Melakukan kegiatan manajemen air > 3 tahun sekali	1	
			Belum pernah melakukan kegiatan manajemen air	0	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
A.5	Teknologi Proses	A.5.1 Penerapan <i>Reduce</i> dan <i>Reuse</i>	Menerapkan proses reduce dan reuse bahan baku dan air	4	
			Menerapkan proses reduce dan reuse bahan baku	3	
			Menerapkan proses reduce bahan baku dan air	2	
			Menerapkan proses reduce bahan baku	1	
			Belum menerapkan proses reduce dan reuse	0	
		A.5.2 Peningkatan Teknologi Proses dan Mesin/Peralatan	Melakukan penggantian mesin/peralatan	4	
			Melakukan modifikasi mesin/peralatan	3	
			Sudah ada perencanaan penggantian mesin/peralatan	2	
			Sudah ada perencanaan modifikasi mesin/peralatan	1	
			Belum ada perencanaan penggantian atau modifikasi mesin/peralatan	0	
		A.5.3 Penerapan SOP proses produksi (operasional mesin/peralatan, material <i>input</i> bahan baku, <i>maintenance</i> mesin/peralatan)	Tersedia SOP/Instruksi Kerja/Form Kerja dengan lengkap, dilaksanakan seluruhnya	4	
			Tersedia SOP/Instruksi Kerja/Form Kerja dengan lengkap, dilaksanakan sebagian saja	3	
			Tersedia SOP/Instruksi Kerja/Form Kerja, tapi tidak lengkap dan dilaksanakan seluruhnya	2	
			Tersedia SOP/Instruksi Kerja/Form Kerja, tapi tidak lengkap dan dilaksanakan sebagian saja	1	
			Belum ada SOP sama sekali	0	
		A.5.4 Tingkat produk <i>reject</i> terhadap total produk	≤ 1%	4	
			1% < x ≤ 1,5%	3	
			1,5% < x ≤ 2%	2	
			2% < x ≤ 2,5%	1	
			> 2,5%	0	
A.6	Sumber Daya Manusia	A.6.1 Program pelatihan dasar	Program pelatihan dasar yang sesuai dengan kebutuhan industri: 100%	4	
			Program pelatihan dasar yang sesuai dengan kebutuhan industri: 65% ≤ x < 100%	3	
			Program pelatihan dasar yang sesuai dengan kebutuhan industri: 35% < x ≤ 65%	2	
			Program pelatihan dasar yang sesuai dengan kebutuhan industri: 0% < x ≤ 35%	1	
			Belum ada program pelatihan dasar yang sesuai dengan kebutuhan industri	0	
B	PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA				20%
B.1	Limbah	B.1.1 Pengelolaan limbah	Melakukan pengolahan limbah sesuai ketentuan	4	
			Memisahkan dan mengumpulkan limbah berdasarkan jenis	3	
			Melakukan pencatatan volume dan jenis limbah	2	

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot		
		B.1.2 Pemanfaatan limbah	Langsung dibuang sesuai ketentuan yang berlaku	1			
			Belum ada upaya pengelolaan limbah	0			
			Digunakan kembali di perusahaan sendiri untuk proses produksi	4			
			Digunakan kembali di perusahaan sendiri, bukan untuk proses produksi	3			
			Digunakan oleh pihak lain untuk proses produksi	2			
			Digunakan oleh pihak lain, bukan untuk proses produksi	1			
			Belum ada upaya pemanfaatan	0			
			B.1.3 Pengujian kualitas limbah	Dilakukan secara periodik setiap 3 bulan		4	
		Dilakukan secara periodik setiap 6 bulan		3			
		Dilakukan secara periodik setiap 1 tahun		2			
		Dilakukan secara periodik > 1 tahun		1			
		Belum pernah melakukan pengujian kualitas limbah		0			
		B.2 Lingkungan Kerja		8.2.1 Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)		Sudah menerapkan sistem ventilasi (sirkulasi udara) di ruangan proses produksi, menerapkan penggunaan alat perlindungan diri (APD), memasang rambu-rambu K3L dan tersedia alat P3K	4
						Sudah menerapkan penggunaan alat perlindungan diri (APD), memasang rambu-rambu K3L, dan tersedia alat P3K	3
			Sudah memasang rambu-rambu K3L dan tersedia alat P3K			2	
Sudah memasang rambu-rambu K3L	1						
Belum melakukan upaya K3L di atas	0						
B.2.2 Jumlah Karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $75\% < x \leq 100\%$		4				
	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $50\% < x \leq 75\%$		3				
	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $25\% < x \leq 50\%$		2				
Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan $0\% < x \leq 25\%$	1						
Tidak ada karyawan yang terdaftar	0						
C	MANAJEMEN PERUSAHAAN				10%		
C.1 Standar Operasional	C.1.1 Produk	> 45 % produk memiliki sertifikat	4				
		$30\% < x \leq 45\%$ produk memiliki sertifikat	3				
		$15\% < x \leq 30\%$ produk memiliki sertifikat	2				
		$0\% < x \leq 15\%$ produk memiliki sertifikat	1				
		Belum ada produk memiliki sertifikat	0				
	C.1.2 Sistem Manajemen yang	Memiliki perencanaan, mengimplementasikan, melakukan monev dan melakukan rencana aksi sistem manajemen	4				
		Memiliki perencanaan, mengimplementasikan dan melakukan monev	3				

No	Aspek Penilaian	Kriteria	Indikator	Skor	Bobot
		dibuktikan dengan dokumen	Memiliki perencanaan dan sudah mengimplementasikan	2	
			Memiliki perencanaan sistem manajemen	1	
			Belum memiliki perencanaan sistem manajemen	0	
C.2	Charity atau Donasi	C.2.1 Kepedulian terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan sekitar	Ya, konsisten dilakukan setiap 6 bulan	4	
			Ya, konsisten dilakukan setiap 1 tahun	3	
			Ya, kadang-kadang	2	
			Ya, sesuai permintaan masyarakat	1	
			Sampai saat ini belum dilaksanakan	0	
C.3	Penghargaan	C.3.1 Keikutsertaan perusahaan dalam acara-acara yang berkaitan dengan peningkatan usaha terkait	> 3 kegiatan yang diikuti	4	
			3 kegiatan yang diikuti	3	
			2 kegiatan yang diikuti	2	
			1 kegiatan yang diikuti	1	
			Belum ada kegiatan yang diikuti	0	
		C.3.2 Penghargaan di bidang industri dalam kurun waktu 1 tahun terakhir	> 3 penghargaan	4	
			3 penghargaan	3	
			2 penghargaan	2	
			1 penghargaan	1	
			Belum ada penghargaan	0	
C.4	Kesehatan Karyawan	C.4.1 Jumlah Karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan	Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan $75\% < x \leq 100\%$	4	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan $50\% < x \leq 75\%$	3	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan $25\% < x \leq 50\%$	2	
			Jumlah karyawan yang terdaftar dalam jaminan sosial kesehatan $0\% < x \leq 25\%$	1	
			Tidak ada karyawan yang terdaftar	0	

Sumber: Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau

Berikut merupakan skoring penilaian dari industri besar, industri menengah, dan industri kecil, meliputi:

1. Penilaian setiap aspek merupakan jumlah perolehan skor dari setiap aspek dibagi dengan skor maksimal dikali dengan bobot aspek.
 - a. Bobot Aspek Proses Produksi = 70% (0,7). Skor Maksimal Aspek Proses Produksi= 100.
 - b. Bobot Aspek Kinerja Pengelolaan Limbah/Emisi = 20% (0,2). Skor Maksimal Aspek Kinerja Pengelolaan Limbah/Emisi = 20.
 - c. Bobot Aspek Manajemen Perusahaan = 10% (0,1). Skor Maksimal Aspek Manajemen Perusahaan = 32.
2. Total Perolahan Nilai merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing nilai setiap aspek dikali 100.
3. Rumus Perhitungan:

$$\text{Total Skor} = \left(\frac{\text{Jumlah Perolehan Skor A (x)}}{\text{Batas Maksimal Skor A}} \times 0,7 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Perolehan Skor B (y)}}{\text{Batas Maksimal Skor B}} \times 0,2 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Perolehan Skor C (z)}}{\text{Batas Maksimal Skor C}} \times 0,1 \right)$$

Tabel 2.5 Skoring Industri Besar

Aspek Penilaian	Bobot	Jumlah Perolehan Skor	Batas Maks. Skor	Nilai Setiap Aspek
Proses Produksi (A)	70%	x	100	$(x/100) \times 0,7 = N$
Kinerja Pengelolaan Limbah/Emisi (B)	20%	y	20	$(y/20) \times 0,2 = M$
Manajemen Perusahaan (C)	10%	z	32	$(z/32) \times 0,1 = L$
Total Perolahan Nilai: (A+B+C) X 100	$(N+M+L) \times 100 = \text{Hasil Nilai}$			

Sumber: Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau

1. Penilaian setiap aspek merupakan jumlah perolehan skor dari setiap aspek dibagi dengan skor maksimal dikali dengan bobot aspek.
 - a. Bobot Aspek Proses Produksi = 70% (0,7). Skor Maksimal Aspek Proses Produksi= 100.

- b. Bobot Aspek Kinerja Pengelolaan Limbah/Emisi = 20% (0,2).
Skor Maksimal Aspek Kinerja Pengelolaan Limbah/Emisi = 20.
 - c. Bobot Aspek Manajemen Perusahaan = 10% (0,1). Skor Maksimal Aspek Manajemen Perusahaan = 32.
2. Total Perolahan Nilai merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing nilai setiap aspek dikali 100.
 3. Rumus Perhitungan:

$$\text{Total Skor} = \left(\frac{\text{Jumlah Perolehan Skor A (x)}}{\text{Batas Maksimal Skor A}} \times 0,7 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Perolehan Skor B (y)}}{\text{Batas Maksimal Skor B}} \times 0,2 \right) + \left(\frac{\text{Jumlah Perolehan Skor C (z)}}{\text{Batas Maksimal Skor C}} \times 0,1 \right)$$

Tabel 2.6 Skoring Industri Menengah

Aspek Penilaian	Bobot	Jumlah Perolehan Skor	Batas Maks. Skor	Nilai Setiap Aspek
Proses Produksi (A)	70%	x	100	$(x/100) \times 0,7 = N$
Kinerja Pengelolaan Limbah/Emisi (B)	20%	y	20	$(y/20) \times 0,2 = M$
Manajemen Perusahaan (C)	10%	z	32	$(z/32) \times 0,1 = L$
Total Perolahan Nilai: (A+B+C) X 100	$(N+M+L) \times 100 = \text{Hasil Nilai}$			

Sumber: Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau

1. Penilaian setiap aspek merupakan jumlah perolehan skor dari setiap aspek dibagi dengan skor maksimal dikali dengan bobot aspek.
 - a. Bobot Aspek Proses Produk = 70% (0,7). Skor Maksimal Aspek Proses Produksi= 68.
 - b. Bobot Aspek Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Kerja = 20% (0,2). Skor Maksimal Aspek Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Kerja = 28.
 - c. Bobot Aspek Manajemen Perusahaan = 10% (0,1) Skor Maksimal Aspek Manajemen Perusahaan = 24
2. Total Perolahan Nilai merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing nilai setiap aspek dikali 100.
3. Rumus Perhitungan:

$$Total\ Skor = \left(\frac{Jumlah\ Perolehan\ Skor\ A\ (x)}{Batas\ Maksimal\ Skor\ A} \times 0,7 \right) + \left(\frac{Jumlah\ Perolehan\ Skor\ B\ (y)}{Batas\ Maksimal\ Skor\ B} \times 0,2 \right) + \left(\frac{Jumlah\ Perolehan\ Skor\ C\ (z)}{Batas\ Maksimal\ Skor\ C} \times 0,1 \right)$$

Tabel 2.7 Skoring Industri Kecil

Aspek Penilaian	Bobot	Jumlah Perolehan Skor	Batas Maks. Skor	Nilai Setiap Aspek
Proses Produksi (A)	70%	x	68	(x/68) X 0,7 = N
Pengelolaan Lingkungan dan Kesehatan Kerja (B)	20%	y	28	(y/28) X 0,2 = M
Manajemen Perusahaan (C)	10%	z	24	(z/24) X 0,1 = L
Total Perolehan Nilai: (A+B+C) X 100	(N+M+L) X 100 = Hasil Nilai			

Sumber: Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau

Setelah melakukan perhitungan pada masing masing klasifikasi industri baik itu industri besar, menengah, atau kecil, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan pada skor perolehan masing – masing industri yang meliputi:

Tabel 2.8 Klasifikasi Industri Hijau

No	Klasifikasi	Hasil Nilai
1	Level 5	90,1 - 100
2	Level 4	80,1 - 90
3	Level 3	70,1 - 80
4	Level 2	60,1 - 70
5	Level 1	50 - 60

*) Pembulatan nilai klasifikasi hanya diizinkan satu desimal di belakang koma

Sumber: Pedoman Penilaian Penghargaan Industri Hijau

Berikut merupakan penjelasan terhadap hasil dari proses perhitungan tingkatan atau klasifikasi di atas:

1. Program Penghargaan Industri Hijau bersifat partisipatif dan sukarela (*voluntary*). Perusahaan industri yang mendaftarkan diri harus memahami setiap kriteria industri hijau.
2. Perusahaan industri dapat dikategorikan **MEMILIKI KOMITMEN UPAYA PENERAPAN INDUSTRI HIJAU**, jika dapat memenuhi **paling sedikit 50%** dari setiap aspek penilaian.
3. Sedangkan perusahaan industri yang dapat memenuhi setiap aspek penilaian dengan persentase **di atas 90%**, dapat

dikategorikan sebagai perusahaan yang **TELAH MENERAPKAN**
PRINSIP INDUSTRI HIJAU secara berkelanjutan.

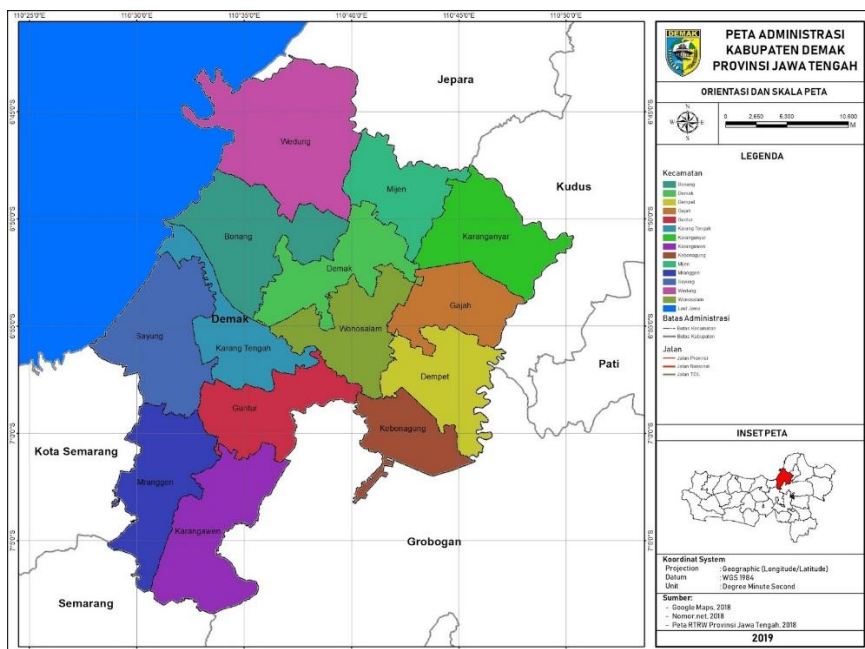
2.3 KONDISI EMPIRIS KABUPATEN DEMAK

2.3.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Demak merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam lingkup administrasi Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah Pantai Utara Jawa. Kabupaten Demak juga menjadi salah satu bagian dari **Wilayah Pengembangan Kedungsepur** yang merupakan kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial, dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan.

Secara geografis, Kabupaten Demak terletak di 6°43"26" - 7°09"43" LS dan 110°27"58" - 110°48"47" BT. Secara administratif, Kabupaten Demak berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut:

Bagian Utara	: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
Bagian Timur	: Kabupaten Kudus dan kabupaten Grobogan
Baguian Selatan	: Kabupaten Semarang Grobogan
Bagiam Barat	: Kota Semarang



Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Demak

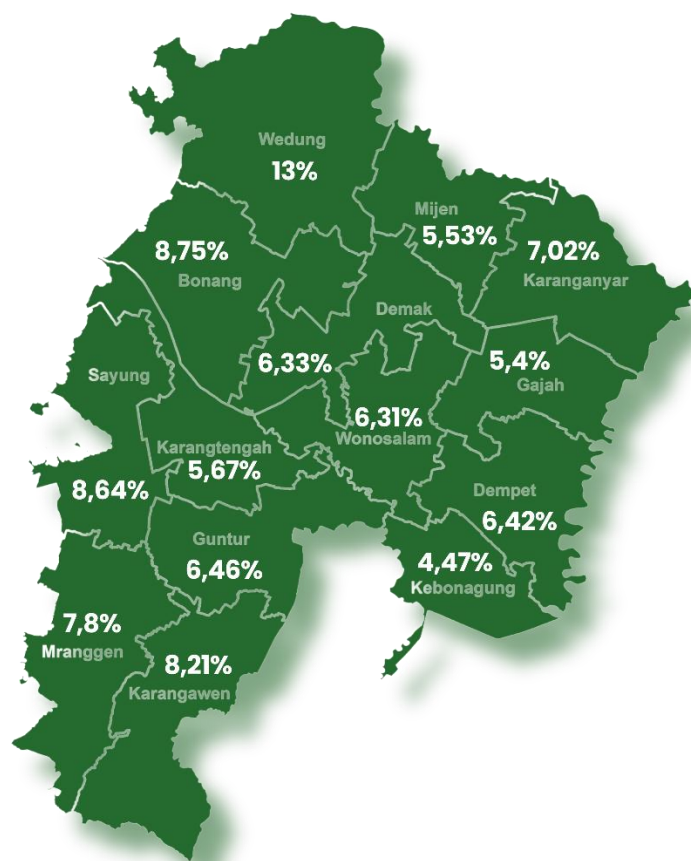
Secara administratif, Kabupaten Demak terbagi menjadi 14 kecamatan dengan total 249 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Demak mencapai 995,32 km² atau setara dengan 3% dari luas keseluruhan Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah rincian luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Demak.

Tabel 2.9 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Demak

Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas Kecamatan (km ²)	Persentase Luas Kecamatan (%)
Mranggen	19	77,59	7,8
Karangawen	12	81,71	8,21
Guntur	20	64,28	6,46
Sayung	20	85,97	8,64
Karangtengah	17	56,44	5,67
Bonang	21	87,06	8,75
Demak	19	63,05	6,33
Wonosalam	21	62,79	6,31
Dempet	16	63,94	6,42
Kebonagung	14	44,46	4,47
Gajah	18	53,73	5,4
Karanganyar	17	69,87	7,02
Mijen	15	55	5,53
Wedung	20	129,42	13
Jumlah	249	995,32	100

Sumber: Kabupaten Demak dalam Angka, 2024

Ditinjau berdasarkan tabel di atas, wilayah kecamatan yang memiliki resio luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Kecamatan Wdung dengan luas wilayah sebesar 13%. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Kebonagung dengan luas sebesar 44,46 atau setara dengan 4,47% dari total luas wilayah Kabupaten Demak.



Gambar 2.3 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Demak

Sumber: Kabupaten Demak dalam Angka, 2024

Lebih lanjut, faktor geografis dari Kabupaten Demak juga dapat dilakukan telaah pada jumlah wilayah desa/kelurahan pada masing – masing kecamatan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Bonang dan Wonosalam yang masing – masing memiliki 21 desa/kelurahan, sementara kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Karangawen yang memiliki 12 wilayah kelurahan.

2.3.2 Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dataran rendah, kawasan pantai/pesisir serta perbukitan, dengan rata-rata ketinggian permukaan antara 0-100 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibatasi atas 3 region, sebagai berikut:

1. Region A: 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karang tengah, Mijen, Sayung dan Wedung;
2. Region B: 3-10 meter, meliputi sebagian besar di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Demak; 10-25 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen; 5-100 meter, meliputi sebagian besar Kec. Karangawen dan Mranggen;
3. Region C: lebih dari 100 meter, meliputi sebagian kecil Kecamatan Karangawen dan Mranggen. Kemiringan Lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif datar, yaitu berada pada lahan dengan kemiringan 0-8%. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini memiliki lahan dengan kemiringan 0-2%, 2-8%, 8-15%, 15-40%, dan lebih besar dari 40%.

2.3.3 Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Ada beberapa jenis tanah di Kabupaten Demak, yaitu: 1) Alluvial hidromorf, terdapat di sepanjang pantai; 2) Regosol, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Mranggen; 3) Gromosol kelabu tua, terdapat di Kecamatan Bonang, Wedung, Kebonagung, Kecamatan Mijen, Karanganyar, Gajah, Demak, Wonosalam, Dempet dan Sayung, dan 4)

Mediteran, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.

Sebagian besar kondisi tanah di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat ditanami secara intensif untuk pertanian. Ketika musim penghujan, tanah bersifat lekat, volumenya membesar, serta lembab sehingga sulit ditanami dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha pertanian. Gejala-gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama terjadi pada wilayah dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut.

Struktur geologi Kabupaten Demak terdiri dari : 1) Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen dan Karangawen; 2) Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen; 3) Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragug dan sebagian di Kecamatan Mranggen; 4) Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kecamatan Mranggen (Desa Sumberejo); dan 5) Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen.

2.3.4 Kondisi Hidrologi

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Demak terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air. Sumber air meliputi air permukaan (sungai, embung dan bendungan) dan air tanah pada cekungan air tanah. Kabupaten Demak dilewati 12 sungai yaitu Sungai

Serang, Kali Wulan, Kali Kenceng, Kali Loben, Kali Jajar, Kali Tuntang Lama, Kali Jragung, Kali Setu, Kali Dolog, Kali daleman, Kali Mondoliko dan Kali Babon. Cekungan air tanah yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu cekungan air tanah Kudus dan cekunagan air tanah Semarang-Demak.

Prasarana sumber daya air terdiri atas sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir dan rob, jaringan air baku untuk air bersih dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna. Kabupaten Demak saat ini memiliki sistem jaringan irigasi primer yang berada di 13 daerah irigasi (DI) yaitu:

1. Daerah Irigasi Sedadi;
2. Daerah Irigasi Glapan Timur;
3. Daerah Irigasi Glapan Barat;
4. Daerah Irigasi Klambu Kiri;
5. Daerah Irigasi Jragung;
6. Daerah Irigasi Guntur;
7. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Baru;
8. Daerah Irigasi Penggaron;
9. Daerah Irigasi Sumberejo;
10. Daerah Irigasi Polder Batu;
11. Daerah Irigasi Gablok;
12. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;
13. Daerah Irigasi Dolok;

Selain ketiga belas daerah irigasi tersebut, saat ini sedang dikembangkan Daerah Irigasi Suka Baru, yang akan dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan di Kecamatan Bonang yang selama ini hanya mengandalkan air hujan dan irigasi non teknis.

2.3.5 Kondisi Demografi

Demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika populasi manusia melalui analisis statistik terkait jumlah, struktur, dan distribusi penduduk. Studi demografi secara umum mencakup aspek-aspek seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, serta distribusi usia dan jenis kelamin dalam suatu populasi. Data demografi menjadi sangat penting dalam menggambarkan perubahan populasi suatu wilayah atau negara dari waktu ke waktu. Pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan kerap memanfaatkan data ini sebagai dasar dalam merencanakan serta melaksanakan kebijakan dan strategi yang relevan dan efektif.

Kajian mengenai populasi suatu wilayah juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap pembangunan daerah tersebut. Penduduk sebagai sumber daya manusia (SDM) memainkan peran penting dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai tenaga penggerak, tetapi juga penerima manfaat dari hasil pembangunan, menciptakan hubungan timbal balik yang positif. Populasi dapat dianggap sebagai aset berharga bagi pembangunan jika memiliki kualitas yang baik, namun sebaliknya, dapat menjadi beban apabila kualitasnya rendah. Adanya data demografi Kabupaten Demak, misalnya, memberikan gambaran yang penting bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pembangunan wilayah tersebut.

Berikut merupakan rincian data demografi Kabupaten Demak.

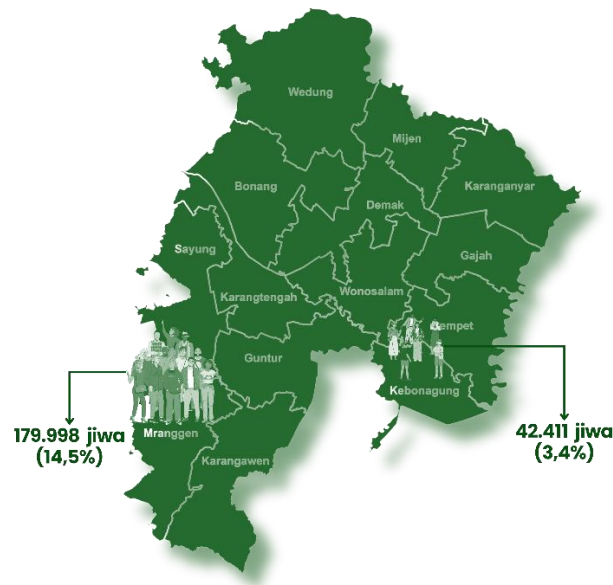
Tabel 2.10 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Per km ²)
Mranggen	179.998	2.319,86
Karangawen	97.572	1.194,13
Guntur	89.845	1,397,71
Sayung	107.555	1.251,08
Karantengah	71.284	1.263,00

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Per km ²)
Bonang	109.185	1.254,14
Demak	112.974	1.791,82
Wonosalam	88.179	1.404,35
Dempet	61.922	968,44
Kebonagung	42.411	953,91
Gajah	54.126	1.007,37
Karanganyar	79.809	1.142,25
Mijen	60.323	1.096,78
Wedung	85.327	659,3
Jumlah	1.240.510	1.246,34

Sumber: Kabupaten Demak dalam Angka, 2024

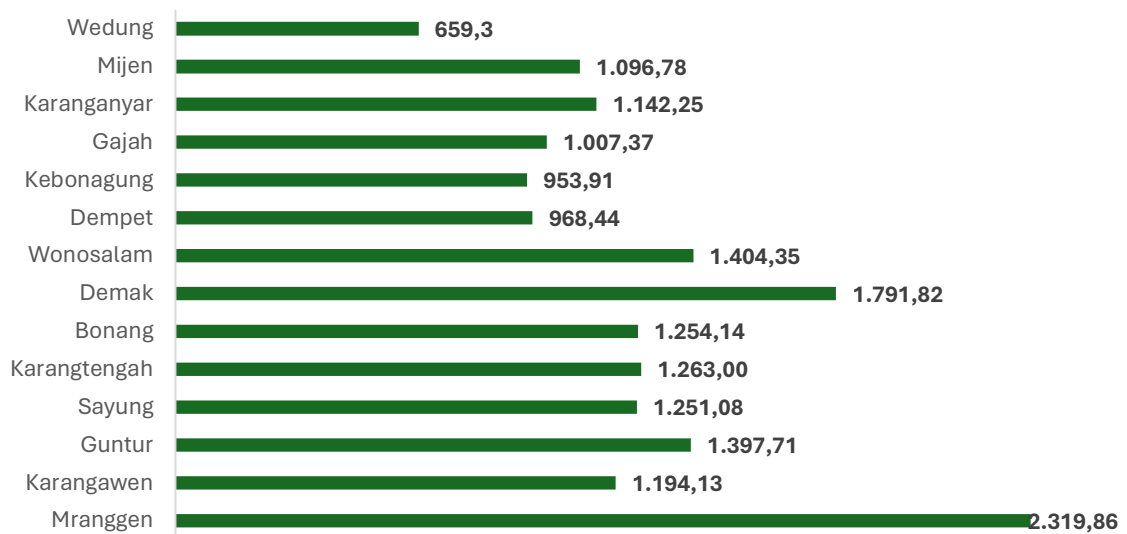
Ditinjau berdasarkan jumlah penduduknya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah pada Kecamatan Mranggen yaitu 179.998 jiwa atau 14,5% dari total keseluruhan jumlah penduduk. Sebaliknya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah pada Kecamatan Kebonagung dimana hanya memiliki 42.411 penduduk atau setara dengan 3,4% dari total jumlah penduduk. Jika melihat tata letak wilayahnya, hal ini tentu menjadi suatu fenomena yang wajar dimana Kecamatan Mranggen sendiri merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.4 Wilayah Kecamatan dengan Jumlah Penduduk Terbanyak dan Terkecil

Sumber: Sumber: Kabupaten Demak dalam Angka, 2024

Telaah lebih lanjut mengenai aspek demografi di Kabupaten Demak dilakukan pada tingkat kepadatan penduduk per kecamatan. Kecamatan Mranggen memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 2.319,86 jiwa/km². Sementara itu, Kecamatan Wedung memiliki kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Demak, dengan tingkat kepadatan sebesar 659,3 jiwa/km².



Gambar 2.5 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2023

Sumber: Kabupaten Demak dalam Angka, 2024

Aspek demografi di Kabupaten Demak juga dianalisis berdasarkan struktur usia penduduknya. Berdasarkan rasio antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, terdapat lebih banyak penduduk laki-laki di Kabupaten Demak, dengan total 625.934 jiwa, dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang mencapai 614.576 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Demak berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

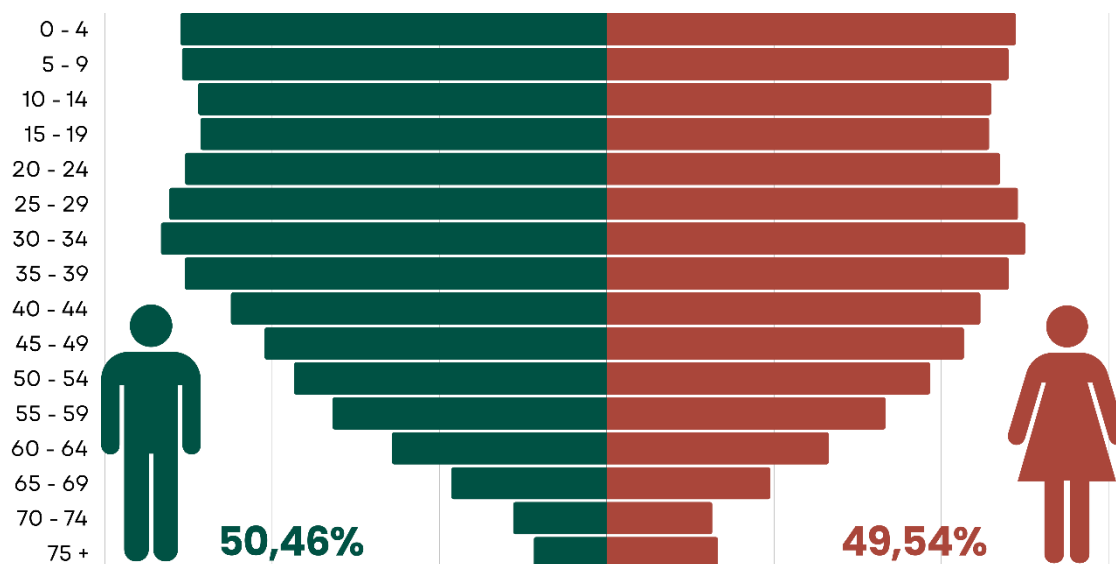
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	50.995	48.930	99.925
5-9	50.791	48.060	98.851
10-14	48.853	46.001	94.854
15-19	48.591	45.734	94.325
20-24	50.406	47.017	97.423
25-29	52.295	49.176	101.471
30-34	53.308	50.038	103.346
35-39	50.459	48.096	98.555
40-44	44.951	44.687	89.638
45-49	40.913	42.719	83.632
50-54	37.400	38.680	76.080
55-59	32.797	33.356	66.153
60-64	25.69	26.562	52.252
65-69	18.578	19.577	38.155
70-74	11.190	12.629	23.819
75+	8.717	13.314	22.031
Jumlah	625.934	614.576	1.240.510

Sumber: Kabupaten Demak dalam Angka, 2024

Apabila ditinjau berdasarkan struktur usia, penduduk dengan rentang usia produktif (15-64 tahun) memiliki rasio dominasi yang tinggi terhadap jumlah total penduduk di Kabupaten Demak yang menindikasikan terdapat potensi yang besar dalam segi tenaga kerja di wilayah Kabupaten Demak. Penduduk di rentang kelompok usia 30-34 tahun memiliki jumlah terbanyak yaitu 103.346 jiwa, diikuti oleh kelompok usia 25-29 tahun dengan 101.471 jiwa. Dominasi kelompok usia produktif ini memberikan

keuntungan strategis bagi Kabupaten Demak dalam menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelompok usia ini cenderung memiliki produktivitas tinggi, keterampilan kerja yang matang, serta daya saing yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, seperti industri, perdagangan, dan jasa.



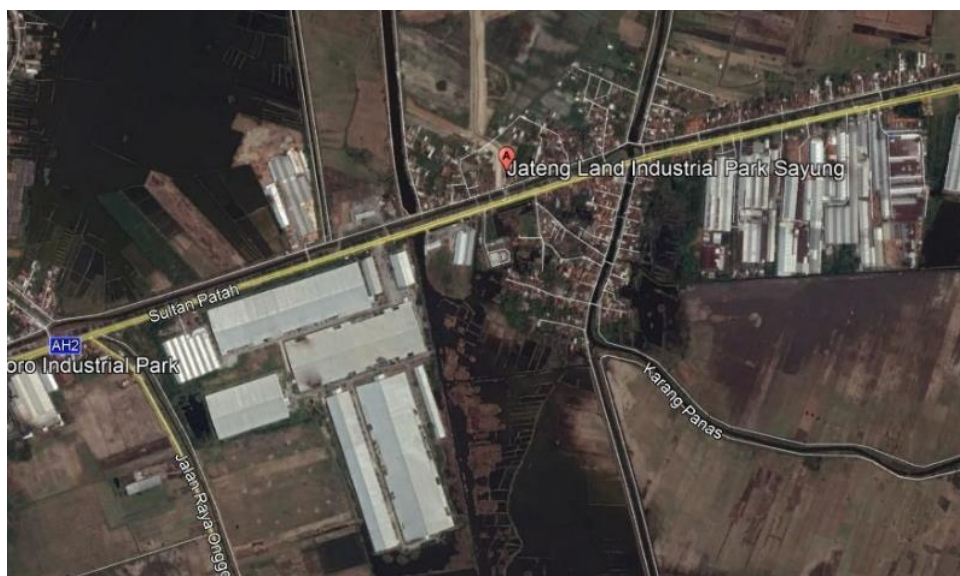
Gambar 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Demak Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber: Kabupaten Demak dalam Angka, 2024

2.3.6 Kawasan Industri Kabupaten Demak

Kawasan Industri yang terdapat di Kabupaten Demak saat ini berjumlah 4 kawasan. Dimana 1 kawasan berupa Kawasan Industri eksisting, dan 3 kawasan lainnya masih dalam tahap rencana yang artinya kegiatan industrinya belum berjalan. Satu Kawasan Industri eksisting itu bernama Kawasan Industri Sayung atau yang lebih dikenal dengan Jatengland, dimana itu merupakan nama dari pengelola Kawasan Industri tersebut. Sedangkan 3 Kawasan Industri yang masih dalam tahap rencana dikelola oleh PT. Buana Cipta Megah, PT. Jasa Mas Graha Utama, dan PT Mitra Bumi Dadi Mukti. Permasalahan yang dihadapi Kawasan Industri di Kabupaten Demak diantaranya ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih, dan pengelolaan persampahan.

Kawasan Industri eksisting yang berada di Kabupaten Demak ialah Kawasan Industri Sayung. Kawasan Industri sayung berlokasi di Desa Batu, Kecamatan Karang Tengah. Kawasan Industri ini diperuntukkan untuk industri menengah dan industri besar. Lokasi Kawasan Industri ini berada dekat dengan Jalan Nasional (jalan raya Semarang – Surabaya), dan berjarak ± 2 km dari jalan tol Semarang – Demak. Kawasan Industri sayung berdekatan dengan beberapa infrastruktur diantaranya berjarak ± 15 km dengan Pelabuhan Tanjung Emas, berjarak ± 25 km dengan Bandara Ahmad Yani dan berjarak ± 20 km dari Stasiun Tawang.



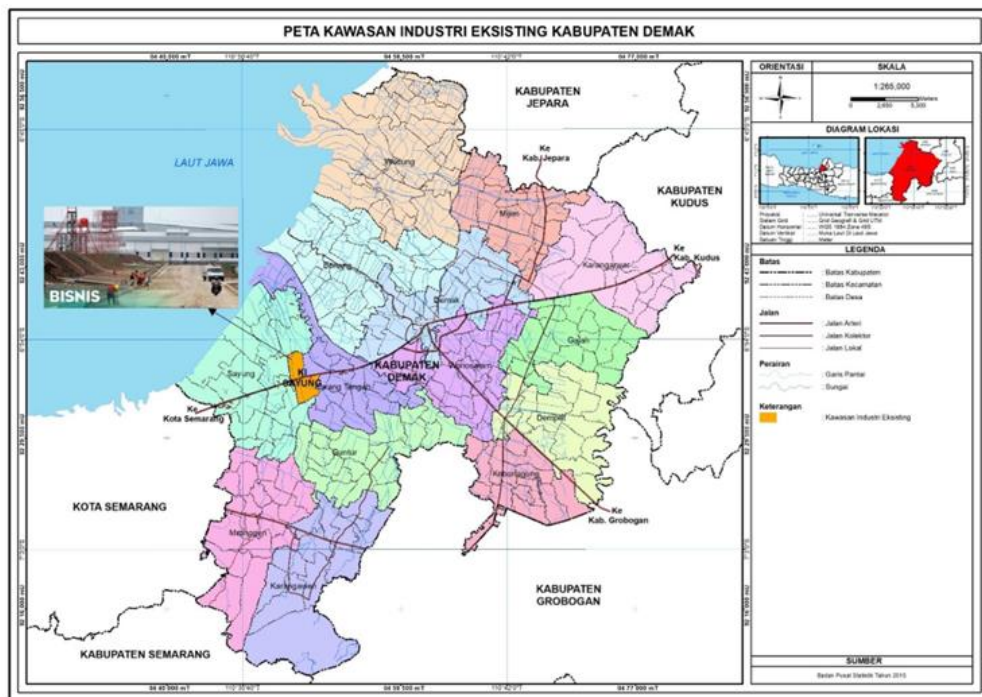
Gambar 2.7 Kawasan Industri Eksisting Kabupaten Demak

Adanya infrastruktur tersebut di sekitar Kawasan Industri tentu sangat membantu kegiatan operasional industri menjadi lebih mudah dan efektif selain hanya mengandalkan distribusi melalui transportasi darat, khususnya proses ekspor – impor.

Tabel 2.12 Kawasan Industri eksisting di Jawa Tengah

No	Kawasan Industri	Pengelola	Alamat	Luas lahan	Jumlah Tenant existing
1	KI Wijayakusuma	PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Jl. Raya Semarang Kendal KM. 12, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang	250	45

No	Kawasan Industri	Pengelola	Alamat	Luas lahan	Jumlah Tenant existing
2	KI Bukit Semarang Baru	PT. Karyadeka Alam Lestari	Jl. RM. Hadisubroto KM.16 Kel. Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang	250	13
3	KI Sinar Centra Cipta	PT. SINAR CENTRA CIPTA	Komplek Jalur Lingkar Tanjung Mas, Kel. Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	95	10
4	KI Tanjung Mas	PT. Lamicitra Nusantara	Jl. Coaster No.8, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	101	10
5	KI LIK Bugangan	PT. TANAH MAKMUR	Jl. Raya Kaligawe KM. 4, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang	100	219
6	KI Tambak Aji	PT. GUNA MEKAR INDUSTRI	Jl. Tambak Aji No.7, Kel. Tambak Aji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	130	43
7	KI Cilacap	Perusahaan Daerah Kawasan Industri Cilacap	Jl. MT. Haryono No. 167 Lomanis, Cilacap 53211	154	19
8	KI Kendal	PT. Kawasan Industri Kendal	Jl. Semarang – Kendal, Arteri Km. 19 Kel. Brangsong, Kec. Brangsong, Kab. Kendal	2200	44
9	KI Terboyo Megah	PT. Merdeka Wirastama Imam	Jl. Kaligawe KM.6, Kel. Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang	300	53
10	KI Terboyo Park	PT. Merdeka Wirastama Imam	Jl. Kaligawe KM.6, Kel. Terboyo Wetan, Kec. Genuk, Kota Semarang	300	106
11	KI Candi	PT. Indo Perkasa Usahatama	Jl. Gatot Subroto, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang	300	186
12	KI Sayung	PT. Jatengland	Jl. Raya Semarang- Demak, KM 14,7, Desa Batu Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak	300	23



Gambar 2.8 Peta Kawasan Industri Eksisting Kabupaten Demak

Selain Kawasan Industri eksisting, di wilayah Kabupaten Demak juga akan direncanakan kawasan industri baru. Kabupaten Demak sendiri melalui perencanaan tata ruang terpadu telah merencanakan tiga lokasi yang terletak di Kecamatan Sayung, Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Bonang. Kawasan Industri rencana ini sudah ditentukan lokasinya, bahkan ada beberapa Kawasan Industri yang sudah memiliki pengelola.

Ketiga perusahaan yang mengajukan rencana pembangunan Kawasan Industri tersebut terkendala dari izin usaha yang diberikan pemerintah. Terkendalanya izin usaha tersebut dikarenakan beberapa perusahaan tidak memenuhi syarat pembangunan usaha dan lokasi pembangunan yang dipilih tidak diperuntukkan untuk Kawasan Industri.

Tabel 2.13 Kawasan Industri Rencana Kabupaten Demak

No	Kawasan Industri	Pengelola	Lokasi	Rencana Luasan
1	PT. Jasa Mas Graha Utama	PT. Jasa Mas Graha Utama	Kabupaten Demak	300
2	PT. Mitra Bumi Dadi Mukti	PT. Mitra Bumi Dadi Mukti	Kabupaten Demak	300
3	PT. Buana Cipta Megah	PT. Buana Cipta Megah	Kabupaten Demak	300



BAB - 3

METODOLOGI

Bagian ini membahas mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penyelesaian kajian ini dimana terdiri atas kerangka pikir, pendekatan pekerjaan, tahapan penyelesaian, serta jadwal pelaksanaan

3.1 PENDEKATAN PEKERJAAN

Dalam melakukan penyusunan dokumen Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak ini, digunakanlah metode pendekatan yang nantinya mampu merumuskan strategi yang sistematis dan komprehensif guna menciptakan industri yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Grand Desain Pembangunan ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif atau yang sering disebut dengan ***mixed method***.

Penggunaan *mixed method* memberikan fleksibilitas dalam menyusun grand desain yang lebih holistik dan berdasarkan bukti yang kuat, yang pada akhirnya memfasilitasi perencanaan yang lebih akurat dan implementasi yang lebih sukses. Metode *mix method* adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing metode.

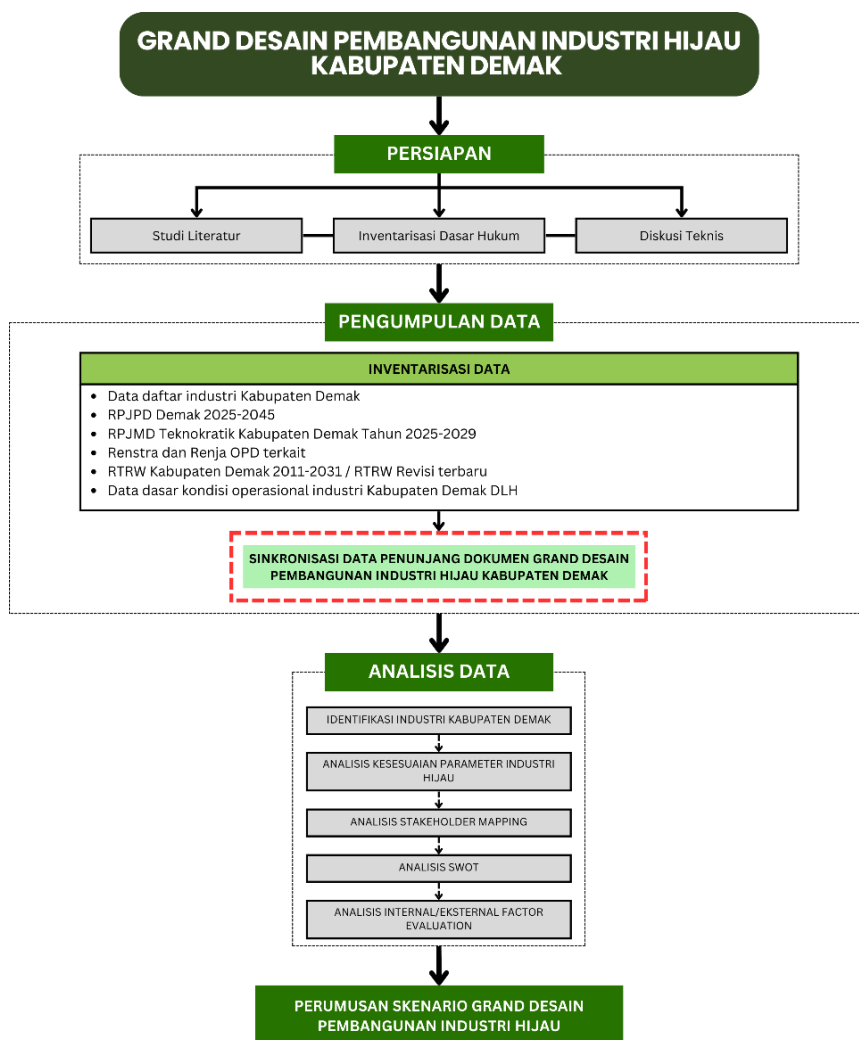
Dalam penyusunan dokumen ini, Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang konteks sosial, budaya, dan lingkungan yang relevan dengan industri hijau. Ini penting untuk memahami persepsi stakeholder, hambatan dan tantangan yang dihadapi, serta potensi inovasi dan kolaborasi yang ada. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menganalisis data numerik yang berkaitan dengan faktor-faktor teknis, ekonomi, dan lingkungan dari industri hijau. Metode ini

memungkinkan penilaian objektif terhadap dampak dan hasil dari kebijakan atau strategi yang diusulkan.

Dengan menggunakan ***mixed method***, penyusunan grand desain ini dapat menggabungkan kekuatan dari kedua pendekatan. Data kualitatif memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual, sementara data kuantitatif memberikan bukti yang lebih terukur dan objektif. Kedua pendekatan ini bersama-sama memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan, peluang, dan potensi implementasi industri hijau.

3.2 KERANGKA PIKIR

Berikut merupakan kerangka pikir dari penyusunan Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak.

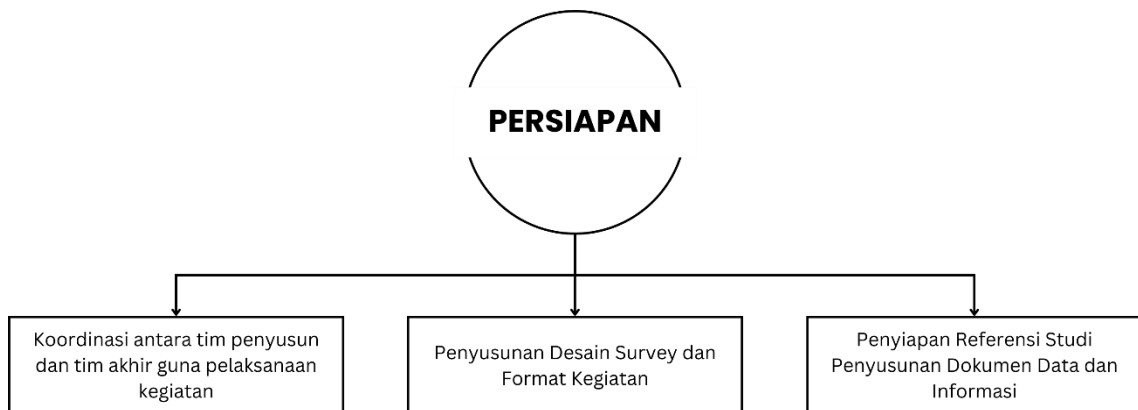


Gambar 3.1 Kerangka Pikir Pekerjaan

3.3 TAHAP PERSIAPAN

Tahap persiapan adalah proses untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, yang akan menjadi dasar seluruh rangkaian kegiatan. Ruang lingkup persiapan ini akan diselesaikan dalam bulan pertama pelaksanaan kegiatan penyusunan, dimulai sejak SPMK diterbitkan. Dalam metode pelaksanaan pekerjaan ini, terdapat empat aspek utama yang akan dijelaskan: (1) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen kajian ini; (2) metode pengumpulan data yang menjelaskan cara mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis; (3) proses analisis yang meliputi desain, proses, dan teknik analisis data; serta (4) rencana kerja untuk mendukung penyusunan Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak yang efektif dan efisien.

Lingkup kegiatan persiapan meliputi:



Gambar 3.2 Lingkup Kegiatan Persiapan

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ini dari awal sampai akhir antara tim penyusun dan tim teknis

Tujuan → Koordinasi dengan tim teknis
→ Menyepakati rencana dan metodologi penyusunan
→ Mengumpulkan data dan informasi awal terkait Industri Hijau

Metode → Diskusi dan koordinasi

- Langkah → Diskusi kesiapan tim dalam menjalankan lingkup pekerjaan dan kebutuhan penyiapan pekerjaan
→ Penyamaan pemahaman lingkup tugas tim penyusun dalam kegiatan penyusunan
- Output → Rencana kerja dan metodologi yang telah disepakati
→ Data dan informasi terkait Industri Hijau

2. Penyusunan Desain Survey dan Format Kegiatan

- Tujuan → Menyiapkan desain survey yang diperlukan untuk keperluan penyusunan
→ Menyusun format – format untuk kebutuhan baik di lapangan maupun pengolahan data dan informasi terkait dengan kondisi kawasan
- Metode → Diskusi dan koordinasi
- Langkah → Penyamaan persepsi dan kesepakatan terkait data dasar yang sudah ada
→ Penyamaan pemahaman lingkup tugas tim penyusun dalam kegiatan penyusunan
→ Penyiapan desain survei
- Output → Data sekunder
→ Format desain survei

3. Penyiapan Referensi Studi Penyusunan Dokumen Data dan Informasi

- Tujuan → Menyiapkan data atau kompilasi referensi Grand Desain Pembangunan Industri Hijau
- Metode → Diskusi dan koordinasi
- Langkah → Koordinasi dengan pihak terkait
→ Penyamaan persepsi dan kesepakatan terkait atau kompilasi referensi desain dan standart terkait dengan Industri Hijau

Output → Gambaran dokumen Grand Desain Pembangunan
Industri Hijau Kabupaten Demak

3.4 TAHAP PENGUMPULAN DATA

3.4.1 Mekanisme Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data ini mencakup kegiatan inventarisasi informasi terkait berbagai aspek yang mendukung topik di dalam penyusunan Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak. Pada tahap ini, pengumpulan data berfokus pada dua pendekatan utama: *desk study* dan survei lapangan.

Dalam kegiatan *desk study*, dilakukan studi literatur yang mencakup pencarian informasi dari sumber-sumber terpercaya, seperti internet, buku panduan, modul, artikel ilmiah, serta media lain yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperoleh wawasan teoretis dan data sekunder yang akan menjadi referensi dasar bagi kajian. Penggunaan studi literatur memungkinkan pemetaan terhadap best practices dan standar yang dapat diaplikasikan dalam penyusunan Grand Desain Pembangunan Industri Hijau.

Selain studi literatur, pengumpulan data juga dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan langsung di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan data primer yang mencerminkan kondisi aktual serta pembaruan terkini. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya valid tetapi juga relevan dengan situasi dan kebutuhan di lapangan. Melalui data lapangan yang nyata dan sesuai kondisi terkini, kajian yang disusun diharapkan dapat langsung menargetkan permasalahan dan potensi yang ada secara spesifik, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih akurat dan implementatif.

Secara keseluruhan, tahap pengumpulan data ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi analisis yang akan dilakukan, memastikan bahwa

kajian kelayakan tersebut didukung oleh data yang komprehensif, *up-to-date*, dan mampu mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.

3.4.2 Kebutuhan Data

Dalam rangka menunjang analisis Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak, maka dibutuhkan data – data pendukung seperti dibawah ini.

Tabel 3.1 Kebutuhan Data

No	Kebutuhan Data	Sumber / Wali Data
1	Data daftar industri Kabupaten Demak	• Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian • Bappelitbangda
2	• RPJPD Demak 2025-2045 • RPJMD Teknokratik Kabupaten Demak Tahun 2025-2029	Bappelitbangda
3	RTRW Kabupaten Demak 2011-2031 / RTRW Revisi terbaru	DPUPR
4	Data dasar kondisi operasional industri Kabupaten Demak	DLH
5	Renstra dan Renja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
6	• Regulasi terkait • Standar Industri Hijau • Sertifikasi Industri Hijau	• Bagian Hukum • Website BPK RI • BSKJI

Sumber: Tim Penyusun, 2024

3.5 KOMPONEN ANALISIS

Berikut merupakan komponen – komponen analisis yang akan dilakukan dalam kegiatan penyusunan Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak.

3.5.1 Identifikasi Industri Kabupaten Demak

Kabupaten Demak memiliki potensi industri yang beragam, dengan fokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Sebagai daerah yang terletak di pesisir utara

Pulau Jawa, industri di Kabupaten Demak didominasi oleh sektor-sektor yang terkait dengan sumber daya lokal, seperti perikanan, pertanian, dan pengolahan hasil laut. Selain itu, terdapat juga sektor industri lainnya, seperti industri tekstil, furniture, dan makanan olahan, yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pasar lokal maupun regional.

Untuk mengidentifikasi jenis-jenis industri di Kabupaten Demak, dilakukan analisis berdasarkan data kependudukan, ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur pendukung, dan kebutuhan pasar. Hasil identifikasi menunjukkan adanya konsentrasi industri kecil dan menengah (IKM), yang berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja serta mendukung perekonomian daerah.

3.5.2 Analisis Kesesuaian Parameter Industri Hijau

Analisis ini dilakukan dengan berdasarkan pada standar industri hijau dari undang-undang dan peraturan mengenai standar industri hijau serta berdasarkan penilaian industri hijau diadopsi dari *assessment* penghargaan industri hijau.

Terdapat parameter dalam standar industri hijau yang mana tergantung dari komoditas industri yang dianalisis. Analisis industri hijau secara umum ada dua parameter, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Selain itu, dalam penilaian industri hijau terbagi atas penilaian industri yang bergantung dari jenis industrinya apakah tergolong dari industri besar, industri menengah dan industri kecil. Analisis ini menilai parameter proses produksi, kinerja pengelolaan limbah/emisi dan manajemen Perusahaan yang mana parameter tersebut memuat kriteria masing-masing. Selanjutnya, kriteria tersebut diskoring dan ditentukan klasifikasi industrinya apakah termasuk industri hijau atau belum industri hijau.



Gambar 3.3 Standar Industri Hijau

Sumber: Kemenperin, 2017

3.5.3 Analisis Stakeholder Mapping

Analisis pemetaan stakeholder adalah proses strategis untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelompokkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau kepentingan dalam suatu proyek atau kebijakan. Tujuannya adalah memastikan keterlibatan yang efektif dari semua pihak yang relevan, baik sebagai pendukung, penggerak, maupun pengawas. Dalam proses ini, stakeholder dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruhnya, yang biasanya terbagi dalam kategori utama seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Melalui pemetaan ini, organisasi dapat

menentukan strategi komunikasi dan kolaborasi yang tepat untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan bersama.

Proses pemetaan stakeholder melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, survei, dan analisis dokumentasi untuk memahami kebutuhan, harapan, dan peran masing-masing pihak. Hasil pemetaan memberikan panduan dalam menentukan pendekatan komunikasi yang personal, alokasi sumber daya yang tepat, dan pengelolaan konflik yang mungkin muncul. Dengan melibatkan stakeholder secara optimal, proyek atau kebijakan dapat berjalan lebih efisien, mendapatkan dukungan luas, dan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan. Pemetaan stakeholder yang efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan proyek atau kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua pihak.



Gambar 3.4 Stakeholder Mapping

Sumber: Digital Leadership, 2023

Analisis stakeholder mapping dilakukan untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi berbagai pihak dalam mendukung pengembangan

industri hijau di Kabupaten Demak. Pemerintah daerah memiliki peran sentral sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator, seperti melalui penyediaan insentif untuk pelaku usaha yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan pengawasan terhadap penerapan standar industri hijau. Dinas terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian, bekerja sama dalam mendukung pengembangan kawasan industri yang berwawasan lingkungan.

3.5.4 Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*)

Analisis SWOT adalah alat strategis yang digunakan untuk memahami posisi organisasi atau proyek dalam konteks kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapinya. Kekuatan dan kelemahan adalah faktor internal, sementara peluang dan ancaman berasal dari luar organisasi. Melalui analisis ini, manajer dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki serta aspek-aspek yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Menurut Gürel dan Tat (2017), analisis SWOT sering digunakan karena kemampuannya untuk menyederhanakan proses pengambilan keputusan strategis dengan cara yang mudah dipahami dan sistematis.



Gambar 3.5 Ilustrasi Analisis SWOT

Kekuatan dalam analisis SWOT melibatkan elemen-elemen internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi, seperti sumber daya, kapabilitas, atau keunggulan kompetitif yang dimiliki. Organisasi yang memiliki produk inovatif, merek yang kuat, atau tenaga kerja yang terampil dapat dianggap memiliki kekuatan yang mendukung keberhasilan mereka di pasar. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan aspek-aspek tersebut dalam memperluas pangsa pasar dan meningkatkan profitabilitas (Dyson, 2004). Misalnya, merek yang dikenal dan dihormati dapat menjadi kekuatan besar yang membantu organisasi bertahan dalam persaingan yang ketat.

Di sisi lain, kelemahan adalah elemen internal yang dapat menghambat kinerja organisasi. Faktor-faktor seperti keterbatasan dana, kurangnya teknologi canggih, atau tenaga kerja yang tidak terlatih menjadi kelemahan yang perlu diatasi. Kelemahan dapat menimbulkan kerugian kompetitif bagi organisasi, terutama jika pesaing memiliki keunggulan dalam aspek yang sama (Helms & Nixon, 2010). Oleh karena itu, mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan menjadi langkah penting dalam proses pengembangan organisasi agar lebih siap menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan eksternal.

Peluang adalah faktor eksternal yang dapat memberi manfaat bagi organisasi. Peluang ini bisa muncul dalam bentuk perubahan teknologi, regulasi yang menguntungkan, atau tren pasar yang baru. Menurut Puyt et al. (2020), memahami dan merespons peluang eksternal adalah langkah krusial untuk mengembangkan strategi proaktif yang dapat meningkatkan daya saing organisasi. Organisasi yang mampu mengenali dan merespons peluang dengan cepat cenderung memiliki keunggulan dalam menarik pasar baru atau memperkenalkan produk yang relevan dengan permintaan konsumen.

Terakhir, ancaman adalah faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko bagi organisasi. Faktor-faktor seperti persaingan yang ketat, fluktuasi ekonomi, dan perubahan kebijakan dapat menjadi ancaman yang menghambat keberhasilan organisasi (Pickton & Wright, 1998). Analisis ancaman memungkinkan organisasi untuk mengantisipasi risiko dan mempersiapkan strategi mitigasi, sehingga risiko tersebut dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, analisis SWOT memberikan pandangan holistik mengenai posisi strategis organisasi dan membantu dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang.

3.5.5 Analisis Internal/Eksternal Factor Evaluation

Analisis *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE) adalah alat strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu organisasi atau proyek. Analisis IFE fokus pada faktor internal yang memengaruhi kinerja organisasi, seperti sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan budaya kerja. Faktor-faktor ini dianalisis untuk memahami keunggulan kompetitif yang dimiliki serta area yang membutuhkan perbaikan. Dengan memahami faktor internal secara mendalam, organisasi dapat merumuskan strategi yang memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan.

Sementara itu, analisis EFE digunakan untuk menilai pengaruh faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi, perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, dan tren pasar. Dengan mengevaluasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal, organisasi dapat mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi serta memanfaatkan peluang untuk memperkuat posisinya di pasar. Kedua analisis ini, jika digunakan secara bersamaan, memberikan gambaran komprehensif yang membantu organisasi

merumuskan strategi yang adaptif, relevan, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi dinamika internal maupun eksternal.

Tabel 3.2 Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

Aspek Internal	Bobot	Rating
Kekuatan (<i>Strength</i>)		
Ada Kebijakan dan Regulasi Pemprov (Oerda RPIP) dan Pemkab (Perda RPIK)	0,14	4
Ada program dan kegiatan OPD lintas sektoral terkait industri hijau	0,13	4
Ada laporan kegiatan terkait industri hijau	0,15	4
Ada lembaga sertifikasi industri hijau	0,14	4
Ada program penilaian kinerja industri hijau (PROPER)	0,13	4
Kelemahan (<i>Weakness</i>)		
Sinergritas kegiatan antar OPD dan industri belum optimal	0,08	2
Daya saing industri rendah	0,05	2
Pengetahuan dan kesadaran pentingnya industri hijau masih rendah	0,07	2
Tergantung pemerintah pusat	0,06	2
Dana intensif masih rendah	0,05	2

Tabel 3.3 Matriks *External Factor Evaluation* (EFE)

Aspek Eksternal	Bobot	Rating
Peluang (<i>Opportunities</i>)		
Komitmen Kepala Daerah besar terkait industri hijau	0,14	4
Ada regulasi industri hijau	0,13	4
Ada alokasi anggaran program industri hijau	0,11	3
Ada dukungan forum CSR	0,13	4
Ada juknis industri hijau bagi daerah	0,14	4
Tantangan (<i>Threats</i>)		
Pergantian pejabat/penanggung jawab program	0,08	2
Kesadaran masyarakat rendah terkait industri hijau	0,07	2
Kendala geografis dan akses informasi	0,06	2
Kebiasaan membuang sampah dan limbah sembarangan	0,07	2
Persoalan Kesehatan lingkungan	0,06	2

3.6 JADWAL PELAKSANAAN

Adapun jadwal tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah 60 (enam puluh) hari mulai dari, penyusunan laporan, diskusi dengan pengguna jasa, survei lapangan, dan menuliskan hasil report. Jadwal pelaksanaan secara tentatif diringkaskan dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Uraian Kegiatan	Bulan Ke-							
		I				II			
		Minggu Ke-				Minggu Ke-			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyiapan Berkas Administrasi								
2	Persiapan Penelitian								
3	Penyusunan Laporan Pendahuluan								
4	Pemaparan Laporan Pendahuluan								
5	Pengambilan Data								
6	Pengolahan Data dan Analisis								
7	Penyusunan Laporan Akhir								
8	Pemaparan Laporan Akhir								
9	Penyerahan Buku Kajian dan <i>Hard Disk External (soft file)</i>								

Sumber: Tim Penyusun, 2024

BAB - 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisikan analisis serta pembahasan dalam topik grand desain pembangunan industri hijau di wilayah Kabupaten Demak

4.1 IDENTIFIKASI PROFIL INDUSTRI KABUPATEN DEMAK

Kabupaten Demak memiliki beragam potensi industri yang terus berkembang, dengan fokus pada sektor-sektor unggulan yang sesuai dengan karakteristik geografis dan sumber daya wilayahnya. Sebagai salah satu daerah di pesisir utara Pulau Jawa, Kabupaten Demak mengandalkan sektor-sektor berbasis sumber daya lokal seperti perikanan, pertanian, dan pengolahan hasil laut. Sektor-sektor ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah, didukung oleh melimpahnya sumber daya alam serta keahlian masyarakat setempat.

Selain sektor berbasis sumber daya alam, Kabupaten Demak juga memiliki potensi besar di bidang industri lainnya, seperti tekstil, furniture, dan makanan olahan. Industri-industri ini mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya permintaan pasar, baik di tingkat lokal maupun regional. Kombinasi antara keberadaan industri tradisional berbasis kearifan lokal dan sektor modern yang inovatif menciptakan dinamika ekonomi yang beragam.

Untuk memetakan jenis-jenis industri yang berkembang di wilayah ini, dilakukan analisis mendalam dengan mempertimbangkan beberapa faktor kunci, yaitu data kependudukan, ketersediaan sumber daya alam, infrastruktur pendukung, dan kebutuhan pasar. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditemukan bahwa Kabupaten Demak memiliki konsentrasi yang signifikan pada sektor industri kecil dan menengah (IKM). Sektor IKM ini tidak hanya berkontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemetaan terhadap profil industri Kabupaten Demak dilakukan dengan merujuk pada regulasi yang ada yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi Di Kementerian Perindustrian. Dalam hal perumusan Grand Desain Industri Hijau, maka Pemerintah Kabupaten Demak perlu melakukan prosedur pengklasifikasiain terhadap data industri yang beropeasi di Kabupaten Demak.

Berikut merupakan alur pemetaan profil industri Kabupaten Demak.



Gambar 4.1 Kerangka Alur Pemetaan Industri Kabupaten Demak

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Proses ini diawali dengan pengumpulan data terkait industri di berbagai wilayah. Data ini digunakan untuk mengelompokkan industri berdasarkan skala usaha, yaitu menjadi industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk

memahami struktur dan kapasitas industri yang ada, serta bagaimana setiap skala usaha memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Klasifikasi jenis industri mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020. Berdasarkan regulasi ini, industri besar mencakup sektor-sektor utama seperti hasil hutan dan perkebunan, tekstil, kulit, alas kaki, serta pengolahan makanan, hasil laut, dan perikanan. Industri-industri ini menjadi pilar penting dalam perekonomian karena melibatkan produksi dalam skala besar yang mampu memenuhi permintaan pasar lokal maupun ekspor. Di sisi lain, industri menengah dan kecil fokus pada sektor yang serupa namun dengan skala yang lebih kecil, seperti pengolahan pangan, barang berbahan kayu, dan furniture. Peran industri kecil dan menengah sangat signifikan, terutama dalam mendukung ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan komunitas setempat.

Identifikasi dan pengelompokan industri ini tidak hanya bertujuan untuk memetakan potensi setiap sektor tetapi juga untuk menentukan prioritas dalam pengembangan kebijakan dan program strategis. Misalnya, sektor industri besar yang memiliki kapasitas produksi tinggi mungkin menjadi target utama untuk penerapan teknologi modern dan efisiensi energi. Sementara itu, industri kecil dan menengah lebih diarahkan pada penguatan inovasi lokal dan pengembangan nilai tambah produk agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

Berikut adalah pembagian jenis industri berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020.

Tabel 4.1 Jenis Industri Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020

Direktorat	Jenis Industri
Jenis Industri Binaan Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, Dan Tekstil	Industri Kimia Hulu
	Industri Kimia Hilir Dan Farmasi
	Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam
	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki
	Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan

Direktorat	Jenis Industri
Jenis Industri Binaan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika	Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian
	Industri Elektronika Dan Telematika
	Industri Logam
Jenis Industri Binaan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, Dan Aneka	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur
	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka
	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut
Jenis Industri Binaan Direktorat Jenderal Industri Agro	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan
	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan
	Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020

Menindak lanjuti hasil klasifikasi industri di atas, maka didapatkan hasil pemetaan industri di Kabupaten Demak berikut ini.

4.1.1 Industri Besar

Berikut ini adalah rekapitulasi lengkap daftar industri besar di Kabupaten Demak yang disusun berdasarkan jenis dan klasifikasi industrinya hingga tahun 2024. Setiap klasifikasi mencakup sektor industri unggulan yang telah berkembang sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan pasar, seperti industri hasil hutan, tekstil, alas kaki, serta pengolahan makanan dan hasil laut. Data ini juga menjadi acuan strategis dalam perencanaan dan pengembangan industri di masa mendatang.

Tabel 4.2 Daftar Industri Besar Kabupaten Demak Per Tahun 2024 Menurut Jenis dan Klasifikasi Industri

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
1	PT Donlim Technology Indonesia	Industri Elektronika Dan Telematika	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
2	PT APP PURINUSA EKAPERSADA	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain
3	PT DEMAK PUTRA MANDIRI	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Furnitur Lainnya
4	PT SANIHARTO ENGGALHARDJO	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Furniture Dari Kayu, Industri Furniture Dari Logam
5	PT Buana Triarta	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Penggergajian Kayu
6	PT Karya Cipta Unggul Nusantara	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Barang Bangunan Dari Kayu
7	PT Daya Cipta Karya Sempurna	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Penggergajian Kayu, Lamin Board / Bare Core

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
8	PT Surya Rengo Containers	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton
9	PT Bahana Buana Box	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton
10	PT Rimbawana Agungpratama	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Pengolahan Kayu Lapis
11	PT Woodland Furniture Industry	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Furniture Dari Kayu, Furniture
12	PT Cipta Wijaya Mandiri	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Kayu Gergajian, Finger Joint Laminated Board, Log, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Veneer, Industri Kayu Lapis
13	PT Quartindo Sejati Furnitama	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Furniture Dari Kayu
14	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu
15	PT Rimba Karya Pratama	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Veneer, Industri Penggergajian Kayu
16	PT Anugrah Jaya Timberindo	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu, Perdagangan Besar Produk Lainnya Ytdl, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Veneer, Industri Penggergajian Kayu
17	PT Karya Megah Indowood	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Veneer, Industri Penggergajian Kayu, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu, Industri Barang Bangunan Dari Kayu
18	PT Artha Kayu Indonesia	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Kayu Lapis, Industri Veneer
19	CV Buana Harum Kharisma	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Kayu Bakar Dan Pelet Kayu
20	PT Foresindo Sumber Alam Jaya	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Wadah Dari Kayu, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu, Industri Veneer, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Penggergajian Kayu, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Kayu Lapis, Industri Furnitur Dari Kayu
21	PT Surya Bangkit Cemerlang	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Furnitur Dari Kayu
22	PT Cipta Kayu Sejati	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Pintu, Kusen Pintu, Barang Bangunan Kayu Lainnya
23	CV Anugrah Timberindo	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Perdagangan Besar Bahan Kontruksi Dari Kayu, Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Penggergajian Kayu, Industri Panel Kayu Lainnya
24	PT Wood Accents Indonesia	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Veneer
25	PT Makuku Care Indonesia	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Kertas Tissue (Popok Bayi)
26	PT Surya International Veneers	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Veneer, Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood
27	PT Artha Kayu Indonesia	Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	Industri Veneer
28	PT Techpack Asia	Industri Kimia Hilir Dan Farmasi	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
29	CV Jaya Propindo Raya	Industri Kimia Hilir Dan Farmasi	Industri Plastik Lembaran
30	CV Indah Jaya Toys	Industri Kimia Hilir Dan Farmasi	Industri Mainan Anak-Anak
31	CV Roda Dunia	Industri Kimia Hilir Dan Farmasi	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
32	PT Lesso Technology Indonesia	Industri Kimia Hilir Dan Farmasi	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga
33	PT Tins Jaya Abadi	Industri Kimia Hilir Dan Farmasi	Reducer Mesin Cuci, Drain Hose Mesin Cuci, Frame Kulkas, Mounting Untuk Blender, Glass Jar
34	PT Java Tohoku Industries	Industri Kimia Hulu	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
35	CV SAPROTAN UTAMA	Industri Kimia Hulu	Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia, Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer, Industri Pupuk Lainnya, Industri Pemberantas Hama (Formulasi), Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
36	PT ETERCON PHARMA	Industri Kimia Hulu	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi, Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
37	PT Reckitt Benckiser Indonesia	Industri Kimia Hulu	Industri Pemberantas Hama (Formulasi), Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
38	PT Saprotan Utama Nusantara	Industri Kimia Hulu	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer, Industri Pemberantas Hama (Formulasi), Industri Pupuk Lainnya, Industri Pupuk Buatan Makro Hara Primer
39	PT Wana Indah Asri	Industri Kimia Hulu	Industri Pembuatan Aspal
40	PT INDONESIA MAGMA CHAIN	Industri Logam	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl
41	PT Struktur Baja Ringan Indonesia	Industri Logam	Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron And Steel Making), Pembuatan Baja Profil Dengan Cara Las, Seperti Profil H (H-Beam), Profil I (I-Beam) Dan Sejenisnya, Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya, Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling), Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam, Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi, Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi, Industri Pengecoran Besi Dan Baja, Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan, Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan, Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya, Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan, Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum, Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan
42	PT Triconville Indonesia	Industri Logam	Industri Furnitur Dari Plastik Logam Dan Kayu
43	PT Eway Product Indonesi	Industri Logam	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling), Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan, Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam
44	PT Huayu Mechanical And Electrical Engineering	Industri Logam	Industri Furnitur Dari Logam (Perakitan Rak Non Komersil)
45	PT Surya Pratista Utama	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya
46	PT Sanfood Prima Makmur	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
47	PT Morenzo Abadi Perkasa	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng, Frozen
48	PT Charoen Pokphand Indonesia	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	Industri Ransum Pakan Ternak
49	PT Charoen Pokphand Indonesia	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	Industri Ransum Pakan Ternak
50	PT New Hope Indonesia	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	Industri Ransum Makanan Hewan

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
51	PT Graha Wali Digdaya	Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	Industri Pengolahan Roti
52	PT Kino Indonesia Tbk	Gabungan Jenis Industri	Roti, Kue, Pie, Tart, Biskuit, Roti Kering, Pengawetan Kue Kering Dan Cake, Produk Makanan Ringan Baik Yang Manis Atau Asin, Tortillas, Produk Roti Yang Dibekukan, Seperti Pancake, Waffle Dan Roti Kadet, Industri Sambal, Industri Marshmallow, Kembang Gula, Industri Minuman Ringan, Industri Biskuit, Coklat, Keripik Singkong, Kue Pia, Snack, Industri Es Krim, Kembang Gula
53	PT Motor Anak Bangsa	Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan	Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga
54	PT MOBIL ANAK BANGSA	Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor, Industri Kendaraan Roda Empat Atau Lebih, Perakitan Kendaraan Listrik Roda 4 Atau Lebih
55	PT Hartono Istana Teknologi	Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga, Industri Mesin Pendingin, Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga
56	PT Lesso New Energy	Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan	Assembling Panel Surya
57	PT EVLEN INDONESIA INDUSTRI	Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan	Industri Sepeda Dan Kursi Roda Termasuk Becak, Industri Motor Listrik, Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga
58	PT Karoseri Anak Bangsa	Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan	Perakitan Kendaraan Roda Empat Atau Lebih, Industri Karoseri Kendaraan Bermotor, Karoseri Bagian Bagianannya Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih
59	PT Roberta Prima Tobacco	Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar	Industri Sigaret Kretek Mesin
60	PT Manunggal Jaya Tobacco	Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar	Industri Rokok
61	PT Moeria Mulia	Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar	Industri Kretek
62	PT Tobacco Selatmalaka Industry	Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar	Industri Rokok Kretek, Tembakau, Cengkeh Saus Dan Hasil Tembakau
63	PT Aroma Kopikrim Indonesia	Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM, INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK DARI SUSU LAINNYA, INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI, INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL, Creamer
64	PT Gudang Garam	Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar	Industri Kretek
65	PT Tunas Agro Persada	Gabungan Jenis Industri	Perdagangan Besar Padi Dan Palawija, Pertanian Hortikultura Sayuran Daun, Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya, Pertanian Jagung, Perdagangan Besar Buah-Buahan, Pertanian Cabai, Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia, Pertanian Pengembangbiakan Tanaman, Industri Pupuk Pelengkap 20127, Pertanian Hortikultura Sayuran Buah, Industri Pupuk Lainnya, Pertanian Hortikultura Buah
66	CV JAYA SETYA PLASTIK	Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian	Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya, Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari, Industri Mainan Anak-Anak
67	PT One Connect Indonesia	Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian	Industri Tabung Gas

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
68	PT Arisamandiri Pratama	Gabungan Jenis Industri	Industri Alat Tulis, Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga, Industri Mesin Dan Perkakas Mesin Untuk Pengerjaan Logam, Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl, Industri Televisi Dan Atau Perakitan Televisi, Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur), Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi, Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya, Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya, Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau, Industri Mesin Pendingin (Ac), Industri Alat Musik Bukan Tradisional
69	PT Griya Mandiri Perkasa	Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api
70	PT Nusantara Building Industries	Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR, Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai, Industri Dari Barang Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan
71	PT Adira Makmur Abadi	Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Pabrik Bata Ringan
72	PT Indo Karya Beton	Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Industri Tiang Pancang Dari Beton
73	PT Jaya Huma Perkasa	Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Industri Tiang Pancang Spun Pile
74	PT Varia Usaha Beton	Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai, Pengelolaan Dan Pembuangan Sampah Berbahaya, Konstruksi Gedung Lainnya, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Gedung, Pemasangan Bangunan Prafabrikasi Untuk Konstruksi Jalan Dan Jalan Rel, Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi, Pertambangan Dan Penggalian Lainnya Ytdl
75	PT Glory Industrial Semarang	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
76	PT Rcl Travelware Indonesia	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi
77	PT Buwei Tannery Indonesia	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	Industri Pencelupan Kulit Bulu, Industri Kulit Komposisi, Perdagang Besar Kulit Dan Kulit Jangat, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
78	PT Sayung Adhimukti	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	Industri Penyamakan Kulit
79	PT Sinar Amaril Factory	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	Industri Penyamakan Kulit
80	PT Lucky Textile Semarang	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	Pakaian Jadi Dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi Dari Textile
81	PT Melady Garment International	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil, INDUSTRI PERALATAN UNUTK PELINDUNG KESELAMATAN
82	PT Hisheng Luggage Accessory	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi, Webbing/ Tali Tas, Benang Polypropylene, Biji Plastik, Pembuatan Tali Dari Benang Polyester Atau Polypropylene
83	PT Leadway Silkscreen Printing	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	Industri Pencetakan Kain, Industri Pencetakan Umum
84	PT Pinnacle Apparels	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	Industri Pakaian Jadi Dari Textile, Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil
85	PT Indonesia Loyal Art	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
86	PT Forever Young International	Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	Industri Alas Kaki
87	PT Gunung Slamet	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika	Aktivitas Pengepakan
88	PT Cahaya Mega Beton Indonesia	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika	Konstruksi Gedung Hunian, Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai, Konstruksi Gedung Perbelanjaan, Konstruksi Gedung Industri, Konstruksi Gedung Kesehatan, Konstruksi Gedung Penginapan, Konstruksi Gedung Pendidikan, Konstruksi Gedung Perkantoran, Konstruksi Gedung Tempat Hiburan Dan Olahraga

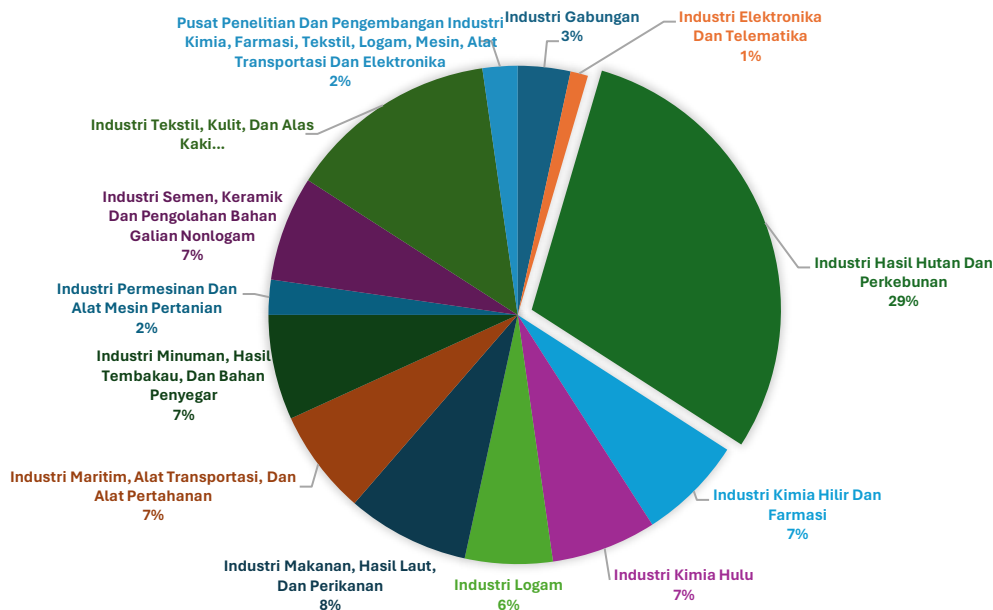
Sumber: Tim Penyusun, 2024

Data klasifikasi industri di Kabupaten Demak menunjukkan keberagaman sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah dengan total 88 unit industri. Industri hasil hutan dan perkebunan menjadi sektor terbesar dengan jumlah 26 unit (29,55%), mencerminkan potensi alam Kabupaten Demak yang mendukung sektor ini. Selain itu, sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki menempati posisi kedua dengan 12 unit (13,64%), yang mencerminkan keunggulan daerah dalam industri manufaktur berbasis bahan lokal.

Sektor industri makanan, hasil laut, dan perikanan juga menjadi salah satu sektor penting dengan 7 unit (7,95%), mengingat letak geografis Kabupaten Demak yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Sektor ini disusul oleh industri kimia hulu, kimia hilir dan farmasi, serta industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar, masing-masing dengan 6 unit (6,82%), yang menunjukkan kontribusi signifikan dari sektor berbasis kimia terhadap pengolahan dan manufaktur daerah.

Selain sektor utama tersebut, Kabupaten Demak juga memiliki sektor lain seperti industri logam (5,68%) dan industri elektronika dan telematika (1,14%), meskipun jumlahnya relatif kecil. Adanya pusat penelitian dan pengembangan dengan 2 unit (2,27%) menunjukkan perhatian daerah terhadap inovasi teknologi dan pengembangan kapasitas industri. Dengan beragamnya sektor industri ini, Kabupaten Demak memiliki potensi besar

untuk memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional, khususnya melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan pengembangan industri yang berkelanjutan.



Gambar 4.2 Jenis Industri Skala Besar di Kabupaten Demak Per Tahun 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

4.1.2 Industri Menengah

Berikut ini adalah rekapitulasi lengkap industri menengah di Kabupaten Demak yang dikelompokkan berdasarkan jenis dan klasifikasi industrinya hingga tahun 2024. Data ini memberikan gambaran rinci mengenai sektor-sektor industri menengah yang berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah. Industri menengah di Kabupaten Demak memainkan peran strategis, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. Sektor ini juga menjadi jembatan antara industri kecil dan besar, dengan fokus pada peningkatan kapasitas produksi dan daya saing produk.

Tabel 4.3 Daftar Industri Menengah Kabupaten Demak Per Tahun 2024 Menurut Jenis dan Klasifikasi Industri

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
1	PT Konesia Sukses Garment	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
2	CV Suryamas Boxindo	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton
3	PR Batik Natra	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Batik
4	PT Maju Sukses Plastindo	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Bahan Baku Plastik, Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga
5	PT Kailo Sumber Kasih	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
6	PT Agrogeen Energi Mandiri	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pertanian Tanaman Padi Dan Palawija, Industri Kulit Buatan/Imitasi, Industri Kayu
7	PT Alfatama Inticipta	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Cat, Industri Lem Epoxy & Pvc, Industri Kemasan Plastik
8	CV Panca Gemilang	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan
9	CV Aryati	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Kosmetika, Termasuk Pasta Gigi
10	CV Saprotan Utama	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer, Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer
11	CV Saprotan Utama	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pupuk Lainnya Dan Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
12	PT Cospa Handbag Group	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi
13	PT Star Global Indonesia	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam
14	PT Chantique Inti Decor	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Peralatan Iradiasi/Sinar X, Perlengkapan Dan Sejenisnya, Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi, Industri Furnitur Dari Plastik, Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
15	PT Star Global Indonesia	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Tangki Tandon Air Dan Wadah Dari Logam, Industri Pompa Lainnya Kompresor Kran Dan Klep Katup
16	PT Liputra Istana Teknologi	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga, Industri Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik
17	PT Aspal Polimer Emulsindo	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Aspal Modifikasi, Perdagangan Besar Berbagai Maca Material Bangunan, Aspal Modifikasi Karet Alam
18	PT Media Data Link Teknologi Indonesia	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya, Industri Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
19	PT Karunia Berkat Alam	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kayu Lapis, Industri Veneer, Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Dekoratif Plywood, Pengergajian Kayu

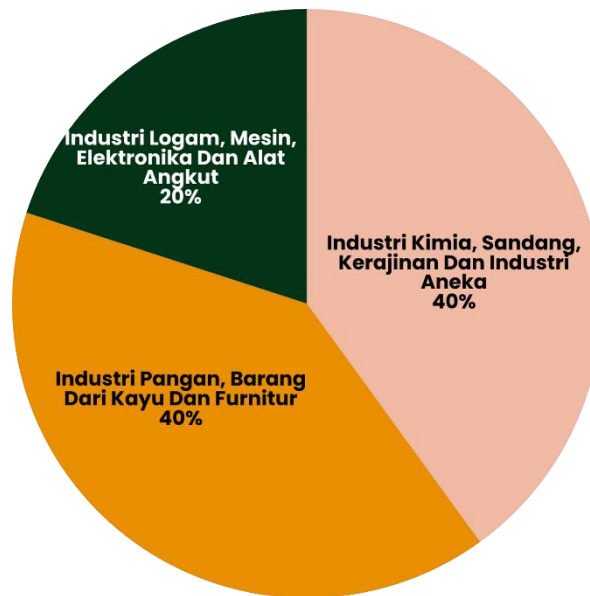
No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
20	CV Rimba Buana	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Barang Bangunan Dari Kayu
21	PT Indratma Sahitaguna	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Penggergajian Kayu, Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Industri Kimia Dasar Organik Lainnya, Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)
22	CV Makhpela	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Furniture Dari Kayu
23	PT Dazong Lin Indonesia	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Barang Bangunan Dari Kayu
24	PT Mapan Wijaya	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kayu Lapis, Industri Veneer, Industri Penggergajian Kayu, Industri Blockboard
25	PT Hegar Prakarsa Buana	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kayu Lapis
26	PT Java Mete Indonesia	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya, Perdagangan Besar
27	PT Jiuda Senlin Indonesia	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Veneer, Industri Penggergajian Kayu
28	PT Sinar Pacific International	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
29	PT Amd Piping System	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Pipa Plastik Dan Perlengkapannya
30	PT Indo Innovation Art And Craft Supplies	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Industri Alat Tulis Dan Perlengkapannya

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Data klasifikasi industri menengah di Kabupaten Demak menunjukkan tiga kelompok utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. **Industri kecil dan menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka** serta **industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur** menjadi sektor dominan dengan masing-masing 12 unit atau 40% dari total industri. Kedua sektor ini mencerminkan potensi daerah yang beragam, mulai dari pengolahan bahan kimia dan produk kreatif hingga pengolahan makanan dan barang berbahan dasar kayu.

Sementara itu, **industri kecil dan menengah logam, mesin, elektronika, dan alat angkut** menyumbang 6 unit atau 20%. Sektor ini, meskipun jumlahnya lebih kecil, memiliki peran penting dalam

mendukung aktivitas industri lain, terutama sebagai penyedia barang modal dan alat transportasi. Keberadaan industri ini menunjukkan bahwa Kabupaten Demak tidak hanya fokus pada sektor tradisional tetapi juga mulai mengembangkan sektor berbasis teknologi dan manufaktur modern.



Gambar 4.3 Jenis Industri Skala Menengah di Kabupaten Demak Per Tahun 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Dengan distribusi yang relatif seimbang, industri menengah di Kabupaten Demak menunjukkan potensi yang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut. Pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ini melalui penyediaan pelatihan, akses pembiayaan, serta peningkatan infrastruktur dan teknologi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri menengah, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

4.1.3 Industri Kecil

Berikut ini adalah rekapitulasi lengkap yang mencakup seluruh daftar industri kecil di Kabupaten Demak, yang dikelompokkan berdasarkan jenis dan klasifikasinya hingga tahun 2024. Data ini memberikan gambaran

menyeluruh tentang keberagaman sektor industri kecil yang beroperasi di wilayah ini, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing usaha dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Industri kecil di Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja. Beragam jenis usaha yang tercakup dalam klasifikasi ini menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui dukungan pemerintah dan pihak terkait. Dengan memahami karakteristik dan sebaran industri kecil ini, berbagai kebijakan dan program pengembangan yang tepat dapat dirancang untuk memperkuat daya saing sektor tersebut.

Tabel 4.4 Daftar Industri Kecil Kabupaten Demak Per Tahun 2024 Menurut Jenis dan Klasifikasi Industri

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
1	PT Hamsina Jaya	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika	Aktivitas Pengepakan
2	PT Sentral Multi Agro	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika	Aktivitas Pengepakan
3	PR Dwi Setiawan	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
4	PT Hexco Vilab	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
5	PR Putri Salsabela	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran
6	CV Tirta Budi Makmur	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Air Kemasan
7	PR Siti Nafiah	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu
8	PR Agus Setiawan	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
9	PR Sumartiningsih	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
10	PT Bintang Rejeki Alam Nusantara	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Barang Bangunan Dari Kayu
11	CV Pangestu	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Barang Bangunan Dari Kayu, Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller, Industri Penggergajian Kayu, Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Kayu Lapis

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
12	CV Karya Jaya	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga, Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, Pedagang Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak
13	PR Hartono	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl
14	CV Mitra Jaya	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Dari Plastik Untuk Kemasan
15	CV Abadi Jaya Plastik	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan, Industri Barang Plastik Lembaran, Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl
16	PR Suparno	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
17	PR Hadyasouvenir	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga
18	PR Parmono	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga
19	PR Arifin	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
20	PR Batik Natra	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Batik
21	PR Arif Purwanto	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Batik
22	PR Mulyono	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Batik
23	PR Wilis Janu Andreanna	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Batik
24	PR Basiroh	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Batik
25	PR Anis Solikin	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Batik
26	PR Kusmanto	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Batik
27	PR Dyah Irmawati	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan
28	PR Siti Ilkhafa	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan
29	PR Dwi Yana Widyawati	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan
30	PT Makmur Jaya Nusantara	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Dari Barang Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga
31	PT Java Balahmar Bersaudara	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Furnitur Dari Kayu
32	PR Wantoro	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Furnitur Dari Kayu
33	PT Ajeg	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Furnitur Dari Kayu
34	CV Raywood Globalindo	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Furnitur Dari Kayu, Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
35	PT Surya Karya Utama	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer
36	PT Kino Food Indonesia	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kembang Gula Lainnya, Industri Pengolahan Es Krim, Industri Minuman Ringan, Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula
37	PR Moch Sumaekan	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller
38	PR Rima Komalasari	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Kerajinan Ytdl
39	PR Dian Wuri Handayani, S.H.	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Kerajinan Ytdl
40	PR Shofiyatun	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
41	PR Suharnoko	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
42	PR Yuni Asih	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
43	PR Nur Azizah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
44	PR Nur Akhafid	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
45	PR Hasanah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
46	PR Siti Zuliana	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
47	PR Cholison Hadi Saputro	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
48	PR Suparmin	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
49	PR Sholekah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
50	PR Martingrum	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
51	PR Muhammad Ashari	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
52	PR Umi Hanik	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
53	PR Dwi Wahyuning Lestari	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
54	PR Siti Khotijah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
55	PR Maemunatun	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
56	PR Arina Manasikana	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
57	PR Darmisih	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
58	PR Ulfayati	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
59	PR Purhayati	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
60	PR Sugiarto	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
61	PR Indah Purwanti	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
62	PR Romadhonah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
63	PR Ruminatuz Zakiyah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
64	PR Siti Juwariah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
65	PR Dwi Prihatno	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
66	PR Siti Mastoah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
67	PR Ali Musthofa	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya
68	PT Tuju Kuda Hitam Sakti	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi, Perdagangan Eceran Bahan Bakar Lainnya
69	CV Mekar Cahaya Mas	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
70	PR M Zulfikar Farobby	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kretek
71	PT Bahtera Samudera Inti	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kretek
72	PR Bangkit Sukses Tabaco	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kretek
73	PT Djirak Bukit Abadi Tembakau	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kretek
74	PR Fatikah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kue Basah
75	PR Eti Nurul Fitriati.se	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kue Basah
76	PR Mudlofiroh	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Kue Basah
77	PR Wazirotul Maliyah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Makanan Dan Masakan Olahan
78	PR Anggarina Kristiana	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Makanan Dan Masakan Olahan
79	PR Lynda Lidiana	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Makanan Dan Masakan Olahan
80	PR Rohmah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Makanan Dan Masakan Olahan
81	PR Nur Naili Fitriyah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-Kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu
82	PR Sri Rahayu	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Makanan Kerupuk, Keripik, Peyek, Dan Sejenisnya, Industri Penggilingan Aneka Umbi, Industri Minuman Herbal
83	PR Ika Murniati	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Makanan Ringan Kripik Dan Peyek, INDUSTRI MAKANAN, Industri Minuman
84	PR Maximillian Agus Hariyanto	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Mesin Pengeringan, Industri Mesin Sablon, Produksi Media Rekaman Film Dan Video, Industri Mesin Pertanian
85	PR Irnawati	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau
86	PR Putra Djaya	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Mesin Spot Welding, Industri Mesin Sandblasting/Vapour Blasting
87	PR Sri Wahyuningsih	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Minuman Lainnya
88	PT Kembar Jaya Mandiri Mulya	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
89	PT Kembar Jaya Mandiri Mulya	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai
90	PR MUHAMMAD HERY SUNANTO	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
91	PR Nur Witarti	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
92	CV Zefanya Busana Mandiri	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
93	CV Sumber Berkah Garment	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
94	PR Hongfa	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil, Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit, Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil, Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi, Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus, Lainnya YTDL, Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya, Industri Tali, Industri Alat Olahraga
95	PR Muhamad Kusaeni	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Pencetakan Umum
96	PR Johan Dwi Fiandika	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Pencetakan Umum
97	PR Muhamad Azmi Nabil	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Pencetakan Umum
98	PR Tegar Budi Cahyono	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Pencetakan Umum
99	PR Umar Sholeh	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Pencetakan Umum
100	PR Erlina Rachmawati	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran
101	CV Bungasindo Tama	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Penggergajian Kayu
102	PT Hasil Sukses Berdikari	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Penggergajian Kayu
103	CV Bintang Prima	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Penggergajian Kayu
104	PERUM Perum Perhutani	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Penggergajian Kayu
105	CV Esa Putra Persada	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Penggergajian Kayu
106	PT Pt Surya Timber Indonesia	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Penggergajian Kayu
107	PT Laco Alam Wijaya	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Penggergajian Kayu
108	PR Kariroh	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Kedelai Dan Kacang-Kacangan Lainnya Selain Tahu Dan Tempe
109	KO Koperasi Produsen De Uyah Mampu	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pengolahan Garam
110	KO Garam Rakyat Sejahtera	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pengolahan Garam

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
111	PR Dwi Endah Apriliyantini	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion), Industri Produk Makanan Lainnya, Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran, Industri Manisan Buahbuahan Dan Sayuran Kering, Keripik Pisang, Industri Minuman, Industri Kue Basah
112	PT Biotech Farma	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Peralatan Elektromedikal Dan Elektroterapi
113	PT Malpi Network Basari	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
114	PT Omni Electrindo	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Peralatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik
115	PR Bordir Viani	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil
116	CV Karya Maju Usaha	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Perlengkapan Pakaian Dari Kulit
117	PT Bintoro Madani Sejahtera	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Produk Dari Batu Bara
118	PR Amalia Esti Maulita	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
119	PR Yuni Siswanto	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
120	PR Purwanto Ahmad	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
121	PR Nur Baiti Hilda	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
122	PR Siti Alfiah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
123	PR Noviana Maharani Syaraswati	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
124	PR Raden Roro Yulita	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
125	PR Desy Eka Widayanti	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
126	PR Misnaena	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
127	PR Susmadi	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
128	PR Muayanah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
129	PR Nur Faizah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
130	PR Sumiah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
131	PR Vika Amaliatuc Cholidah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
132	PR Sutarni	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
133	PR Ngafiatun	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
134	PR Bambwi Rumiya	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Makanan Lainnya
135	PR Dwi Murtyaningsih	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Masak Lainnya
136	PR Yuni Alfiah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Masak Lainnya

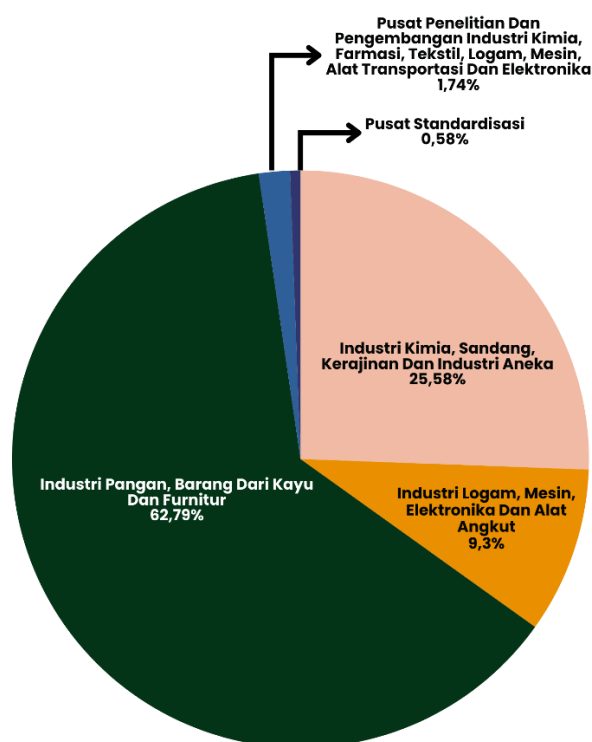
No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
137	PR Faedur Rokhmah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Masak Lainnya
138	PR Muchammad Mualimin	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
139	PR Wulan Kusuma Wardani	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
140	PR Indarjo	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
141	PR Jajuk Tri Retno Rahaju	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
142	PR Romlah	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
143	PR Sri Pujiati	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
144	PR Muhammad Rifan	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
145	PR Patmini	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
146	PR Harirotul Lutfiana	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
147	PR Nur Chamim	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
148	PR Fadilia Rahardian Prasetyo Putri	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
149	PR Sari Yuniati	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
150	PR Jamari	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Produk Roti Dan Kue
151	PR Khoirul Bariyah	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia
152	PT Perorangan Qsolution Tekno Solusi	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Jasa Pemrograman, Jasa Pemrograman Dan Digitalisasi, Jasa Machine Learning & Data Science, Jasa Konsultasi Umkm, Jasa In House Training, Jasa Pengembangan Nano Teknologi, Jasa Retrofit
153	PR Abdur Rohim	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Kaligrafi, Industri Kaligrafi, WEDANG KELOR CELUP, Serbuk Minuman Tradisional
154	PR Budi Santoso	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Industri Barang Lainnya Dari Kaca
155	PR Fitria Yunianingtyas	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Produk Makanan Lainnya
156	PR Luluatul Magfiroh	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl
157	PT INDO SUTECH SEJAHTERA	Pusat Penelitian Dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika	Konstruksi Gedung Industri
158	PT Karya Wiguna Sukses Mandiri	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Kontraktor / Pemborong, Perdagangan, Pengadaar / Suplayer, Rental / Persewaan, Perdagangan, Pengadaan / Uplayer, Produksi, Perdagangan, Pengadaan, Suplayer, Perdagangan, Pengadaan / Suplayer
159	PT Pratama Plastindo Abadi	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Barang Dari Plastik Untuk Bangunan
160	PT Mitra Kekal Sanjaya	Pusat Standardisasi	Jasa Kalibrasi/Metrologi
161	PT Lims Yanwo Indonesia	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Pembersihan Dan Pencucian Sarang Burung Walet

No	Nama Industri	Klasifikasi Industri	Jenis Industri
162	PT Aplikasi Bitumen Indonesia	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	PERBAIKAN KONSTRUKSI JALAN,PRODUKSI DAN REPAIR WADAH DARI LOGAM CONTOH PEMBUATAN DRUM,Menjual TCM Dan DGEM (Aspal Instan),MENYEWAKAN ALAT BERAT UNTUK KONSTRUKSI DENGAN OPERATORNYA
163	CV Candi Mitra Gas	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat Cair Dan Gas Dan Produk YBDI
164	CV Sukses Sembada Pangan	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Perdagangan Besar Beras, Perdagangan Besar Padi Dan Palawija, Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya, Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula, Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras
165	CV Sakasaki Indonesia	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Perdagangan Besar Pupuk Dan Obat Pertanian, Produksi Pupuk, Formulasi Pemberantas Hama, Bahan Baku Pemberantas Hama, Zat Pengatur Tumbuh
166	PR Sri Haryati	Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah Dan Sejenisnya,Industri Makanan Roti Dan Kue,Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Perdagangan Eceran Daging Dan Ikan Olahan
167	CV Sedaya Java	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Produsen Furniture Dengan Sebagian Material Terbuat Dari Logam, Produsen Furniture Dengan Berbagai Macam Material, Perdagangan Furniture Dan Kerajinan, Produsen Furniture Dari Kayu, Produsen Furniture Dari Rotan Dan Atau Bambu, Produsen Furniture Dengan Sebagian Material Terbuat Dari Plastik
168	CV Pahala Utama	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pupuk Hara Mikro
169	PR Alfariza Pradana	Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	Industri Pupuk Pelengkap
170	PT Wali Motor	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor
171	PR Lintang Komputer	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya
172	CV Uwais Putra Teknik	Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Data klasifikasi industri kecil dan menengah di Kabupaten Demak menunjukkan keragaman sektor usaha yang memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan jumlahnya, **industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur** mendominasi dengan 108 unit usaha atau sebesar **62,79%** dari total industri yang ada. Dominasi ini menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, mengingat produk yang dihasilkan memiliki permintaan yang cukup tinggi di pasar lokal dan regional.

Di sisi lain, sektor **industri kecil dan menengah kimia, sandang, kerajinan, dan industri aneka** berjumlah 44 unit usaha, yang berkontribusi sebesar **25,58%**. Sementara itu, sektor **logam, mesin, elektronika, dan alat angkut** berjumlah 16 unit usaha atau **9,30%**, yang menunjukkan fokus pada pengolahan berbasis teknologi dan manufaktur yang semakin berkembang di daerah ini. Adapun **pusat penelitian dan pengembangan industri kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika** memiliki 3 unit usaha dengan kontribusi **1,74%**, serta **pusat standarisasi** berjumlah 1 unit usaha dengan kontribusi sebesar **0,58%**.



Gambar 4.4 Jenis Industri Skala Kecil di Kabupaten Demak Per Tahun 2024

Sumber: Tim Penyusun, 2024

4.1.4 Profil Industri Kabupaten Demak

Berikut ini adalah hasil tabulasi yang merangkum jumlah berbagai jenis industri berdasarkan skala usaha di Kabupaten Demak untuk tahun 2024. Data ini memberikan gambaran komprehensif mengenai seberapa

beragam dan meratanya distribusi industri yang beroperasi di berbagai skala usaha, baik industri besar, menengah, maupun kecil.

Tabulasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang karakteristik dan sebaran industri di Kabupaten Demak, serta melihat kontribusi masing-masing skala usaha terhadap perekonomian daerah. Dengan informasi ini, pihak berwenang dan pemangku kebijakan dapat lebih memahami kebutuhan masing-masing sektor dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh berbagai jenis industri berdasarkan skala usaha yang ada. Dukungan dalam hal akses pembiayaan, peningkatan infrastruktur, dan program pengembangan sumber daya manusia dapat disesuaikan agar dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di Kabupaten Demak. Data ini juga dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh skala usaha yang ada di daerah tersebut.

Tabel 4.5 Pembagian Jenis Industri Kabupaten Demak

Klasifikasi Industri	Industri Besar	Industri Kecil	Industri Menengah	Total
Industri Elektronika Dan Telematika	1	0	0	1
Industri Gabungan	3	0	0	3
Industri Hasil Hutan Dan Perkebunan	26	0	0	26
Industri Kecil Dan Menengah Kimia, Sandang, Kerajinan Dan Industri Aneka	0	44	12	56
Industri Kecil Dan Menengah Logam, Mesin, Elektronika Dan Alat Angkut	0	16	6	22
Industri Kecil Dan Menengah Pangan, Barang Dari Kayu Dan Furnitur	0	108	12	120
Industri Kimia Hilir Dan Farmasi	6	0	0	6
Industri Kimia Hulu	6	0	0	6
Industri Logam	5	0	0	5
Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	7	0	0	7
Industri Maritim, Alat Transportasi, Dan Alat Pertahanan	6	0	0	6
Industri Minuman, Hasil Tembakau, Dan Bahan Penyegar	6	0	0	6
Industri Permesinan Dan Alat Mesin Pertanian	2	0	0	2
Industri Semen, Keramik Dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam	6	0	0	6
Industri Tekstil, Kulit, Dan Alas Kaki	12	0	0	12

Klasifikasi Industri	Industri Besar	Industri Kecil	Industri Menengah	Total
Pusat Penelitian Dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi Dan Elektronika	2	3	0	5
Pusat Standardisasi	0	1	0	1
Total	88	172	30	290

Sumber: Tim Penyusun, 2024

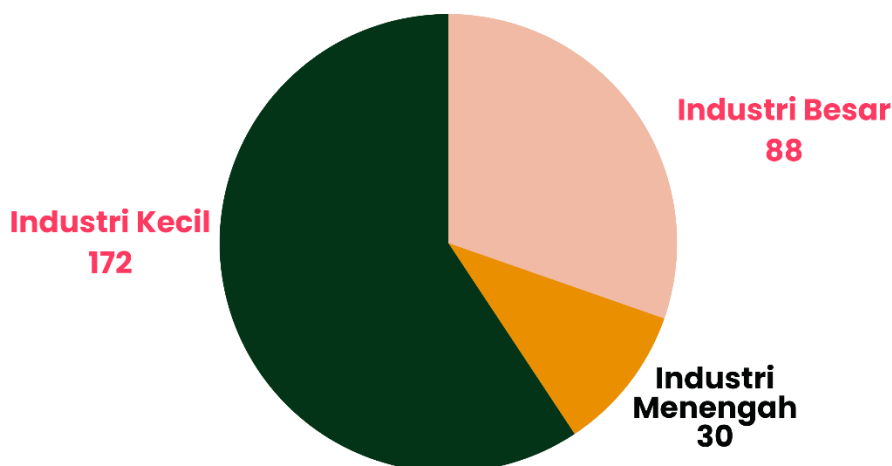
Berdasarkan tabel tersebut, total industri yang ada di Kabupaten Demak mencapai **290 unit usaha**, yang terbagi ke dalam tiga kategori skala industri, yaitu industri besar, industri menengah, dan industri kecil. Angka ini mencakup berbagai jenis industri dari berbagai sektor yang berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah.

Dalam kategori **industri besar**, tercatat **88 unit usaha** yang berfokus pada berbagai sektor seperti industri hasil hutan dan perkebunan, kimia hilir dan farmasi, kimia hulu, logam, dan industri terkait hasil laut dan makanan. Sektor ini memiliki peran penting dalam penyediaan lapangan kerja dan pengolahan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Demak. Adapun industri besar seperti *industri elektronik dan telematika* serta industri lainnya berjumlah kecil namun tetap memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian.

Di sisi lain, sektor **industri kecil dan menengah** mendominasi dengan jumlah yang signifikan, yaitu **172 unit usaha untuk industri kecil** dan **30 unit usaha untuk industri menengah**. Industri kecil dan menengah beragam, mencakup sektor kimia, sandang, kerajinan, logam, mesin, elektronik, serta sektor makanan dan furnitur. Dari semua jenis industri kecil, sektor **kimia, sandang, kerajinan dan industri aneka** memiliki jumlah terbesar dengan **44 unit usaha** di industri kecil dan **12 unit usaha** dalam kategori industri menengah. Sementara itu, industri pangan, kayu, dan furnitur juga menjadi sektor yang berkembang pesat dengan 120 unit usaha yang tersebar di berbagai skala.

Pusat penelitian dan pengembangan, yang berfokus pada bidang kimia, farmasi, tekstil, logam, mesin, serta elektronik, juga turut

berkontribusi dengan 5 unit usaha di berbagai skala usaha. Selain itu, pusat standardisasi memiliki peran sebagai lembaga pendukung dengan 1 unit usaha yang berfokus pada penerapan standar industri hijau dan berkelanjutan di Kabupaten Demak.



Gambar 4.5 Pembagian Jenis Industri Kabupaten Demak

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Secara keseluruhan, distribusi ini menunjukkan keberagaman dan potensi sektor industri yang ada di Kabupaten Demak. Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data ini sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pengembangan sektor industri, termasuk penyediaan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan dukungan modal usaha. Dengan pendekatan yang tepat, berbagai jenis usaha ini dapat berkembang lebih maju, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Demak.

4.2 ANALISIS KESESUAIAN PARAMETER INDUSTRI HIJAU KABUPATEN DEMAK

Parameter industri hijau merupakan seperangkat indikator yang dirancang untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa suatu industri mengadopsi praktik yang mendukung keberlanjutan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai panduan bagi industri dalam menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam operasionalnya.

Secara umum, parameter ini mencakup dua aspek utama, yaitu aspek teknis dan aspek manajemen, yang keduanya saling mendukung dalam menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Pada aspek teknis, parameter industri hijau mencakup pengelolaan energi, sumber daya, dan limbah. Contohnya adalah penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca, serta pemanfaatan bahan baku terbarukan dan daur ulang limbah untuk mengurangi pemborosan. Penerapan standar teknis seperti efisiensi proses produksi dan pemantauan kualitas lingkungan juga menjadi bagian penting dalam aspek ini.

Sementara itu, pada aspek manajemen, parameter industri hijau melibatkan integrasi prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan dan strategi perusahaan. Hal ini mencakup pelaksanaan audit lingkungan, pelatihan karyawan tentang praktik ramah lingkungan, serta pengelolaan risiko lingkungan secara sistematis. Selain itu, perusahaan juga didorong untuk menerapkan transparansi dalam pelaporan kinerja lingkungannya guna meningkatkan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan.

Telah dilakukan identifikasi profil pada industri yang ada di Kabupaten Demak pada bab sebelumnya dimana berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan didapatkan sampel klasifikasi sertifikasi bagi industri yang ada sebagai berikut.

4.2.1 Standar Industri Hijau untuk Industri atau Kantong Tas Belanja Plastik dan Bioplastik

Di wilayah Kabupaten Demak, terdapat banyak industri yang masuk pada kategori Standar Industri Hijau untuk Industri atau Kantong Tas Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020). Kebijakan klasifikasi ini didasarkan pada Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3065 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3398 Tahun 2023 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau.

Adapun ketentuan dalam Standar Industri Hijau untuk Industri atau Kantong Tas Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020) adalah sebagai berikut.



Tabel 4.6 Standar Industri Hijau untuk Industri atau Kantong Tas Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020)

Ruang Lingkup	Persyaratan Teknis	Persyaratan Manajemen
Standar Industri Hijau untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020)	Bahan Baku - Sumber Bahan Baku - Spesifikasi Bahan Baku - Penanganan Bahan Baku - Rasio Produk Terhadap Penggunaan Bahan Baku Bahan Penolong dan/atau Aditif - Sumber Bahan Penolong dan/atau Aditif - Spesifikasi Bahan Baku dan/atau Aditif Energi - Konsumsi Energi per Ton Produk Air - Sumber Air - Konsumsi <i>fresh water</i> Untuk Proses Produksi Plastik Berbahan Polimer, daur ulang, biopolimer Proses Produksi - Kinerja Peralatan Produksi Plastik Berbahan Baku Polimer yang Dinyatakan dalam OEE - Kinerja Peralatan Produksi Plastik Berbahan Plastik Daur Ulang yang Dinyatakan dalam OEE - Kinerja Peralatan Produksi Bioplastik Berbahan Biopolimer yang Dinyatakan dalam OEE Produk - Standar Mutu Produk Berbahan Baku Polimer, Daur Ulang, dan Biopolimer Kemasan - Bahan Kemasan Berupa: Plastik, Bioplastik, Karung <i>Woven Bag</i>, dan Karton Limbah	Kebijakan dan Organisasi - Kebijakan Industri Hijau - Organisasi Industri Hijau - Sosialisasi Kebijakan dan Organisasi Industri Hijau Perencanaan Strategis - Tujuan dan Sasaran Industri Hijau - Perencanaan Strategis dan Program Pelaksanaan dan Pemantauan - Pelaksanaan Program - Pemantauan Program Tinjauan Manajemen - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen - Konsistensi Perusahaan Industri Terhadap Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Persyaratan Manajemen Sesuai Standar Industri Hijau yang Berlaku Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) - Peran Serta Perusahaan Industri Terhadap Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan - Penyediaan Fasilitas Ketenagakerjaan

Ruang Lingkup	Persyaratan Teknis	Persyaratan Manajemen
	- Sarana Pengelolaan Limbah Cair - Pemenuhan Parameter Limbah Cair - Pemenuhan Parameter Gangguan (Kebisingan, Getaran, dan Kebauan) - Sarana Pengelolaan Limbah B3 - Sarana Pengelolaan Limbah Padat Emisi Gas Rumah Kaca Emisi CO2 Spesifik	

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2020



Standar Industri Hijau (SIH 22220.1:2020) untuk industri tas atau kantong belanja plastik dan bioplastik mencakup dua aspek utama, yaitu **persyaratan teknis** dan **persyaratan manajemen**, yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan operasional industri sesuai dengan prinsip industri hijau. Ruang lingkup standar ini mencakup pengelolaan bahan baku, energi, air, proses produksi, produk, kemasan, limbah, dan emisi gas rumah kaca, serta tata kelola manajemen yang mendukung penerapan industri hijau secara menyeluruh.

Pada aspek **persyaratan teknis**, standar ini menetapkan berbagai parameter yang harus dipenuhi industri dalam menjalankan operasionalnya. Pengelolaan bahan baku menjadi perhatian utama, termasuk sumber, spesifikasi, penanganan bahan baku, serta rasio produk terhadap penggunaan bahan baku. Selain itu, pengelolaan bahan penolong dan/atau aditif, efisiensi konsumsi energi per ton produk, serta penggunaan air bersih untuk proses produksi plastik berbahan polimer, daur ulang, dan biopolimer juga menjadi indikator penting. Proses produksi dievaluasi berdasarkan kinerja peralatan yang dinyatakan dalam OEE (Overall Equipment Effectiveness) untuk setiap jenis bahan baku. Standar ini juga mengatur spesifikasi mutu produk, penggunaan bahan kemasan tertentu, dan pengelolaan limbah, baik cair, padat, maupun limbah B3. Selain itu, emisi gas rumah kaca, terutama emisi CO₂ spesifik, juga menjadi bagian dari evaluasi teknis.

Sementara itu, **persyaratan manajemen** mencakup aspek kebijakan, perencanaan strategis, pelaksanaan, dan tinjauan manajemen untuk mendukung keberlanjutan operasional industri. Kebijakan dan organisasi industri hijau harus jelas, termasuk adanya sosialisasi kepada seluruh pihak terkait. Industri juga diwajibkan untuk memiliki perencanaan strategis yang mencakup tujuan, sasaran, dan program industri hijau. Pelaksanaan dan pemantauan program harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan

keberhasilannya. Tinjauan manajemen menjadi elemen penting untuk mengevaluasi konsistensi perusahaan dalam memenuhi persyaratan teknis dan manajemen sesuai standar yang berlaku.

Standar ini juga menyoroti **tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)** sebagai bagian integral dari industri hijau. Perusahaan diharapkan memiliki kontribusi nyata terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Selain itu, aspek ketenagakerjaan juga diatur, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai untuk mendukung kesejahteraan tenaga kerja.

4.2.2 Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat

Industri lain yang banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Demak adalah jenis industri yang masuk dalam kategori Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2023). Adapun ketentuan dalam Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2023) adalah sebagai berikut.



Tabel 4.7 Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2023)

Ruang Lingkup	Persyaratan Teknis	Persyaratan Manajemen
Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2023)	Bahan Baku - Sumber Bahan Baku - Spesifikasi Bahan Baku - Penanganan Bahan Baku - Rasio Penggunaan Bahan Baku Untuk Produksi Amonia per <i>Plant</i> - Rasio Penggunaan Bahan Baku Untuk Terhadap Pupuk Urea per <i>Plant</i> - Rasio Penggunaan <i>Rock Phosphate</i> Terhadap Pupuk SP-36 per <i>Plant</i> - Rasio Penggunaan Bahan Baku Untuk Terhadap Pupuk ZA per <i>Plant</i> Bahan Penolong Tidak Tersedia Energi - Konsumsi Energi Total Spesifik Untuk Produksi Amonia per <i>Plant</i> - Rasio Pemanfaatan Kembali Panas Gas Buang Terhadap Total Panas Gas Buang yang Tersedia Pada <i>Plant</i> Amonia - Konsumsi Energi Total Spesifik Untuk Produksi Pupuk Urea per <i>Plant</i> - Konsumsi Energi Total Spesifik Untuk Produksi Pupuk SP-36 per <i>Plant</i> - Konsumsi Energi Total Spesifik Untuk Produksi Pupuk ZA per <i>Plant</i> Air - Konsumsi <i>Make-up Fresh Water</i> Spesifik Untuk Produksi Amonia per <i>Plant</i> - Konsumsi <i>Make-up Fresh Water</i> Spesifik Untuk Produksi Pupuk Urea per <i>Plant</i> - Konsumsi <i>Make-up Fresh Water</i> Spesifik Untuk Produksi Pupuk SP-36 per <i>Plant</i> - Konsumsi <i>Make-up Fresh Water</i> Spesifik Untuk Produksi ZA per <i>Plant</i> Proses Produksi - Kinerja Peralatan yang Dinyatakan dalam OEE per <i>Plant</i> Produk - Standar Mutu Produk	Kebijakan dan Organisasi - Kebijakan Industri Hijau - Organisasi Industri Hijau - Sosialisasi Kebijakan dan Prinsip Industri Hijau Perencanaan Strategis - Tujuan dan Sasaran Industri Hijau - Perencanaan Strategis dan Program Pelaksanaan dan Pemantauan - Pelaksanaan Program - Pemantauan Program Audit Internal dan Tinjauan Manajemen - Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen - Konsistensi Perusahaan Industri Terhadap Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Persyaratan Manajemen Sesuai Standar Industri Hijau yang Berlaku Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) - Peran Serta Perusahaan Industri Terhadap Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan - Penyediaan Fasilitas dan Program Ketenagakerjaan

Ruang Lingkup	Persyaratan Teknis	Persyaratan Manajemen
	Kemasan - Spesifikasi Mutu Kemasan untuk Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk ZA Limbah - Sarana Pengelolaan Limbah Cair - Pemenuhan Parameter Limbah Cair - Pemenuhan Parameter Limbah Cair Terhadap Baku Mutu Lingkungan - Sarana Pengelolaan Emisi Gas Buang dan Udara - Pemenuhan Parameter Emisi Gas Buang, Udara Ambien, dan Gangguan Terhadap Baku Mutu Lingkungan - Sarana Pengelolaan Limbah B3 - Pengelolaan Limbah Non-B3 Emisi Gas Rumah Kaca - Emisi CO2 Spesifik - Emisi CO2 Ekuivalen Spesifik untuk Produksi Pupuk Urea - Emisi CO2 Ekuivalen Spesifik Produksi Pupuk SP-36 yang Bersumber dari Penggunaan Energi - Emisi CO2 Ekuivalen Spesifik Produksi Pupuk ZA yang Bersumber dari Penggunaan Energi	

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 Tahun 2023

Standar Industri Hijau (SIH 20122.1:2023) untuk industri amonia, pupuk urea, pupuk SP-36, dan pupuk amonium sulfat dirancang untuk memastikan keberlanjutan proses produksi serta meminimalkan dampak lingkungan. Standar ini meliputi dua aspek utama, yaitu **persyaratan teknis** dan **persyaratan manajemen**, yang mencakup berbagai parameter operasional dan kebijakan.

Pada **persyaratan teknis**, standar ini menetapkan pengelolaan bahan baku sebagai salah satu elemen utama. Industri diwajibkan memastikan sumber, spesifikasi, dan penanganan bahan baku yang sesuai. Rasio penggunaan bahan baku terhadap produk per plant juga menjadi indikator penting untuk masing-masing jenis produksi, seperti amonia, pupuk urea, pupuk SP-36, dan pupuk amonium sulfat. Selain itu, efisiensi energi menjadi perhatian besar, dengan penekanan pada konsumsi energi total spesifik untuk setiap proses produksi, pemanfaatan kembali panas gas buang, dan efisiensi penggunaan air bersih (make-up fresh water) per plant.

Proses produksi dievaluasi berdasarkan kinerja peralatan yang dinyatakan dalam *Overall Equipment Effectiveness* (OEE). Produk yang dihasilkan harus memenuhi standar mutu tertentu, sedangkan kemasan harus sesuai dengan spesifikasi mutu yang ditetapkan untuk pupuk urea, SP-36, dan ZA. Limbah menjadi fokus lainnya, dengan standar yang mengatur sarana pengelolaan limbah cair, emisi gas buang, dan limbah B3 maupun non-B3, serta pemenuhan parameter lingkungan terkait. Emisi gas rumah kaca, termasuk CO₂ spesifik dan ekuivalen, juga dipantau secara ketat untuk setiap jenis produk.

Dalam **persyaratan manajemen**, standar ini mengharuskan industri memiliki kebijakan dan organisasi yang mendukung prinsip industri hijau, termasuk sosialisasi kebijakan tersebut kepada seluruh pihak terkait. Perencanaan strategis dengan tujuan dan sasaran yang jelas menjadi dasar

pelaksanaan program industri hijau. Pemantauan dan audit internal dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Tinjauan manajemen diperlukan guna menjaga konsistensi penerapan persyaratan teknis dan manajemen sesuai dengan standar yang berlaku.

Standar ini juga mengintegrasikan aspek **tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)** dan ketenagakerjaan. Industri diharapkan aktif berkontribusi pada lingkungan sosial di sekitar operasinya, serta menyediakan fasilitas dan program untuk mendukung kesejahteraan tenaga kerja.

4.2.3 Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis

Industri yang berlokasi di Kabupaten Demak juga termasuk dalam kategori Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023). Ketentuan yang tercantum dalam Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023) meliputi hal-hal berikut.

Tabel 4.8 Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023)

Ruang Lingkup	Persyaratan Teknis	Persyaratan Manajemen
Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023)	Bahan Baku - Sumber Bahan Baku - Spesifikasi Bahan Baku - Penanganan Bahan Baku - Rasio Total Produk Terhadap Total Penggunaan Bahan Baku Bahan Penolong - Sumber Bahan Penolong - Spesifikasi Bahan Penolong - Penanganan Bahan Penolong Energi - Konsumsi Energi Total Spesifik per Lini Produksi (<i>Production Line</i>) - Penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Air - Konsumsi <i>Make-Up fresh water</i> Spesifik per Lini Produksi (<i>Production Line</i>) Proses Produksi - Kinerja Peralatan yang Dinyatakan dalam OEE per Lini Produksi (<i>Production Line</i>) Produk - Standar Mutu Produk Kemasan - Material Kemasan yang Bersifat Dapat Dipakai Ulang atau Dapat Didaur Ulang atau Mudah Terurai Secara Alamiah Limbah - Sarana Pengelolaan Limbah Cair - Pemenuhan Parameter Limbah Cair Terhadap Baku Mutu Lingkungan - Sarana Pengelolaan Emisi Gas Buang dan Udara - Pemenuhan Parameter Emisi Gas Buang, Udara Ambien, dan Gangguan Terhadap Baku Mutu Lingkungan - Pengelolaan Limbah B3	Kebijakan dan Organisasi - Kebijakan Industri Hijau - Organisasi Industri Hijau - Sosialisasi Kebijakan dan Prinsip Industri Hijau Perencanaan Strategis - Tujuan dan Sasaran Industri Hijau - Perencanaan Strategis dan Program Pelaksanaan dan Pemantauan - Pelaksanaan Program - Pemantauan Program Audit Internal dan Tinjauan Manajemen - Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen - Konsistensi Perusahaan Industri Terhadap Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Persyaratan Manajemen Sesuai Standar Industri Hijau yang Berlaku Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) - Peran Serta Perusahaan Industri Terhadap Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan - Penyediaan Fasilitas dan Program Ketenagakerjaan

Ruang Lingkup	Persyaratan Teknis	Persyaratan Manajemen
	- Pengelolaan Limbah Non-B3 - Tingkat Daur Ulang dan/atau Daur Paka Limbah Padat Emisi Gas Rumah Kaca Emisi CO2 Ekuivalen Spesifik	

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2023



Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023) mencakup persyaratan teknis dan manajemen untuk mendukung prinsip keberlanjutan. Persyaratan teknis meliputi pengelolaan bahan baku, mulai dari sumber, spesifikasi, hingga rasio penggunaan bahan baku terhadap total produk. Selain itu, bahan penolong juga diatur terkait sumber, spesifikasi, dan penanganannya. Dalam aspek energi, standar ini menetapkan konsumsi energi spesifik per lini produksi serta mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT). Untuk pengelolaan air, konsumsi air baru (make-up fresh water) juga diukur secara spesifik per lini produksi. Proses produksi harus didukung dengan peralatan yang memiliki kinerja optimal, yang dinyatakan melalui Overall Equipment Effectiveness (OEE). Produk yang dihasilkan wajib memenuhi standar mutu, sementara kemasan diutamakan yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, atau terurai secara alami. Dalam pengelolaan limbah, sarana untuk limbah cair, emisi gas buang, dan udara harus memenuhi parameter baku mutu lingkungan, termasuk pengelolaan limbah B3 dan non-B3 serta tingkat daur ulang limbah padat. Standar ini juga menetapkan batasan emisi gas rumah kaca, khususnya emisi CO₂ ekuivalen spesifik.

Dari sisi manajemen, perusahaan diharuskan memiliki kebijakan industri hijau yang disosialisasikan secara efektif, serta membangun organisasi yang mendukung pelaksanaan prinsip ini. Perencanaan strategis meliputi tujuan, sasaran, dan program yang terukur, diikuti dengan pelaksanaan, pemantauan, serta audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar. Selain itu, perusahaan juga diharapkan berkontribusi terhadap tanggung jawab sosial melalui program CSR yang relevan dengan lingkungan sosial, serta menyediakan fasilitas dan program untuk mendukung ketenagakerjaan. Semua ketentuan ini



dirancang untuk memastikan keberlanjutan operasional industri baja lembaran lapis sesuai prinsip industri hijau.

4.2.4 Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing

Di Kabupaten Demak, terdapat sejumlah industri hasil peternakan yang termasuk dalam kategori Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing (SIH 15112.1:2019). Standar ini mencakup berbagai ketentuan yang mengatur operasional industri penyamakan kulit sebagai berikut.

Tabel 4.9 Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing (SIH 15112.1:2019)

Ruang Lingkup	Persyaratan Teknis	Persyaratan Manajemen
Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing (SIH 15112.1:2019)	Bahan Baku - Kulit - Spesifikasi Bahan Baku - Penanganan Bahan Baku - Kandungan Air dan Garam dalam Bahan Baku Utama - Rasio Produk Terhadap Bahan Baku Utama Kulit Bahan Kimia Kulit - Bahan Kimia Kulit - Spesifikasi Bahan Kimia Kulit - Penanganan Bahan Kimia Kulit - Efisiensi Penyerapan Krom dalam Kulit <i>Wet Blue</i> - Kandungan Bahan Kimia Kulit Bahan Penolong Tidak Tersedia Energi - Konsumsi Energi Total per Produk Kulit Jadi Untuk Proses Produksi Air - Penggunaan Air per Produk Kulit Jadi Proses Produksi - SOP dan PFD/BFD Produk Kulit Jadi - Spesifikasi Mutu Produk Kulit Jadi Kemasan - Bahan Kemasan: Pelat Kayu dan Plastik PP Pengelolaan Limbah - Sarana Pengelolaan Limbah Cair - Pemenuhan Parameter Limbah Cair - Sarana Pengelolaan Emisi Gas Buang dan Udara	Kebijakan dan Organisasi - Kebijakan Industri Hijau - Organisasi Industri Hijau - Sosialisasi Kebijakan dan Organisasi Industri Hijau Perencanaan Strategis - Tujuan dan Sasaran Industri Hijau - Perencanaan Strategis dan Program Pelaksanaan dan Pemantauan - Pelaksanaan Program - Pemantauan Program Tinjauan Manajemen - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen - Konsistensi Perusahaan Industri Terhadap Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Persyaratan Manajemen Sesuai Standar Industri Hijau yang Berlaku Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) - Peran Serta Perusahaan Industri Terhadap Lingkungan Sosial Ketenagakerjaan - Penyediaan Fasilitas Ketenagakerjaan

Ruang Lingkup	Persyaratan Teknis	Persyaratan Manajemen
	- Pemenuhan Parameter Emisi Gas Buang, Udara, dan Gangguan (Kebisingan, Getaran, dan Kebauan) - Sarana Pengelolaan Limbah B3 - Sarana Pengelolaan Limbah Padat Emisi Gas Rumah Kaca - Emisi CO₂ Spesifik	

Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2019



Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing (SIH 15112.1:2019) mencakup persyaratan teknis dan manajemen yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan operasional industri. Dalam hal bahan baku, standar ini mengatur penggunaan kulit sebagai bahan utama, termasuk spesifikasinya, penanganannya, kadar air dan garam, serta rasio produk terhadap bahan baku. Selain itu, bahan kimia untuk pengolahan kulit diatur terkait jenis, spesifikasi, penanganan, efisiensi penyerapan krom dalam proses *wet blue*, dan kandungannya. Energi yang digunakan harus memenuhi efisiensi tertentu berdasarkan konsumsi per produk kulit jadi, sementara air juga diukur penggunaannya per produk jadi.

Proses produksi harus didukung oleh SOP yang jelas, serta diagram proses seperti PFD atau BFD. Produk akhir wajib memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, dan kemasan yang digunakan berupa pelat kayu atau plastik PP. Pengelolaan limbah meliputi pengolahan limbah cair, emisi gas buang, udara, limbah B3, dan limbah padat, dengan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan. Emisi gas rumah kaca, khususnya CO₂, juga diatur dalam standar ini.

Dari sisi manajemen, perusahaan diharapkan memiliki kebijakan industri hijau yang disosialisasikan secara efektif dan didukung oleh organisasi yang terstruktur. Perencanaan strategis meliputi tujuan, sasaran, dan program yang dirancang dengan baik, serta pelaksanaan dan pemantauan yang konsisten. Tinjauan manajemen dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar teknis dan manajemen yang berlaku. Selain itu, perusahaan diharapkan berperan dalam tanggung jawab sosial melalui program CSR yang mendukung lingkungan sosial serta menyediakan fasilitas yang mendukung ketenagakerjaan. Semua aspek ini dirancang untuk memastikan industri penyamakan kulit beroperasi secara berkelanjutan sesuai prinsip industri hijau.

4.2.5 Perbedaan Persyaratan Teknis Dan Manajemen pada Sertifikasi Industri Hijau

Perbedaan antara persyaratan teknis dan persyaratan manajemen pada Sertifikasi Industri Hijau terletak pada fokus dan tujuan utama dari masing-masing aspek. Persyaratan teknis berfokus pada aspek operasional dan teknis dalam proses produksi, seperti penggunaan bahan baku, efisiensi energi, pengelolaan air, pengelolaan limbah, dan standar mutu produk. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan secara efisien dan ramah lingkungan, dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan melalui pengelolaan sumber daya yang baik, pengurangan emisi, dan optimalisasi penggunaan bahan.

Di sisi lain, persyaratan manajemen lebih menitikberatkan pada pengelolaan organisasi dan implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Ini mencakup kebijakan industri hijau, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan program, audit internal, tinjauan manajemen, serta keterlibatan perusahaan dalam tanggung jawab sosial (CSR) dan ketenagakerjaan. Persyaratan manajemen bertujuan memastikan bahwa pendekatan berkelanjutan diterapkan secara menyeluruh dalam budaya kerja perusahaan dan bahwa perusahaan memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan prinsip industri hijau.

Tabel 4.10 Ilustrasi Perbedaan Aspek dan Kriteria Persyaratan Teknis dan Persyaratan Manajemen pada Sertifikasi Industri Hijau

Standar Industri Hijau untuk Industri Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing (SIH 15112.1:2019)	Standar Industri Hijau untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020)	Standar Industri Hijau untuk Industri Amonia, Pupuk Urea, Pupuk SP-36, dan Pupuk Amonium Sulfat (SIH 20122.1:2023)	Standar Industri Hijau untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2:2023)
Persyaratan Teknis			
Aspek		Kriteria	
		Secara umum untuk kriteria dalam persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) memiliki	

Secara umum untuk aspek dalam persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat: a) Bahan Baku b) Bahan Penolong c) Energi d) Air e) Proses Produksi f) Produk g) Kemasan h) Limbah i) Emisi Gas Rumah Kaca Untuk perbedaan aspek dalam persyaratan teknis secara spesifik terdapat untuk klasifikasi industri tekstil (kain) dan industri kimia (plastik). Perbedaan tersebut bukan dari aspek yang termuat, tetapi ada penambahan khusus dalam aspek persyaratan teknis tersebut.	perbedaan yang terlihat dalam isi atau instrument dalam aspek persyaratan teknis. Untuk perbedaan kriteria dalam persyaratan teknis secara spesifik terlihat berbeda tergantung jenis dan/atau klasifikasi industri dalam SIH. Walaupun dikategorikan dalam jenis industri yang sama, tetapi setiap industri memiliki perbedaan dalam kriterianya. Meskipun berbeda, dapat dipastikan minimal terdapat satu atau dua kriteria dalam aspek persyaratan teknis yang pasti termuat dalam setiap SIH. Contoh: Aspek Bahan Baku (SIH 15112.1:2019): Spesifikasi Bahan Baku dan Penanganan Bahan Baku (SIH 22220.1:2020): Spesifikasi Bahan Baku dan Penanganan Bahan Baku (SIH 20122.1:2023): Spesifikasi Bahan Baku dan Penanganan Bahan Baku (SIH 24102.2:2023): Spesifikasi Bahan Baku dan Penanganan Bahan Baku
Persyaratan Manajemen	
Aspek Secara umum untuk aspek dalam persyaratan manajemen dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat: a) Kebijakan dan Organisasi b) Perencanaan Strategis c) Pelaksanaan dan Pemantauan d) Audit Internal dan Tinjauan Manajemen e) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) f) Ketenagakerjaan Tidak ada perbedaan yang cukup besar dalam aspek persyaratan manajemen dalam dari Standar Industri Hijau (SIH) yang ada. Namun, terdapat penambahan yaitu untuk SIH dari 2019-2022 terdapat aspek "Tinjauan Manajemen", setelah tahun 2023 ke atas terdapat perubahan aspek menjadi "Audit Internal dan Tinjauan Manajemen".	Kriteria Secara umum untuk kriteria dalam persyaratan manajemen dalam Standar Industri Hijau (SIH) tidak cukup banyak perubahan. Namun terdapat perubahan dalam kriteria sebagai berikut: Kebijakan dan Organisasi Dari Sosialisasi Kebijakan dan Organisasi Industri Hijau → Dari Sosialisasi Kebijakan dan Prinsip Industri Hijau Audit Internal dan Tinjauan Manajemen Pelaksanaan Tinjauan Manajemen → Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen Ketenagakerjaan Penyediaan Fasilitas Ketenagakerjaan → Penyediaan Fasilitas dan Program Ketenagakerjaan

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) mencakup berbagai aspek penting, seperti bahan baku, bahan penolong, energi, air, proses produksi, produk, kemasan, limbah, dan emisi gas rumah kaca. Meski secara umum aspek-aspek ini konsisten, terdapat penambahan khusus pada aspek teknis untuk klasifikasi industri tertentu, seperti tekstil (kain) dan kimia (plastik). Penambahan tersebut tidak mengubah aspek utama tetapi memberikan rincian tambahan sesuai kebutuhan spesifik



industri. Selain itu, kriteria dalam persyaratan teknis dapat bervariasi tergantung pada jenis atau klasifikasi industri. Walaupun setiap industri memiliki perbedaan kriteria, ada elemen yang selalu tercantum, seperti spesifikasi bahan baku dan penanganannya, yang berlaku pada berbagai SIH, termasuk SIH 15112.1:2019, SIH 22220.1:2020, SIH 20122.1:2023, dan SIH 24102.2:2023.

Sementara itu, persyaratan manajemen dalam SIH juga memiliki aspek yang meliputi kebijakan dan organisasi, perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan, audit internal dan tinjauan manajemen, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta ketenagakerjaan. Meskipun aspek-aspek ini secara umum konsisten, terdapat perubahan kecil pada beberapa detail. Misalnya, pada SIH dari 2019 hingga 2022, aspek “Tinjauan Manajemen” mengalami penyesuaian menjadi “Audit Internal dan Tinjauan Manajemen” setelah tahun 2023. Kriteria manajemen juga mengalami perubahan, seperti pada kebijakan dan organisasi, di mana sosialisasi kebijakan diperluas untuk mencakup prinsip industri hijau. Selain itu, pelaksanaan tinjauan manajemen kini mencakup audit internal, dan aspek ketenagakerjaan mencakup penyediaan fasilitas serta program ketenagakerjaan. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan penerapan prinsip industri hijau dalam pengelolaan operasional dan manajemen perusahaan.

4.3 READINESS CRITERIA KABUPATEN DEMAK

Penetapan berbagai kriteria kesiapan (*readiness criteria*) sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan penerapan prinsip industri hijau. Kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa daerah ini siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam pengelolaan industri yang berwawasan lingkungan.



Salah satu fokus utama readiness criteria Kabupaten Demak adalah keberlanjutan sumber daya lokal. Langkah-langkah seperti pengelolaan bahan baku, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar nasional telah menjadi prioritas. Industri yang beroperasi di Kabupaten Demak, termasuk industri baja, tekstil, dan penyamakan kulit, diwajibkan untuk mematuhi Standar Industri Hijau (SIH) yang relevan, yang mengatur aspek teknis dan manajemen secara detail.

Tabel 4.11 Hasil Analisis Matriks *Internal Factor Evaluation* (IFE)

Aspek Internal	Bobot	Rating	Nilai
Kekuatan (<i>Strength</i>)			
Ada Kebijakan dan Regulasi Pemprov (Oerda RPIP) dan Pemkab (Perda RPIK)	0,14	3	0,42
Ada program dan kegiatan OPD lintas sektoral terkait industri hijau	0,13	2	0,26
Ada laporan kegiatan terkait industri hijau	0,15	0	0
Ada lembaga sertifikasi industri hijau	0,14	4	0,56
Ada program penilaian kinerja industri hijau (PROPER)	0,13	0	0
Kelemahan (<i>Weakness</i>)			
Sinergitas kegiatan antar OPD dan industri belum optimal	0,08	2	0,16
Daya saing industri rendah	0,05	0	0
Pengetahuan dan kesadaran pentingnya industri hijau masih rendah	0,07	2	0,14
Tergantung pemerintah pusat	0,06	2	0,12
Dana intensif masih rendah	0,05	2	0,1

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Salah satu kekuatan utama dalam pengembangan industri hijau adalah adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung dari tingkat provinsi (Perda RPIP) hingga kabupaten (Perda RPIK). Hal ini menciptakan landasan hukum yang kuat bagi implementasi industri hijau. Selain itu, terdapat program dan kegiatan lintas sektoral yang dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menjadi langkah awal dalam membangun sinergi. Lembaga sertifikasi industri hijau juga hadir sebagai penggerak utama untuk memastikan standar kualitas terpenuhi, memberikan nilai yang signifikan dalam mendukung inisiatif ini. Di sisi lain, program penilaian kinerja industri hijau seperti PROPER menunjukkan potensi besar, meskipun belum diimplementasikan sepenuhnya.

Meskipun terdapat laporan kegiatan yang relevan, absennya pelaporan yang konsisten terkait industri hijau menunjukkan celah yang perlu segera diatasi. Keterbatasan dalam dokumentasi ini dapat mengurangi efektivitas evaluasi dan perencanaan program ke depan. Dalam hal ini, koordinasi lintas OPD memegang peranan penting, namun sayangnya, tingkat sinergitas yang belum optimal menghambat pencapaian hasil yang lebih terintegrasi. Hal ini menandakan perlunya pendekatan yang lebih kolaboratif untuk mengoptimalkan kekuatan yang sudah ada.

Kelemahan utama yang dihadapi adalah rendahnya daya saing industri lokal, yang mempersulit posisi mereka di pasar yang lebih luas. Selain itu, pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pelaku industri terhadap pentingnya konsep industri hijau masih rendah, yang menjadi tantangan besar dalam mendorong perubahan perilaku dan pola pikir. Ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat juga menjadi hambatan dalam mewujudkan keberlanjutan industri hijau, terutama ketika sumber daya atau kebijakan dari tingkat pusat tidak selaras dengan kebutuhan lokal.

Dana insentif yang rendah menjadi salah satu kelemahan krusial dalam mendukung inisiatif industri hijau. Tanpa dukungan finansial yang memadai, program-program inovatif sulit berkembang. Rendahnya alokasi dana ini mempersulit pelaku industri untuk mengadopsi teknologi atau praktik yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan pendanaan, baik melalui kolaborasi dengan sektor swasta maupun mengoptimalkan sumber daya lokal, agar industri hijau dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas.

Tabel 4.12 Hasil Analisis Matriks *External Factor Evaluation* (EFE)

Aspek Eksternal	Bobot	Rating	Nilai
Peluang (<i>Opportunities</i>)			
Komitmen Kepala Daerah besar terkait industri hijau	0,14	4	0,42
Ada regulasi industri hijau	0,13	0	0
Ada alokasi anggaran program industri hijau	0,11	= (data blm terkonfirmasi)	-

Aspek Eksternal	Bobot	Rating	Nilai
Ada dukungan forum CSR	0,13	= (data blm terkonfirmasi)	-
Ada juknis industri hijau bagi daerah	0,14	4	0,42
Tantangan (Threats)			
Pergantian pejabat/penanggung jawab program	0,08	= (data blm terkonfirmasi)	-
Kesadaran masyarakat rendah terkait industri hijau	0,07	2	0,14
Kendala geografis dan akses informasi	0,06	= (data blm terkonfirmasi)	-
Kebiasaan membuang sampah dan limbah sembarangan	0,07	= (data blm terkonfirmasi)	-
Persoalan Kesehatan lingkungan	0,06	= (data blm terkonfirmasi)	-

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Matriks *External Factor Evaluation* (EFE) digunakan untuk mengevaluasi pengaruh faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan tantangan terhadap pelaksanaan program atau kegiatan. Dalam konteks industri hijau, matriks ini menunjukkan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan serta tantangan yang perlu diatasi agar program dapat berjalan optimal. Setiap faktor diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya dan dinilai berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap keberhasilan program.

Pada aspek peluang, terdapat komitmen besar dari kepala daerah terhadap industri hijau, dengan bobot 0,14 dan rating 4, menghasilkan nilai 0,42. Hal ini menunjukkan dukungan politik yang signifikan terhadap inisiatif ini. Selain itu, adanya petunjuk teknis (juknis) industri hijau bagi daerah juga menjadi peluang penting dengan bobot yang sama dan nilai serupa. Namun, beberapa peluang seperti alokasi anggaran program dan dukungan forum CSR belum terkonfirmasi datanya, sehingga belum dapat dihitung kontribusinya terhadap program.

Sementara itu, pada aspek tantangan, kesadaran masyarakat yang rendah terhadap industri hijau menjadi isu penting dengan bobot 0,07 dan rating 2, menghasilkan nilai 0,14. Tantangan lainnya, seperti pergantian pejabat penanggung jawab program, kendala geografis, akses informasi, kebiasaan membuang limbah sembarangan, dan persoalan kesehatan lingkungan, masih

memerlukan konfirmasi data lebih lanjut. Kendala-kendala ini dapat menghambat implementasi program jika tidak segera diatasi.

Secara keseluruhan, matriks EFE ini menggambarkan bahwa peluang industri hijau di daerah cukup besar, terutama didukung oleh komitmen kepala daerah dan panduan teknis yang jelas. Namun, berbagai tantangan yang terkait dengan faktor sosial, lingkungan, dan birokrasi memerlukan perhatian khusus. Untuk itu, strategi yang memanfaatkan peluang secara maksimal sambil mengatasi tantangan secara efektif sangat dibutuhkan agar industri hijau dapat berkembang secara berkelanjutan.

4.4 STAKEHOLDER MAPPING PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU KABUPATEN DEMAK

4.4.1 Kuadran Stakeholder

Stakeholder mapping merupakan langkah penting dalam pengembangan **Grand Design Industri Hijau** di Kabupaten Demak untuk memastikan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak. Menggunakan matriks **Power-Interest Grid** adalah salah satu pendekatan yang umum untuk memetakan stakeholder berdasarkan tingkat kekuatan (**power**) dan kepentingan (**interest**) mereka. Berikut adalah penjelasan umum dari masing-masing kuadran dalam konteks pengembangan industri hijau:

5. High Power - High Interest

Stakeholder dalam kategori ini memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan industri hijau dan juga memiliki minat yang tinggi terhadap proyek tersebut. Mereka harus diutamakan dalam pengambilan keputusan dan dilibatkan secara intensif, misalnya melalui konsultasi rutin. Contoh:

- a. Pemerintah Daerah (Bupati, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian)

- b. Investor utama atau mitra strategis yang mendukung pembiayaan proyek hijau.

6. High Power - Low Interest

Stakeholder dengan pengaruh besar tetapi minat mereka terhadap proyek mungkin rendah. Upaya harus difokuskan pada menjaga hubungan baik dan memastikan mereka tetap mendukung proyek meski keterlibatan mereka minimal.

Contoh:

- a. Pemerintah pusat (Kementerian terkait seperti KLHK dan Kementerian Perindustrian).
- b. Pemilik modal besar yang tidak langsung terlibat.

7. Low Power - High Interest

Stakeholder ini tidak memiliki kekuatan besar untuk memengaruhi hasil, tetapi mereka sangat peduli terhadap keberhasilan proyek. Mereka dapat menjadi agen perubahan dan dikerahkan untuk mendukung implementasi proyek di tingkat masyarakat.

Contoh:

- a. Komunitas lokal dan LSM lingkungan.
- b. Akademisi atau peneliti yang mendalami konsep industri hijau.

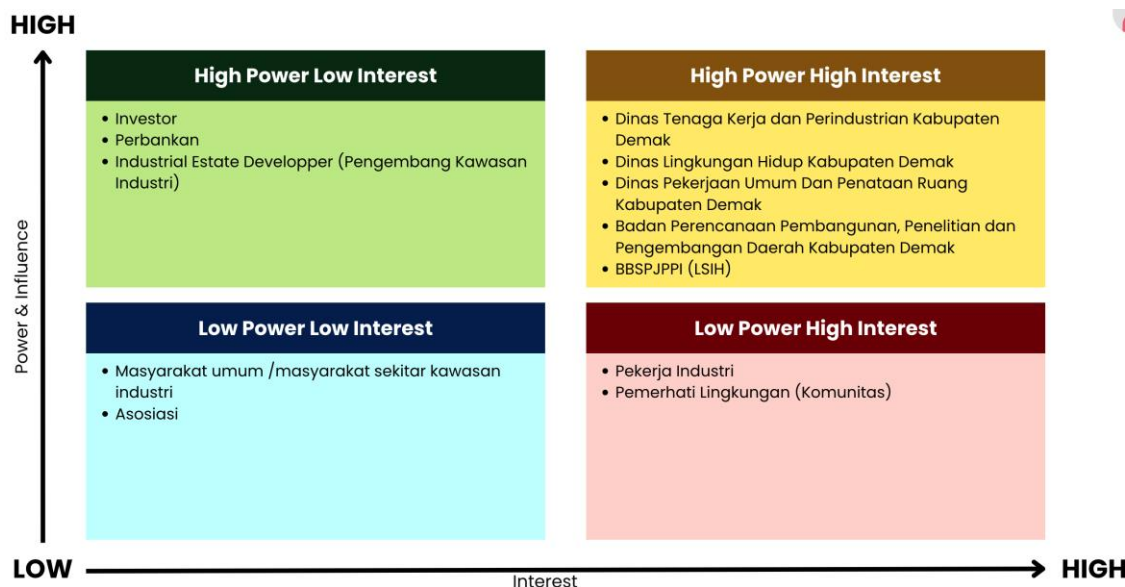
8. Low Power - Low Interest

Stakeholder ini memiliki pengaruh yang kecil dan tidak terlalu tertarik pada proyek. Fokus pada kategori ini dapat diminimalkan, tetapi mereka tetap perlu diperhatikan untuk menjaga kesinambungan.

Contoh:

- a. Masyarakat umum yang tidak secara langsung terkena dampak.

- b. Pelaku usaha kecil yang tidak terlibat dalam rantai industri hijau.



Gambar 4.6 Stakeholder Kunci Iklim Industri Hijau Kabupaten Demak

Sumber: Tim Penyusun, 2024

4.4.2 Langkah Implementasi

Berikut adalah langkah dan strategi implementasi yang dapat diterapkan untuk masing-masing kategori stakeholder dalam pengembangan Grand Design Industri Hijau di Kabupaten Demak, berdasarkan Power-Interest Grid:

1. High Power - High Interest Stakeholder

- Pemerintah Daerah (Bupati, DPRD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian).
- Mitra strategis (investor utama, BUMN terkait).

Langkah dan Strategi Implementasi:

- Melibatkan Secara Aktif dalam Pengambilan Keputusan
Stakeholder ini harus terlibat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
- Membangun komunikasi intensif melalui pertemuan rutin, laporan berkala, dan diskusi strategis guna memastikan ketersediaan informasi terkini terkait manfaat ekonomi,

lingkungan, dan sosial dari proyek ini demi mendukung kepentingan para pemangku kepentingan.

- c. Mengintegrasikan Program dengan Kebijakan Grand Design selaras dengan kebijakan pemerintah daerah atau agenda strategis stakeholder ini.

2. High Power - Low Interest Stakeholder:

- a. Pemerintah Pusat (Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
- b. Pemilik modal besar yang tidak langsung terlibat.

Langkah dan Strategi Implementasi:

- a. Membangun Dukungan semua pihak dan memastikan regulasi terus berjalan
- b. Kepastian program industri hijau mendukung tujuan nasional seperti Net Zero Emission atau RPJMN.
- c. Fokus pada Informasi Singkat dan Strategis
- d. Laporan berkala ringkas yang menyoroti dampak besar proyek terhadap target nasional atau keberlanjutan regional.
- e. Menawarkan Peran sebagai Enabler dukungan dalam bentuk regulasi, pembiayaan insentif, atau kebijakan yang mendukung.

3. Low Power - High Interest Stakeholder:

- a. Komunitas lokal dan masyarakat terdampak.
- b. LSM lingkungan, akademisi, dan institusi pendidikan.

Langkah dan Strategi Implementasi:

- a. Memberikan Edukasi dan Kesadaran program pelatihan, seminar, atau workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep industri hijau.

- b. Menggalang Dukungan dan Partisipasi Aktif pelibatan dalam kegiatan lapangan, seperti penanaman pohon, pemantauan kualitas lingkungan, atau kampanye daur ulang.
 - c. Menciptakan Program Pemberdayaan membangun program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal, seperti integrasi UMKM dengan rantai pasok industri hijau.
 - d. Sebagai Agen Perubahan
 - e. Keterlibatan untuk menyosialisasikan program kepada kelompok masyarakat yang lebih luas.
4. Low Power - Low Interest Stakeholder:
- a. Masyarakat umum yang tidak langsung terkena dampak.
 - b. Pelaku usaha kecil yang belum masuk dalam rantai nilai industri hijau.

Langkah dan Strategi Implementasi:

- a. Menyediakan Informasi Dasar yang Mudah Diakses media sosial, brosur, atau papan informasi untuk menjelaskan program secara singkat.
- b. Meningkatkan Ketertarikan Secara Bertahap informasi bagaimana proyek ini dapat memberikan manfaat tidak langsung, seperti perbaikan kualitas lingkungan atau peluang usaha baru.
- c. Mengurangi Resistensi memberikan penjelasan terkait pengelolaan dampak proyek terhadap masyarakat.
- d. Melibatkan Secara Pasif dan keterlibatan yang intensif.

Setiap kategori stakeholder memerlukan pendekatan berbeda sesuai dengan posisi mereka dalam matriks Power-Interest. Transparansi dan Komunikasi bagi semua stakeholder diperlukan agar semua stakeholder memiliki akses ke informasi yang relevan agar tercipta kepercayaan.

Kolaborasi Multipihak antara stakeholder di setiap kuadran untuk menciptakan sinergi dan keberlanjutan. Pemantauan Dinamis dan evaluasi rutin karena posisi stakeholder dalam matriks dapat berubah seiring perkembangan industri hijau.

4.4.3 Telaah Peran Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI)

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) adalah sebuah institusi pemerintah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan industri berkelanjutan di Indonesia. Sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, BBSPJPPI memiliki misi utama untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas industri dalam menerapkan praktik ramah lingkungan, yang tidak hanya berkontribusi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga pada peningkatan daya saing industri di pasar global.

Dalam menjalankan tugasnya, BBSPJPPI menyediakan berbagai layanan, termasuk pengembangan standar, pelatihan, dan konsultasi teknis bagi pelaku industri. Standar yang dikembangkan bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi industri memenuhi persyaratan keberlanjutan dan efisiensi, baik dalam penggunaan energi maupun pengelolaan limbah. Dengan adanya standar ini, industri dapat lebih mudah mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, BBSPJPPI juga aktif dalam memberikan pelayanan laboratorium untuk analisis dan pengujian kualitas lingkungan, seperti air, udara, dan limbah industri. Layanan ini penting untuk membantu industri memantau dampak lingkungannya secara objektif dan menerapkan langkah-langkah korektif bila diperlukan. Laboratorium BBSPJPPI

dilengkapi dengan peralatan modern dan tenaga ahli yang kompeten untuk menjamin akurasi hasil pengujian.

Sebagai pusat unggulan di bidang pencegahan pencemaran industri, BBSPJPPI juga mengadakan program pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja industri. Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja dalam menerapkan teknologi dan praktik yang mendukung keberlanjutan. Pelatihan meliputi berbagai topik, seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penerapan teknologi bersih.

BBSPJPPI juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mendukung pengembangan inovasi teknologi ramah lingkungan. Melalui kolaborasi ini, BBSPJPPI berupaya memperkenalkan teknologi mutakhir yang dapat diterapkan oleh industri di Indonesia, sehingga mendukung transformasi industri menuju era yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Dalam hal berkaitan dengan industri hijau, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pengembangan Industri (BBSPJPPI) memainkan peran strategis dalam pembangunan iklim industri hijau di Indonesia. Sebagai lembaga yang bergerak dalam standardisasi dan pelayanan jasa industri, BBSPJPPI berkomitmen untuk mendorong penerapan prinsip keberlanjutan di sektor industri. Melalui program-program inovatif dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BBSPJPPI menciptakan ekosistem industri yang mendukung efisiensi energi, pengurangan limbah, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Salah satu kontribusi utama BBSPJPPI adalah pengembangan standar industri hijau yang menjadi acuan bagi perusahaan dalam menjalankan operasional yang ramah lingkungan. Standar ini mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan bahan baku terbarukan, penerapan teknologi bersih, dan manajemen limbah yang efektif. Dengan adanya standar ini,



BBSPJPPI membantu perusahaan meningkatkan daya saingnya di pasar global, yang semakin menuntut produk-produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Selain itu, BBSPJPPI juga memberikan layanan konsultasi dan pelatihan kepada pelaku industri untuk mendukung transisi menuju praktik hijau. Melalui program ini, industri diberikan panduan teknis dan manajemen untuk menerapkan prinsip industri hijau secara efektif. Hal ini tidak hanya mempercepat adaptasi pelaku industri terhadap kebijakan keberlanjutan, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya tanggung jawab lingkungan dalam operasional bisnis.

Sebagai pusat inovasi, BBSPJPPI juga mendorong riset dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Berbagai proyek riset yang dilakukan difokuskan pada penciptaan solusi inovatif yang dapat mendukung efisiensi energi dan pengelolaan limbah. Kolaborasi dengan universitas, lembaga riset, dan mitra internasional memperkaya hasil riset yang dihasilkan, sehingga dapat diaplikasikan secara luas oleh pelaku industri di berbagai sektor.

Telaah mengenai peran Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak BBSPJPPI. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait berbagai aspek yang mendukung penerapan industri hijau. Wawancara ini mencakup pembahasan mengenai gambaran umum konsep industri hijau, mekanisme sertifikasi industri hijau, hingga analisis perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi industri hijau di wilayah Kabupaten Demak.

Melalui wawancara tersebut, diperoleh informasi rinci mengenai bagaimana BBSPJPPI menjalankan fungsinya dalam mendorong pengembangan industri yang lebih ramah lingkungan. Salah satu fokus

utamanya adalah sertifikasi industri hijau, yang bertujuan untuk memastikan bahwa operasional industri telah memenuhi kriteria keberlanjutan, seperti efisiensi penggunaan energi, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan. Proses ini tidak hanya membantu meningkatkan daya saing industri, tetapi juga mendukung target pemerintah dalam menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Berikut adalah poin-poin utama yang berhasil dirangkum dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Poin-poin ini mencerminkan inti pembahasan dan informasi penting yang diperoleh selama proses wawancara, mencakup berbagai aspek terkait dengan topik yang menjadi fokus penelitian. Poin-poin utama ini meliputi pandangan mendalam dari narasumber mengenai isu yang diangkat, langkah-langkah strategis yang telah atau sedang diupayakan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan atau program tertentu. Informasi ini tidak hanya memberikan gambaran situasional, tetapi juga menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dalam mengidentifikasi peluang perbaikan atau inovasi. Selain itu, hasil wawancara juga mencakup rekomendasi praktis dari narasumber yang didasarkan pada pengalaman mereka di lapangan. Rekomendasi ini menjadi bahan penting untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.

Tabel 4.13 Hasil Wawancara BBSPJPPI

INSTANSI	KEYPOINT HASIL WAWANCARA
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran	• BBSPJPPI merupakan salah satu lembaga yang memiliki Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH). Namun, terdapat 12 balai besar lainnya di Indonesia yang juga berperan dalam proses sertifikasi ini. Perbedaan utama antara balai-balai tersebut terletak pada sasaran komoditas industrinya, yang telah ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3065 Tahun 2024. • Sertifikasi Industri Hijau masih bersifat <i>voluntary</i> (sukarela) dan masih tidak wajib bagi industri. Industri yang ingin memiliki Sertifikat

INSTANSI	KEYPOINT HASIL WAWANCARA
Industri (BBSPJPPI)	Industri Hijau (SIH) melakukan proses pengajuan sertifikasinya sendiri • Belum ada industri yang telah memperoleh Sertifikat Industri Hijau di Kabupaten Demak menurut LSIH BBSPJPPI • Peran BBSPJPPI selain sebagai LSIH, juga bisa memberikan jasa pendampingan atau bimbingan teknis ke industri yang berkeinginan untuk memperoleh sertifikat industri hijau. • Kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan BBSPJPPI untuk urusan sertifikasi industri hijau belum ada. • Untuk kolaborasi khusus antara BBSPJPPI dengan Pemda pernah dilakukan untuk pemerintah tingkat provinsi, seperti Dinperindag Jawa Tengah dalam kegiatan sosialisasi yang berhubungan dengan penerapan industri hijau • Mekanisme <i>reward & punishment</i> sendiri belum ada sejauh ini. Untuk insentif dan disinsentif bagi industri yang sudah memiliki sertifikat sejauh ini belum ada, hanya sebatas penghargaan saja. Namun, Kementerian Perindustrian sedang menyusun peraturan yang mengatur terkait insentif atau disinsentif untuk industri yang telah memiliki Sertifikat Industri Hijau (SIH) • Tantangan dan/atau kendala dalam sertifikasi industri hijau, antara lain kegiatan sertifikasi industri hijau ini sifatnya masih <i>voulantary</i> dan belum wajib, standar industri hijau ini masih menyasar industri-industri besar, dan belum adanya aturan jelas terkait insentif dan disinsentif • Saran untuk mendorong dan mengoptimalkan peran dari Pemerintah Daerah adalah <i>mapping data</i>. Data hasil <i>mapping</i> itu menjadi data dasar atau data utama untuk bagaimana Pemerintah Daerah untuk membuat sebuah program agar tidak salah sasaran

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Ditinjau berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BBSPJPPI di atas, Sebagai Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH), BBSPJPPI bertanggung jawab dalam menerbitkan Sertifikat Industri Hijau (SIH). Namun, tanggung jawab ini tidak eksklusif, karena terdapat 12 balai besar lainnya yang juga memiliki peran dalam sertifikasi, dengan sasaran komoditas industri yang berbeda sesuai Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 3065 Tahun 2024. Meski demikian, sertifikasi ini bersifat sukarela, sehingga industri yang

ingin memiliki SIH harus mengajukan sendiri tanpa kewajiban hukum yang mengikat.

Saat ini, belum ada industri di Kabupaten Demak yang memperoleh SIH berdasarkan data dari LSIH BBSPJPPI. Meski demikian, BBSPJPPI tidak hanya berperan dalam sertifikasi, tetapi juga menyediakan jasa pendampingan dan bimbingan teknis bagi industri yang ingin memperoleh sertifikat tersebut. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan dukungan teknis kepada pelaku industri agar lebih siap dalam memenuhi standar industri hijau yang ditetapkan. Sayangnya, kerja sama formal antara Pemerintah Kabupaten Demak dan BBSPJPPI dalam hal ini belum terjalin, meskipun pernah ada kolaborasi serupa di tingkat provinsi, seperti dengan Dinperindag Jawa Tengah dalam kegiatan sosialisasi industri hijau.

Salah satu kendala utama dalam sertifikasi industri hijau adalah belum adanya mekanisme insentif dan disinsentif yang jelas. Saat ini, penghargaan bagi industri yang telah memiliki SIH hanya sebatas pengakuan tanpa diiringi keuntungan material atau fiskal. Kementerian Perindustrian saat ini sedang menyusun peraturan terkait pemberian insentif dan disinsentif ini, yang diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi pelaku industri untuk lebih aktif berpartisipasi. Di sisi lain, tantangan lain yang dihadapi adalah standar industri hijau yang masih cenderung menyasar industri besar, sehingga industri kecil dan menengah (IKM) belum sepenuhnya terakomodasi.

BBSPJPPI menghadapi tantangan lain, yakni rendahnya tingkat kesadaran pelaku industri terhadap manfaat dan urgensi sertifikasi ini. Karena sifat sertifikasinya yang sukarela, banyak industri yang belum memprioritaskan untuk mengikuti proses ini. Ditambah lagi, belum adanya aturan insentif yang jelas membuat pelaku industri enggan meluangkan sumber daya mereka untuk memperoleh SIH. Oleh karena itu, peningkatan



kesadaran dan penyediaan insentif yang menarik menjadi langkah penting untuk mendorong implementasi industri hijau secara lebih luas.

Untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam mendukung industri hijau, BBSPJPPI menyarankan agar dilakukan pemetaan data yang menyeluruh. Data hasil pemetaan tersebut dapat menjadi acuan utama dalam merancang program yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan industri di wilayah tertentu. Dengan pendekatan berbasis data, kebijakan dan program yang dirumuskan akan lebih efektif dalam mendorong partisipasi pelaku industri, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di sektor industri.



4.4.4 Kesesuaian Program berbasis OPD

Setelah dilakukan *Stakeholder Mapping* untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan Industri Hijau di Kabupaten Demak, langkah berikutnya adalah memperkuat (*intensifikasi*) dan memperluas (*ekstensifikasi*) peran masing-masing stakeholder. Saat ini, proses identifikasi peran tersebut dapat difokuskan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan program-program yang ada di berbagai OPD dengan tujuan pengembangan Industri Hijau. Penyelarasan tersebut dilakukan dengan mengacu pada **Rencana Kerja (Renja)** dan **Rencana Strategis (Renstra)** masing-masing OPD. Dalam hal ini, beberapa OPD yang berperan penting adalah:

1. **Dinas Lingkungan Hidup (DLH)** - terkait dengan aspek lingkungan dan keberlanjutan.
2. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU)** - berfokus pada tata ruang dan infrastruktur pendukung.
3. **Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (DINAKERIND)** - berkaitan dengan pengembangan tenaga kerja dan sektor industri.

Integrasi program yang dilakukan oleh OPD-OPD ini menjadi langkah strategis untuk memastikan terpenuhinya kriteria dasar Industri Hijau di Kabupaten Demak berdasarkan program eksisting di masing-masing OPD terkait. Berikut adalah matriks program berdasarkan OPD:

Tabel 4.14 Matriks Program Pengembangan Industri Hijau Kabupaten Demak

No	Kesesuaian Parameter	Program / Kegiatan	Stakeholder (OPD internal)
Sumber Daya Alam			
1	Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat mengenai: c. Bahan Baku d. Bahan Penolong	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam	• Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
2		Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	
3		Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	
4		Diversifikasi pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan di perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	
5		Konservasi sumber daya alam terbarukan	
6		Menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	
7		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya industri	
8	Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat mengenai limbah	Implementasi pemanfaatan sumber daya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>); dan pemulihan (<i>recovery</i>)	• Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian • Dinas Lingkungan Hidup
9	Parameter Penunjang	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	• Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Pengelolaan Lingkungan			
1	Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat mengenai: c. Limbah d. Emisi Gas Rumah Kaca	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	• Dinas Lingkungan Hidup
2		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
3		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
4		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
5		Penyimpanan Sementara Limbah B3	
6		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	
7		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
8		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
9	Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat mengenai Proses Produksi	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	• Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian • Dinas Lingkungan Hidup
Energi			
1	Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat mengenai Energi	Penerapan kebijakan diversifikasi energi untuk industri	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2		Pengembangan sumber energi yang terbarukan	
3		Diversifikasi dan konservasi energi	
4		Pengembangan industri pendukung pembangkit energi	

No	Kesesuaian Parameter	Program / Kegiatan	Stakeholder (OPD internal)
Infrastruktur			
1	Persyaratan teknis dalam Standar Industri Hijau (SIH) minimal memuat mengenai Air	Peningkatan jaringan air untuk industri	- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Parameter Penunjang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
4		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
Pengembangan Industri			
1	Berkenaan dengan keseluruhan proses bisnis industri hijau	Pembinaan Standar Industri Hijau	- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2		Pemberian fasilitas untuk Industri Hijau	
3	Parameter Penunjang	Koordinasi OPD terkait penyelesaian aspek aspek yang terkait pertanahan	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4		Memberikan kemudahan dalam pengadaan lahan industri	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5		Penyediaan lahan untuk pembangunan sentra IKM	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
6		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
Kesesuaian RTRW			
1	Parameter Penunjang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2		Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
3		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	

BAB - 5

ROADMAP PEMBANGUNAN INDUSTRI HIJAU 2025-2045

Bagian ini berisikan Roadmap grand desain pembangunan industri hijau di wilayah Kabupaten Demak tahun 2025-2045

Kabupaten Demak, dengan potensi alam, sumber daya manusia, dan posisi strategisnya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri hijau yang berkelanjutan. Roadmap ini bertujuan untuk memberikan panduan strategis pembangunan industri hijau di Kabupaten Demak dalam periode 20 tahun, yang terbagi ke dalam lima tahapan lima tahunan.

5.1 TAHAP 1: FONDASI DAN KESADARAN (2025-2030)

5.1.1 Tujuan Utama:

1. Membangun kesadaran akan pentingnya industri hijau.
2. Memulai pengembangan regulasi dan infrastruktur dasar.

5.1.2 Strategi:

1. Kebijakan dan Regulasi:

- a. Penyusunan peraturan daerah tentang industri hijau sekaligus pengesahan terhadap Peraturan Peraturan Rencana Industri Kabupaten Demak
- b. Insentif untuk pelaku usaha yang beralih ke proses produksi ramah lingkungan.

2. Penguatan Kapasitas:

- a. Pelatihan dan sosialisasi terkait teknologi ramah lingkungan.
- b. Kerjasama dengan akademisi dan lembaga penelitian untuk inovasi teknologi hijau.

- c. Melakukan Kerjasama dengan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dalam hal sertifikasi dan standardisasi
- d. Melakukan Audit Energi dan evaluasi terhadap Dokumen PROPER Industri
- e. Melakukan audiensi dan kolaborasi dengan ESDM dan KLHK terkait sistem produksi
- f. Kolaborasi pendanaan dengan NGO
- g. Ausiensi dan fasilitasi dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) bagi fasilitasi IKM Hijau
- h. Kolaborasi dengan Bank Indonesia bagi fasilitasi IKM Hijau

3. Infrastruktur:

- a. Pembangunan fasilitas pengelolaan limbah industri.
- b. Penyediaan energi terbarukan skala kecil, seperti PLTS untuk kawasan industri.

4. Partisipasi Masyarakat:

- a. Kampanye edukasi publik tentang pentingnya produk ramah lingkungan.

5.2 TAHAP 2: IMPLEMENTASI AWAL DAN PILOT PROJECT (2030-2035)

5.2.1 Tujuan Utama:

- 1. Mewujudkan proyek percontohan industri hijau.
- 2. Mendorong adopsi teknologi hijau oleh industri kecil dan menengah (IKM).

5.2.2 Strategi:

1. Pilot Project:

- a. Peluncuran kawasan industri hijau percontohan di Kabupaten Demak.

- b. Pendampingan untuk IKM dalam penerapan standar industri hijau.

2. Infrastruktur dan Teknologi:

- a. Peningkatan kapasitas PLTS, biogas, dan sumber energi terbarukan lainnya.
- b. Pengembangan sistem pengelolaan limbah terpadu untuk kawasan industri.

3. Kerjasama:

- a. Bermitra dengan sektor swasta dan investor untuk pembiayaan teknologi hijau.
- b. Membangun kolaborasi internasional untuk transfer teknologi.

5.3 TAHAP 3: AKSELERASI DAN EKSPANSI (2035-2040)

5.3.1 Tujuan Utama:

- 1. Meningkatkan skala penerapan industri hijau.
- 2. Menjadikan Demak sebagai pusat inovasi industri hijau di Jawa Tengah.

5.3.2 Strategi:

1. Ekspansi:

- a. Perluasan kawasan industri hijau.
- b. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan teknologi hijau.

2. Riset dan Pengembangan:

- a. Pendirian pusat penelitian dan inovasi industri hijau.
- b. Insentif untuk riset terkait bahan baku lokal yang ramah lingkungan.

3. Digitalisasi:

- a. Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi proses produksi dan distribusi.
- b. Sistem monitoring online untuk kepatuhan lingkungan oleh industri.

5.4 TAHAP 4: PEMANTAPAN DAN INTEGRASI (2040-2045)

5.4.1 Tujuan Utama:

1. Mencapai keberlanjutan penuh dalam sektor industri hijau.
2. Integrasi industri hijau dengan ekonomi lokal dan regional.

5.4.2 Strategi:

1. Keberlanjutan:

- a. Standarisasi semua proses industri di Kabupaten Demak sesuai dengan standar hijau nasional dan internasional.
- b. Implementasi ekonomi sirkular di seluruh sektor industri.

2. Integrasi Ekonomi:

- a. Meningkatkan ekspor produk industri hijau.
- b. Membangun ekosistem industri hijau yang terintegrasi dengan sektor pertanian dan pariwisata.

3. Evaluasi dan Adaptasi:

- a. Evaluasi menyeluruh terhadap capaian roadmap.
- b. Penyesuaian strategi berdasarkan tantangan dan peluang baru.

5.5 INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk memastikan pencapaian pembangunan Industri Hijau yang berkelanjutan di Kabupaten Demak, diperlukan indikator keberhasilan yang jelas, terukur, dan relevan. **Key Performance Indicator (KPI)** disusun agar dapat digunakan sebagai alat ukur dalam mengevaluasi kinerja dan keberhasilan program pada jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. KPI ini dirancang agar

mampu menjawab target pembangunan Industri Hijau secara holistik, meliputi aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola.

1. Peningkatan jumlah industri yang menggunakan teknologi ramah lingkungan.
2. Penurunan emisi karbon di sektor industri.
3. Peningkatan kontribusi sektor industri hijau terhadap PDRB Kabupaten Demak.
4. Peningkatan daya saing produk lokal di pasar nasional dan internasional.

Adapun secara terperinci indikator yang dimaksud dapat dibagi pada tahapan-tahapan berikut ini:

5.5.1 Indikator Jangka Pendek (2025–2030)

Pada fase awal, fokus diarahkan pada pembangunan fondasi, infrastruktur, dan kesadaran terhadap industri hijau. Indikator yang diukur meliputi:

1. Regulasi dan Kebijakan:

- a. Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Industri Hijau.
- b. Penerapan insentif fiskal bagi industri yang menerapkan praktik hijau.

2. Peningkatan Kapasitas SDM:

- a. Jumlah pelaku industri yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi teknologi hijau.
- b. Peningkatan tenaga kerja lokal yang terlatih di sektor industri hijau sebesar 15%.

3. Infrastruktur Hijau:

- a. Tersedianya fasilitas pengelolaan limbah terpadu di kawasan industri utama.

- b. Penggunaan energi terbarukan di minimal 20% dari total industri.

5.5.2 Indikator Jangka Menengah (2031–2038)

Pada tahap ini, fokus diarahkan pada percepatan implementasi dan penguatan ekosistem industri hijau. Indikator yang diukur meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi Hijau:

- a. Peningkatan kontribusi industri hijau terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 10% per tahun.
- b. Peningkatan jumlah investasi pada sektor industri hijau sebesar 25%.

2. Teknologi dan Inovasi:

- a. Jumlah industri kecil dan menengah (IKM) yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan mencapai 50% dari total industri.
- b. Peningkatan produksi barang dengan label ramah lingkungan sebesar 30%.

3. Efisiensi Sumber Daya:

- a. Penurunan penggunaan energi konvensional sebesar 25%.
- b. Pengurangan emisi karbon sebesar 30% dibandingkan tahun dasar (baseline).

5.5.3 Indikator Jangka Panjang (2039–2045)

Tahap ini bertujuan untuk mencapai keberlanjutan penuh dengan penerapan praktik industri hijau secara menyeluruh. Indikator yang diukur meliputi:

1. Keberlanjutan Lingkungan:

- a. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Kabupaten Demak mencapai skor 85 atau lebih.

- b. Pemanfaatan 100% energi terbarukan di kawasan industri prioritas.

2. Dampak Sosial:

- a. Pengurangan tingkat pengangguran di Kabupaten Demak sebesar 50% melalui lapangan kerja di sektor hijau.
- b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai angka 80.

3. Tata Kelola Berkelanjutan:

- a. Penerapan sistem digital monitoring berbasis teknologi untuk mengawasi kepatuhan industri terhadap prinsip hijau.
- b. Kabupaten Demak diakui sebagai model nasional atau internasional dalam pengelolaan industri hijau.

5.5.4 Evaluasi dan Monitoring

Untuk mendukung keberhasilan indikator ini, diperlukan mekanisme evaluasi secara berkala:

- 1. Jangka Pendek:** Evaluasi tahunan untuk memastikan pembangunan fondasi berjalan sesuai rencana.
- 2. Jangka Menengah:** Evaluasi lima tahunan untuk mengukur keberhasilan implementasi program dan strategi yang telah dilakukan.
- 3. Jangka Panjang:** Evaluasi akhir untuk menilai pencapaian visi Grand Desain 2045 dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.

Dengan indikator yang komprehensif ini, Pemerintah Kabupaten Demak dapat memastikan bahwa Grand Desain Pembangunan Industri Hijau berjalan secara terarah, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan.

BAB - 6

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Grand Desain Pembangunan Industri Hijau Kabupaten Demak tahun 2025–2045 memberikan gambaran arah pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, dengan fokus pada pengintegrasian prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam aktivitas industri. Namun, berdasarkan hasil kajian, disimpulkan bahwa Kabupaten Demak saat ini masih menghadapi tantangan signifikan terkait readiness criteria atau kriteria kesiapan mendasar yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Beberapa poin penting dari kesimpulan ini meliputi:

1. Ketersediaan Infrastruktur Dasar Infrastruktur yang mendukung penerapan industri hijau, seperti jaringan energi bersih, pengelolaan limbah, dan sistem air bersih, masih memerlukan pengembangan yang lebih komprehensif. Ketidaksiapan ini menjadi hambatan utama dalam menarik investasi di sektor industri hijau.
2. Regulasi dan Kebijakan Penunjang Kabupaten Demak belum memiliki perangkat regulasi lokal yang spesifik dan mendukung pelaksanaan industri hijau secara sistematis. Keterbatasan ini mengurangi daya tarik bagi pelaku industri untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan.
3. Kurangnya Koordinasi Antar-Pemangku Kepentingan Dimana tidak terdapat mekanisme koordinasi yang sistematis antara pemerintah daerah, pelaku industri, masyarakat, dan lembaga terkait, sehingga



program-program pembangunan industri hijau berjalan secara parsial dan tidak saling mendukung.

4. Minimnya Panduan Teknis untuk Implementasi Pedoman teknis yang mendukung penerapan prinsip-prinsip industri hijau, seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan, belum tersedia secara jelas. Hal ini menyulitkan pelaku industri dalam mengadopsi standar hijau secara konsisten.
5. Belum Optimalnya Pengawasan dan Evaluasi dimana tidak tersedia Sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan praktik industri hijau masih belum terbentuk, sehingga capaian program tidak dapat diukur secara efektif.
6. Keterbatasan Pendukung Tata Kelola, Kurangnya kapasitas SDM, teknologi, dan infrastruktur yang mendukung pengelolaan industri hijau menambah hambatan dalam pembentukan tata kelola yang sistematis.
7. Kesadaran dan Dukungan Sosial Tingkat kesadaran masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah terhadap pentingnya industri hijau masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi dan edukasi menjadi langkah krusial untuk mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak.
8. Akses Pendanaan Hijau Kabupaten Demak masih menghadapi keterbatasan akses ke skema pendanaan yang mendukung investasi di sektor hijau. Padahal, pendanaan hijau merupakan salah satu faktor penting dalam mengakselerasi pembangunan industri berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi readiness criteria ini, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan yang ada, seperti penguatan data profil industri, sistem database, pengembangan infrastruktur hijau, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan regulasi yang mendukung, serta peningkatan kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga pendanaan.

Dengan pendekatan yang holistik dan komprehensif, Kabupaten Demak memiliki potensi besar untuk mewujudkan Grand Desain Pembangunan Industri Hijau yang tidak hanya berdaya saing tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2025–2045.

6.2 REKOMENDASI

Dengan tersedianya kerangka tata kelola yang sistematis, Kabupaten Demak akan memiliki fondasi yang kokoh untuk mewujudkan pembangunan industri hijau yang berdaya saing dan berkelanjutan sesuai dengan visi Grand Desain tahun 2025–2045. Berkaitan dengan komponen isu dan permasalahan di atas, untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah-langkah berikut:

1. Penyusunan Regulasi Daerah: Mengembangkan peraturan daerah yang khusus mengatur tata kelola industri hijau, lengkap dengan kerangka kebijakan, prosedur teknis, dan indikator kinerja.
2. Pembentukan Lembaga Koordinasi: Mendirikan lembaga atau forum koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyinergikan program dan kebijakan.
3. Penyediaan Panduan Teknis: Menyusun panduan teknis yang komprehensif bagi pelaku industri dalam menerapkan praktik hijau sesuai standar nasional dan internasional.
4. Pembangunan Sistem Pengawasan: Membentuk sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau kepatuhan industri terhadap prinsip-prinsip hijau secara transparan.
5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi: Mengadakan pelatihan dan menyediakan akses terhadap teknologi hijau guna memperkuat kemampuan implementasi tata kelola industri hijau.

Selain itu aspek penting lainnya yang harus dituangkan spesifik dalam rekomendasi ini adalah **Koordinasi dan Kolaborasi untuk Pencapaian Komitmen Industri Hijau di Kabupaten Demak**. Dalam upaya mencapai komitmen pembangunan **Industri Hijau di Kabupaten Demak**, diperlukan langkah strategis yang melibatkan **koordinasi dan kolaborasi multi-pihak**. Salah satu langkah penting adalah membangun hubungan sinergis dengan lembaga-lembaga sertifikasi, organisasi non-pemerintah (NGO), serta melakukan audiensi langsung dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA).

1. Koordinasi dengan Lembaga Sertifikasi. Lembaga sertifikasi memiliki peran penting dalam memberikan pengakuan resmi terhadap penerapan prinsip industri hijau di tingkat pelaku usaha. Langkah-langkah koordinasi yang perlu dilakukan meliputi:
 - a. **Identifikasi Standar dan Kebutuhan Sertifikasi:** Mengidentifikasi standar-standar hijau yang relevan, seperti ISO 14001 (Manajemen Lingkungan) atau sertifikasi efisiensi energi.
 - b. **Sosialisasi Proses Sertifikasi kepada Pelaku Industri:** Mengadakan pelatihan atau seminar bagi pelaku usaha di Kabupaten Demak terkait manfaat dan proses sertifikasi hijau.
 - c. **Fasilitasi Proses Sertifikasi:** Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi untuk memberikan subsidi atau insentif guna memudahkan pelaku usaha dalam memenuhi kriteria sertifikasi hijau.
2. Kolaborasi dengan NGO Dimana Organisasi non-pemerintah (NGO) dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung penerapan industri hijau melalui pendekatan yang inovatif dan berbasis masyarakat. Upaya kolaborasi yang dapat dilakukan antara lain:
 - a. **Kampanye Kesadaran Lingkungan:** Bekerja sama dengan NGO untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri

tentang pentingnya industri hijau melalui program edukasi, kampanye, dan publikasi.

- b. **Penerapan Teknologi Hijau:** NGO dapat membantu memperkenalkan teknologi ramah lingkungan yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Demak.
 - c. **Pemberdayaan Masyarakat:** Mengintegrasikan masyarakat lokal dalam ekosistem industri hijau melalui program pelatihan keterampilan berbasis prinsip keberlanjutan.
3. Audiensi dengan Dirjen IKMA. Audiensi dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA) Kementerian Perindustrian merupakan langkah strategis untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah pusat. Beberapa agenda utama dalam audiensi ini adalah:
- a. **Pemaparan Grand Desain Industri Hijau Kabupaten Demak:** Menyampaikan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan industri hijau sebagai langkah nyata dalam mendukung komitmen nasional terhadap pembangunan berkelanjutan.
 - b. **Pengajuan Program Khusus:** Mengusulkan program atau proyek percontohan (pilot project) industri hijau yang didukung oleh Dirjen IKMA, seperti pelatihan SDM, pendanaan teknologi hijau, atau pembangunan infrastruktur hijau.
 - c. **Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah:** Memastikan bahwa program pengembangan industri hijau di Kabupaten Demak selaras dengan kebijakan nasional dan mendapat prioritas dalam agenda pemerintah pusat.

Koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga sertifikasi, NGO, serta audiensi dengan Dirjen IKMA merupakan langkah strategis yang saling melengkapi untuk mempercepat pencapaian komitmen industri hijau di Kabupaten Demak. Dengan

pendekatan yang kolaboratif, Kabupaten Demak dapat membangun ekosistem industri hijau yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga berdaya saing, inovatif, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

